



DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN
2023



LKjIP



DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN MADIUN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur Kehadirat Allah SWT sehingga dapat kami selesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023.

Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Kami berharap dengan buku LKjIP ini dapat memberikan gambaran/hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang telah kami laksanakan.

Atas segala kekurangan yang terjadi, kami mohon maaf dan kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga kegiatan-kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun terlaksana dengan lancar.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Madiun, Februari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN



SUMANTO, SP., MMA
Pembina Tingkat 1
NIP. 196509191999031006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Organisasi	2
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	19
1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	24
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	27
2.2 Rencana Kerja Tahun 2023.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	39
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	39
3.2 Analisis Capaian Kinerja	41
B. Analisis Penggunaan Anggaran	50
3.3 Efisiensi	50
3.4 Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	62
3.5 Tugas Pembantuan	132
C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	151
BAB IV PENUTUP	152
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Madiun Menurut Golongan.....	3
Tabel 2. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Madiun Menurut Pendidikan.....	4
Tabel 3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT)	19
Tabel 4. Penyusunan Strategi berdasarkan Analisis SWOT.....	20
Tabel 5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun.....	22
Tabel 6. Tabel Komponen Penilaian SAKIP.....	25
Tabel 7. Tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan periode 2018-2023.....	28
Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2018-2020.....	28
Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2023.....	29
Tabel 10. Cara Mencapai Tujuan.....	30
Tabel 11. Target dan Realisasi Tujuan Tahun 2023.....	31
Tabel 12. Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2023.....	31
Tabel 13. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	32
Tabel 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	37
Tabel 15. Program dan Anggaran Tahun 2023.....	37
Tabel 16. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	39
Tabel 17. Target Tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan.....	39
Tabel 18. Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	40
Tabel 19. Target dan Realisasi RENSTRA 2019-2023.....	42
Tabel 20. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2023.....	50
Tabel 21. Tabel Efisiensi Anggaran.....	50

Tabel 22. Tabel Efisiensi Anggaran.....	51
Tabel 23. Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1. Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan.....	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Salah satu tuntutan publik dewasa ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara mulai dari eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. Untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu pembangunan maka seluruh kegiatan dinas Tahun Anggaran 2022 perlu diketahui tingkat relevansi, efesiensi dan efektifitasnya, manfaat dan dampak yang ditimbulkannya. Evaluasi pembangunan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan setiap kegiatan pada tahun berikutnya dan membantu perencana dalam penyusunan program di masa mendatang.

Pembangunan Kabupaten Madiun merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur serta pembangunan nasional, sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam perencanaan pembangunan nasional, pembangunan bidang pertanian masih menjadi prioritas utama. Oleh karena itu pembangunan pertanian harus merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan perdesaan. Dengan demikian sektor pertanian dituntut untuk tumbuh dan berkembang dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus memecahkan permasalahan ekonomi nasional seperti penyediaan pangan, bahan baku untuk industri, peningkatan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dilaksanakan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Tujuan pembangunan pertanian bukan saja untuk meningkatkan produksi pertanian yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekspor, melainkan juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian terbesar rakyat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan, serta untuk menjadikan pertanian semakin kuat guna mendukung pembangunan di sektor industri. Pengelolaan potensi sumberdaya pertanian tidak lagi hanya mengandalkan peningkatan produksi akan tetapi juga dikelola berorientasi kepada kebutuhan pasar.

Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja dinas, yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP OPD dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja OPD di tahun mendatang.

1.2. Struktur Organisasi

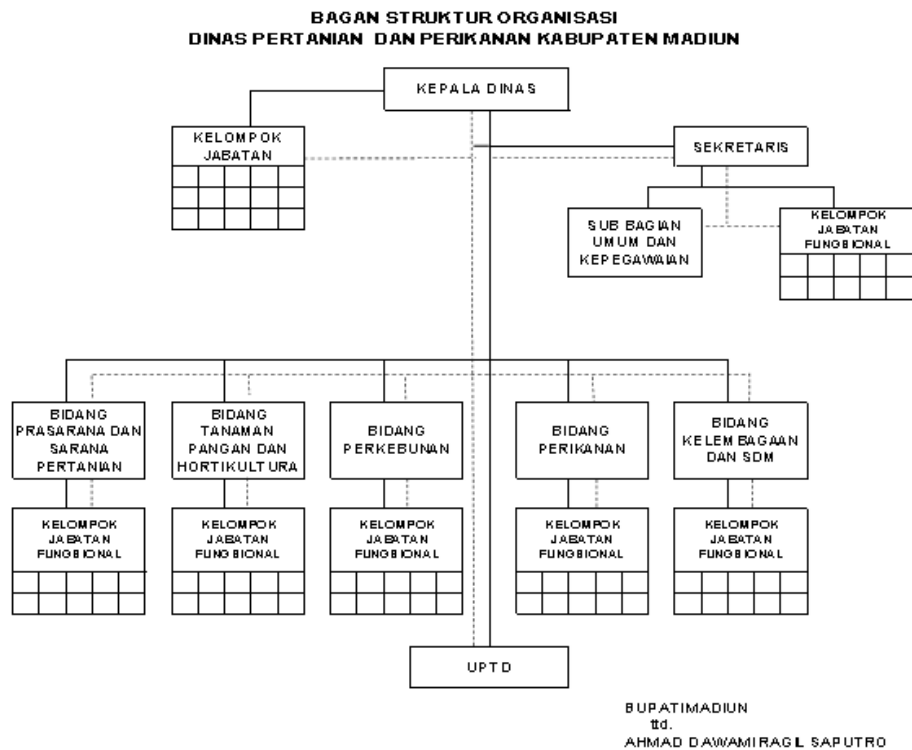
Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor : 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Perikanan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

h. UPT

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan tersebut sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:



Dari Sembilan susunan jabatan tersebut, Dinas Pertanian Perikanan Kabupaten Madiun jika dilihat baik dari komposisi jabatan maupun seluruh unsur personal pendukungnya adalah sejumlah 147 orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 93 orang PNS, 52 orang PPPK serta 15 orang tenaga tidak tetap . Pengelompokan pegawai pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun menurut golongannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Madiun Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	-
2	Golongan II	18
3	Golongan III	67
4	Golongan IV	9
5	PPPK Golongan VI	17
6	PPPK Golongan VII	4
7	PPPK Golongan IX	32
Jumlah		147

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	1
3	S1	93
4	D4	4
5	D3	10
6	D2	-
7	D1	-
8	SMA sederajat	38
9	SMP sederajat	-
10	SD sederajat	1
11	Tidak sekolah	-
Jumlah		147

1.3. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan perikanan, dan disamping itu juga melaksanakan tugas pembantuan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian dan Perikanan, serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dibantu oleh :

- Sekretaris
- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Pangan

- Kepala Bidang Perikanan
- Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM
- Kepala UPT Balai Benih/Bibit Pertanian
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dibantu oleh 2 (dua) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh 3 (tiga) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Bidang Perkebunan dibantu oleh 3 (Tiga) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh 2 (Dua) Kelompok Jabatan Fungsional
- Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM dibantu oleh 2 (Dua) Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap unsur di Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian dan perikanan. Untuk melaksanakan urusan Pertanian dan Perikanan Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan perikanan;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan perikanan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang pertanian dan perikanan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- d. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- h. pengelolaan aset dan milik negara/daerahbarang;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- j. pengelolaan kearsipan, perpustakaan dan ketatalaksanaan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. mengelola tertib administrasi umum dan kearsipan;
- c. mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- d. mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- e. menyelenggarakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset dan barang milik negara / daerah;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Sekretariat mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

2.2. Kelompok Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Keuangan;
- b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- c. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian

Keuangan, dan

- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

2.3. Kelompok sub-substansi Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Penyusunan Program dan Laporan;
- b. menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penyediaan dan pengawasan prasarana dan sarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan Pupuk, Pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- c. melaksanakan koordinasi pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- d. melaksanakan kebijakan pendayagunaan lahan, pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- e. melaksanakan pembinaan pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, kebutuhan pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;

- f. pemberian rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian (dalam rangka perlindungan LP2B);
- g. melaksanakan monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan pengelolaan air, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

3.1. Kelompok sub-substansi Pendayagunaan Lahan dan Air, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- d. melaksanakan identifikasi, optimalisasi, rehabilitasi serta konservasi lahan dan air;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi pemanfaatan lahan pertanian (dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan);
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendayagunaan lahan dan air, pendayagunaan, rehabilitasi dan konservasi lahan, pengelolaan air irigasi dan rehabilitasi jaringan tersier; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3.2. Kelompok Sub-Substansi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. menyiapkan bahan koordinasi pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman inventarisasi jenis dan merk pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. menyiapkan bahan penetapan kebutuhan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

3.3. Kelompok Sub-Substansi Pembiayaan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan melaksanakan fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- e. melaksanakan bimbingan, fasilitasi, supervisi, dan pelayanan investasi pertanian dan perikanan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi pembiayaan, serta analisa usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan; dan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

- 4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. penyusunan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pelaksanaan koordinasi teknis budidaya, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- e. penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- f. penyusunan kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pelaksanaan pembinaan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait pemantauan serangan dan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura.
- i. pemberian rekomendasi izin usaha tanaman pangan dan hortikultura;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

4.1. Kelompok Sub-substansi Tanaman Serealia, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Serealia;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman serealia;
- c. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis tanaman serealia;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan

- perlindungan tanaman serealia;
- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman serealia;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman serealia;
- g. melaksanakan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam terhadap tanaman serealia;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman serealia;
- i. melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya, perlindungan, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman serealia;
- j. melaksanakan promosi hasil tanaman serealia;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman serealia;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman serealia dan perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pemanfaatan alat mesin panen dan pascapanen tanaman serealia; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.2. Kelompok Sub-Substansi Tanaman aneka Kacang dan Aneka Umbi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Aneka Kacang dan Aneka Umbi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- g. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman aneka kacang dan aneka umbi;

- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil tanaman aneka kacang dan aneka umbi ;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman aneka kacang dan aneka umbi;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Tanaman Aneka Kacang dan Aneka Umbi; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

4.3. Kelompok Sub-Substansi Tanaman Hortikultura, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Hortikultura;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis tanaman hortikultura;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis tanaman hortikultura;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya dan perlindungan tanaman hortikultura;
- e. menyiapkan bahan penetapan rumusan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi tanaman hortikultura.
- f. menyiapkan bahan dan menyusun kebutuhan benih tanaman hortikultura;
- g. menyiapkan bahan paket teknologi budidaya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman hortikultura;
- h. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha tanaman hortikultura;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi serta bimbingan teknis teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi hasil tanaman hortikultura;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan serta penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Tanaman Hortikultura; dan

m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5. Bidang Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perkebunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan tanaman semusim, tanaman tahunan dan pengembangan sarana prasarana serta alat dan mesin;
- c. penyelenggaraan budidaya, peningkatan produksi dan pemberdayaan sarana prasarana serta alat dan mesin;
- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dampak perubahan iklim;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi, dan dukungan terhadap pengembangan usaha perkebunan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan tanaman, pemberdayaan sarana prasarana dan alat mesin, serta pasca panen;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bidang Perkebunan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

5.1. Kelompok Sub-Substansi Pengembangan Tanaman Semusim, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Perkebunan Semusim;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan semusim;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis bimbingan perlindungan tanaman perkebunan semusim;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya saprodi tanaman perkebunan semusim;
- e. melaksanakan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam terhadap tanaman perkebunan semusim;

- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan budidaya, penggunaan saprodi, peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan semusim;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis dengan pihak lain dalam penerapan teknologi pengembangan tanaman perkebunan semusim;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengembangan Tanaman Semusim; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.2. Kelompok Sub-Subtansi Pengembangan Tanaman Tahunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Tanaman Perkebunan Tahunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan bimbingan teknis budidaya tanaman perkebunan perkebunan tahunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis bimbingan perlindungan tanaman perkebunan tahunan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman perkebunan tahunan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan penanganan dampak perubahan iklim serta penanggulangan bencana alam terhadap tanaman perkebunan tahunan;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan budidaya, penggunaan saprodi, peningkatan mutu dan produksi tanaman perkebunan tahunan;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis dengan pihak lain dalam penerapan teknologi pengembangan tanaman perkebunan tahunan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan Tanaman Perkebunan Tahunan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

5.3. Kelompok Sub-Substansi Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan, perencanaan dan program kerja pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan kebijakan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- d. menyiapkan bahan kebutuhan bimbingan teknis pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- e. menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan inovasi pascapanen pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi harga pasar komoditas perkebunan;
- g. menyiapkan bahan pedoman teknis pascapanen pengolahan pengembangan usaha dan pemasaran komoditas perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan Kepala bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6. Bidang Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perikanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan perikanan budidaya, pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- c. pengembangan dan fasilitasi sarana prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- d. perumusan koordinasi, fasilitasi pemberdayaan kelompok-kelompok pembudidaya, nelayan, kelompok pengolah dan pemasar serta kelompok masyarakat pengawas;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Perikanan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Perikanan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

6.1. Kelompok Sub-substansi Perikanan Budidaya, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Perikanan Budidaya;
- b. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
- c. melaksanakan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya;
- d. melaksanakan bimbingan teknis sarana dan prasarana perikanan budidaya;

- e. melaksanakan fasilitasi standardisasi mutu sarana produksi perikanan budidaya;
- f. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian penggunaan obat ikan dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- g. mengembangkan kawasan perikanan budidaya yang terintegrasi (minapolitan);
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Perikanan Budidaya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6.2. Kelompok Sub-substansi Perikanan Tangkap, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Perikanan Tangkap;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap serta pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi, pengembangan, rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana penangkapan ikan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- e. melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengendalian ragam sumberdaya ikan;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada nelayan.
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
- h. melaksanaka perlindungan nelayan kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Perikanan Tangkap; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

6.3. Kelompok Sub-substansi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan;

- b. melaksanakan pengembangan teknologi penanganan dan pengolahan produk perikanan;
- c. melaksanakan pengembangan akses pasar produk perikanan;
- d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kelas kelompok pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan dan promosi pemasaran produk perikanan;
- f. menyiapkan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran produk perikanan;
- g. melaksanakan pengawasan mutu produk perikanan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

7. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi penyusunan kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk penyuluhan pertanian dan perikanan, serta pembinaan kelembagaan petani. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia;
- b. perumusan kebijakan teknis dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
- c. pelaksanaan kebijakan dan program kelembagaan dan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan dan bimbingan teknis kelembagaan dan sumberdaya manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya .

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

- 7.1. Kelompok Sub-substansi Kelembagaan dan Ketenagaan, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Kelembagaan dan Ketenagaan;

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan sumberdaya manusia bidang pertanian dan perikanan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan petani dan sumberdaya manusia bidang pertanian dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan kemitraan usaha pemberdayaan kelembagaan petani;
- f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

7.2. Kelompok Sub-substansi Metode dan Informasi, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian dan Perikanan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyiapan materi dan pengembangan teknologi penyuluhan pertanian dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan informasi dan media di bidang kelembagaan dan sumberdaya manusia sektor pertanian dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang kelembagaan dan sumberdaya manusia sektor pertanian;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Metode dan Informasi Penyuluhan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan bidang operasionalnya; dan
- b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

1.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis menggambarkan suatu kondisi/situasi/keadaan yang apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan isu tersebut, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas. Kebijakan dan strategi dalam membangun pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Untuk itu pada gambar di bawah ini dapat diuraikan faktor-faktor tersebut baik faktor kekuatan, kelemahan peluang maupun tantangan.

Tabel 3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan (SWOT)

INTERNAL	EKSTERNAL
KEKUATAN	PELUANG
<ul style="list-style-type: none"> a. Kewenangan Dinas dalam pengembangan Pertanian dan Perikanan b. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan c. Ketersediaan sumberdaya alam pertanian dan perikanan d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian dan perikanan e. Ketersediaan dukungan anggaran baik dari Daerah, Propinsi dan Pusat f. Ketersediaan fasilitas alat mesin pertanian dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sektor pertanian merupakan program prioritas Kabupaten Madiun b. Permintaan pasar akan produk - produk pertanian dan perikanan c. Pemanfaatan potensi SDA dan SDM dalam pengembangan agribisnis d. Komoditas spesifik di sentra produksi banyak e. Pengembangan Infrastruktur sarana - prasarana di pedesaan terus meningkat f. Peluang pengembangan agribisnis terbuka luas g. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian dan perikanan
KELEMAHAN	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi aparaturnya belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi c. Akses terhadap data dan informasi pembangunan pertanian dan perikanan belum optimal d. Peran dan fungsi UPTD belum optimal e. Sinergitas Tupoksi antar bidang, UPTD dan petugas laangan belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian c. Banyaknya kerusakan infrastruktur pertanian dan perikanan d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan/banjir e. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian dan perikanan) f. Menurunnya minat terhadap usaha tani dan perikanan g. Kemampuan permodalan petani terbatas h. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan terbatas i. Daya saing produk pertanian dan perikanan masih rendah j. Hama penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang k. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan eksternal di atas maka penyusunan strategi berdasarkan analisis SWOT dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. Penyusunan Strategi berdasarkan Analisis SWOT

ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kewenangan Dinas dalam pengembangan pertanian dan perikanan b. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan ketahanan pangan c. Ketersediaan sumberdaya alam pertanian dan perikanan d. Ketersediaan data dan informasi pengembangan usaha pertanian dan perikanan e. Ketersediaan dukungan anggaran baik dari Daerah, Propinsi dan Pusat f. Ketersediaan fasilitas alat mesin pertanian dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan b. Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi c. Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal d. Peran dan fungsi UPTD belum optimal e. Sinergitas Tupoksi antar bidang, UPTD dan petugas laangan belum optimal
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		
PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN KESEMPATAN (SO)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN DENGAN MEMANFAATKAN KESEMPATAN (WO)
<ul style="list-style-type: none"> a. Sektor pertanian merupakan program prioritas Kabupaten Madiun b. Permintaan pasar akan produk-produk pertanian dan perikanan c. Pemanfaatan potensi SDA, SDM dalam pengembangan agribisnis d. Komoditas spesifik di sentra produksi banyak e. Pengembangan Infrastruktur, sarana-prasarana di perdesaan terus meningkat f. Peluang pengembangan agribisnis terbuka luas g. Kesadaran petani dalam penggunaan sarana produksi pertanian dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program peningkatan produksi dan produktivitas pertanian melalui pengelolaan tanaman terpadu b. Merumuskan peraturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), Pedoman Umum, Juklak dan juknis untuk mendukung perkembangan agribisnis c. Pengembangan berbagai kegiatan untuk pemanfaatan peluang pasar d. Pengembangan agribisnis di sentra-sentra produksi e. Pengembangan permodalan petani melalui dana BLM, kemitraan usaha, KKPE, Bantuan sarana produksi dan perbaikan sarana pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan program dan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan b. Fasilitasi kepada petani melalui pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi petani (Kelompok Tani)

TANTANGAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN	STRATEGI MENGURANGI KELEMHAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Menurunnya kesuburan lahan pertanian c. Banyaknya kerusakan infrastruktur pertanian dan perikanan d. Meluasnya areal yang potensial terkena gangguan bencana alam kekeringan / banjir e. Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian dan perikanan) f. Menurunnya minat terhadap usaha tani dan perikanan g. Kemampuan permodalan petani terbatas h. Penerapan teknologi pertanian dan perikanan terbatas i. Daya saing produk pertanian dan perikanan masih rendah j. Hama penyakit tanaman (Organisme Pengganggu Tumbuhan) makin berkembang k. Tingkat kehilangan hasil masih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan penggunaan pupuk organik dan pupuk majemuk serta penerapan teknologi konservasi b. Bimbingan perbaikan jaringan irigasi di tingkat usaha tani c. Meningkatkan akses petani terhadap sumber pembiayaan d. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas alat mesin pertanian dan perikanan e. Reayasa alsintan tepat guna f. Pemanfaatan dan penggunaan alsintan pasca panen g. Sosialisasi teknologi bagi petani/keompok tani 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan kelompok tani/petugas lapangan dalam pengendalian OPT, magang, sekolah lapangan dan penyediaan benih unggul bersertifikat b. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan kegiatan c. Pembangunan Laboratorium Lapangan untuk pengkajian teknologi spesifik lokalita d. Pengembangan Kelembagaan e. Pengembangan pengolahan, mutu, pemasaran, dan keamanan pangan produk pertanian dan perikanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun, telah melaksanakan pelayanan baik kepada masyarakat pertanian maupun aparatur, antara lain:

- a) Penyusunan rencana tanam, kebutuhan pupuk dan benih yang sesuai dengan luas areal tanam.
- b) Peningkatan pemantauan ketersediaan distribusi harga saprodi dan hasil produksi pertanian dan perikanan serta melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati
- c) Pengefektifan pemantauan ketersediaan distribusi harga saprodi dan hasil produksi pertanian dan perikanan.

- d) Pengoptimalan tugas POPT (Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman)
- e) Pembukaan kotak pengaduan dan pelaporan temuan pestisida palsu
- f) Pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif ke petani/kelompok tani

Dalam melaksanakan urusan pertanian dan perikanan di Kabupaten Madiun masih ditemukan adanya berbagai permasalahan yang harus segera diatasi seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aparatur	Belum tertatanya suatu mekanisme antar lembaga yang saling mendukung dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan	-	Kompetensi aparatur dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai yang diharapkan		Sistem koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kurang lancar
			Pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mengacu pada Tupoksi		
			Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPTD belum terjalin baik		
Ekonomi	Terbatasnya sarana prasarana pendukung peningkatan intensifikasi usahatani dan transfer teknologi			Semakin tingginya alih fungsi lahan	Penyusutan lahan-lahan pertanian dan perikanan produktif sedangkan pencetakan sawah baru/peluasannya lahan pertanian dan tambak sangat terbatas sehingga berpotensi menurunnya produksi
				Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat mesin pertanian dan perikanan)	Tingginya fluktuasi harga hasil produksi pertanian dan perikanan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>Daya saing produk pertanian dan perikanan masih rendah</p> <p>Makin berkembangnya organisme pengganggu tanaman</p> <p>Tingkat Kehilangan hasil masih tinggi</p> <p>Adanya bencana alam dan kekeringan</p>	<p>Menurunnya produksi dan kualitas hasil pertanian dan perikanan di pasar rendah</p> <p>Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usahatani</p> <p>Belum optimalnya penanganan pasca panen komoditas pertanian dan perikanan</p> <p>Adanya Anomali Iklim (Dampak Perubahan Iklim)</p>
Sosial	Belum optimalnya kemampuan kelembagaan petani dan kualitas sumber daya manusia	-	Pasokan inovasi teknologi bagi petani dan aparatur masih kurang.	<p>Menurunnya minat terhadap usaha tani</p> <p>Kemampuan permodalan petani terbatas</p>	<p>Transfer inovasi teknologi dari aparatur kepada petani mengalami stagnasi</p> <p>Akses petani pada sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha taninya sangat lemah, meskipun pemerintah telah menyiapkan beberapa kredit yang diarahkan untuk petani dan aktivitas agribisnis</p>
Ekologis	Produk-produk rakitan inovasi teknologi spesifik lokasi yang masih kurang dan tidak ramah lingkungan			Kerusakan Infrastruktur pertanian dan perikanan	Degradasi daya dukung lahan dan sumberdaya air
				Menurunnya kesuburan tanah/lahan pertanian	Ketergantungan pada pupuk anorganik masih tinggi sedangkan ketersediaannya terbatas

1.5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional yang saat ini juga merupakan salah satu tumpuan pembangunan *ekonomi* Kabupaten Madiun. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian. Dalam rangka mendukung tercapainya Misi 3 RPJMD **“Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang berkelanjutan”** Dinas Pertanian dan Perikanan menuangkannya kedalam tujuan dinas yaitu **“Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian”**. Peningkatan PDRB Sektor Pertanian selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran dinas sebagai salah satu upaya dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun adalah **“Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan”** dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan. Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Perikanan telah melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan serta seluruh capaian target mulai dari tujuan, sasaran juga capaian rogram, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan komponen pendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas. Pelaporan disajikan melalui dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dievaluasi oleh Insektorat Kabupaten Madiun dan telah disampaikan hasilnya melalui Surat Inspektur Kabupaten Madiun no. 000.8.6.3/2188/402.060/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022 dengan ruang lingkup evaluasi:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran perencanaan kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pertanian dan Perikanan dinilai sudah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor 1776 tanggal 1 Agustus 2022 diantaranya dengan :

1. Menggali inovasi di bidang pertanian dan perikanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan melaksanakan pelatihan kepada petani milenial sebanyak 200 petani di tahun 2022
2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2021

Secara keseluruhan, Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan secara terperinci menunjukkan kategori BB atau sangat baik dengan nilai sebesar 77,45. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen

kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. Tabel Komponen Penilaian SAKIP

Komponen		Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30%	24,96%	27,86%
b.	Pengukuran Kinerja	30%	19,93%	19,93%
c.	Pelaporan Kinerja	15%	18,75%	14,20%
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,88%	15,47%
Jumlah		100%	74,09%	77,45%

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah berkinerja dan dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa rekomendasi dari tim evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyajikan formulasi hitung pada indikator kinerja pada Dokumen Indikator Kinerja Utama
- b. Menyajikan Analisis SWOT pada indikator kinerja pada Dokumen Indikator Kinerja Utama
- c. Menyajikan Definisi Operasional indikator kinerja pada Dokumen Indikator Kinerja Utama
- d. Melampirkan Keputusan kepala daerah tentang penetapan perubahan renstra pada dokumen renstra perubahan
- e. Melampirkan Keputusan kepala perangkat daerah tentang tim penyusun rencana kerja pada Dokumen rencana kerja tahun 2022 dan 2023
- f. Dokumen Indikator Kinerja Utama belum melampirkan Keputusan Kepala Daerah Perangkat Daerah tahun 2021 tentang perubahan Indikator Kinerja Utama

2. Pengukuran kinerja

- a. Melakukan upaya inovasi terkait pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi
- b. Menggunakan data prestasi capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- c. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar penetapan perjanjian kinerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Pelaporan Kinerja

Menjelaskan faktor atau penyebab tidak tercapainya persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dari tahun sebelumnya tahun 2021 capaian sebesar 1,95 menjadi 0,91 pada tahun 2022 (terjadi penurunan capaian persentase produksi pertanian dan perikanan)

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menetapkan permasalahan dan solusi di seluruh target capaian program kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen evaluasi internal

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai misi “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Mandiri Berbasis Agrobisnis, Agroindustri, dan Pariwisata yang Berkelanjutan” seperti yang tertuang pada misi 3 RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun berupaya untuk terus berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, selanjutnya disusun tujuan mengacu pada potensi peluang pemanfaatan sumber daya pertanian, masalah dan hambatan serta kecenderungan lingkungan strategis yang berpengaruh di Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan pertanian terus berupaya untuk mencapai tujuan **“Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian”** dengan target dan capaian sesuai Rencana Strategis selama periode 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 7. Tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan periode 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	2018	2019		2020		2021		2022		2023	
		Realisasi (Juta Rupiah)	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)
Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5.238.173,4	5.288.173,45	5.462.368,5	5.348.173,45	5.584.019,2	5.418.173,45	5.614.613,8	5.498.173,45	5.799.021,70	5.588.173,45	6.330.563,5

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Pertanian dan Perikanan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor kondisi lingkungan yang mempengaruhinya untuk kemudian dirumuskan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Perumusan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2018-2023 sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2018-2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,29	106,53	105,15	107,12	107,1	101,52

Pada tahun 2021 dilakukan perubahan terhadap sasaran OPD yaitu dari Meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator “nilai tukar petani” menjadi Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan dengan indikator “Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan” dengan target dan capaian sebagai berikut :

Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2021-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	0,48	1,95	0,82	0,91	1,03	1,033

Sektor pertanian dan perikanan merupakan sektor yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Sektor ini merupakan sektor yang paling tahan dari berbagai gejolak dan ancaman krisis. Di Madiun sendiri sektor pertanian merupakan penggerak pembangunan baik dari segi penyedia bahan baku, kesempatan kerja, bahan pangan, serta daya beli bagi produk sektor lain.

Mengingat pentingnya kedua sektor ini, Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pertanian dan Perikanan terus berupaya untuk mendorong petani untuk terus meningkatkan produksi pertanian dan perikanan melalui berbagai program yang ditujukan untuk berbagai komoditas yang diampu. Adapun cakupan komoditasnya adalah sebagai berikut :

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija, porang
- Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kakao, tebu, cengkeh kopi, dll
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

C. Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Cara Mencapai Tujuan

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN					
	KEBIJAKAN		PROGRAM	SUB KEGIATAN		
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui : - Peningkatan sarana prasarana pertanian - Intensifikasi dan Diversifikasi pertanian - Pengendalian bencana pertanian	1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
				2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
		2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	
				2	Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani (silpa DBHCHT)	
				3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				4	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	
				5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	
		3	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		- Peningkatan SDM petani dan aparatur	1	Program Penyuluhan Pertanian	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
					2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					
- Peningkatan sarana prasarana budidaya perikanan	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
		2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN				
	KEBIJAKAN		PROGRAM	SUB KEGIATAN	
				2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	- Pendukung kinerja SKPD	1	Program Pelayanan Kesekretariatan	1	Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana
				2	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran

2.2. Rencana Kerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja 2023 pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, mengacu pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan. Tujuan dan Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan target dan capaian sebagai berikut :

Tabel 11. Target dan Realisasi Tujuan Tahun 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	2023		
		Target (Juta Rupiah)	Realisasi (Juta Rupiah)	Capaian (%)
Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5.588.173,45	6.330.563.5	113,29

Tabel 12. Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2023

No	KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Sasaran OPD					
	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	Persen (%)	1,03	1,033	110,29

Tujuan dan sasaran selanjutnya diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang secara teknis dilaksanakan untuk tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan. Adapun capaian program, kegiatan serta sub kegiatan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rencana Kinerja Tahun 2023

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	75.000.000	
	* Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		0,1%
1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000	
	* Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		509.425 kg
1.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	75.000.000	
	* Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia		1 unit
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	130.000.000	
	* Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		1,00%
2.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	130.000.000	
	* Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		3.650.922 kg
2.1.1	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000	
	* Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota		1 unit
3.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125.000.000	
	* Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan		2%
3.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000	
	* Jumlah UMKM pengolahan ikan		15 unit usaha
3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	
	* Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,45 ton
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.027.022.818	
	* Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A
	* Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		95
4.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET
	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu		100%
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000	
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3 laporan
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.399.638.175	
	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.399.638.175	
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		160 orang
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.228.240	
	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%
4.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		4 paket
4.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.021.000	
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 paket
4.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.228.240	
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		4 paket
4.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.535.600	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		4 paket
4.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4 paket

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET
4.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.379.000	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12 dokumen
4.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 laporan
	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	1.064.400	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		66 dokumen
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.771.760	
	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%
4.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 laporan
4.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.000.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan
4.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.271.760	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.000.000	
	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara		100%
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.300.000	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 unit
4.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)	32.000.000	

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET
	Jumlah Peralatan dan Masin Lainnya yang Dipelihara		45 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	8.700.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit
4.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3 unit
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.959.128.723	
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian		8,14%
5.1	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	1.959.128.723	
	<i>Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian</i>		18 kel
5.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.859.128.723	
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan		3 laporan
5.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100.000.000	
	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		2 laporan
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.194.468.507	
	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik		5%
6.1	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	1.886.842.600	
	Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan :		
	* pupuk		41.509 kg
	* bibit		1.702.216 batang
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1.886.842.600	

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya		12 dokumen
6.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.307.625.907	
	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik		2.016 unit
	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani	209.730.973	
	Jumlah Jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dan dipelihara		16 unit
6.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.089.970	
	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara		15 unit
	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	350.000.000	
	jumlah Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		3 unit
6.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	740.805.000	
	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		5 unit
7.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000	
	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian		99,06%
7.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	50.000.000	
	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian		17,11%
7.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000	
	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan		10 ha
8.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.058.817.400	
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani		8%

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET
8.1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.058.817.400	
	Jumlah peningkatan kelas kelompok tani		205 kelompok
8.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000	
	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		15 unit
8.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.255.000.000	
	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		6 unit
8.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	172.500.000	
	Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian		15 unit
	JUMLAH	22.619.437.448	

Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang diterjemahkan ke dalam sasaran strategis selanjutnya diperjanjikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati melalui Perjanjian Kinerja.

Tabel 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	1,03	%

Tabel 15. Program dan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 75.000.000,00	PBH Rokok
2	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 130.000.000,00	PBH Rokok, DBH
3	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Rp 125.000.000,00	DBH SDA, DAU, Lain-lain pendapatan yang sah
4	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.027.022.818,00	PBH SDA, DBHCHT, DAK NON FISIK

No	Program	Anggaran	Keterangan
5	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.959.128.723,00	PBH ROKOK, DBH, DBHCHT, DAK FISIK
6	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 3.194.468.507,00	APBD, DBHCHT
7	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 50.000.000,00	PBH Rokok
8	Penyuluhan Pertanian	Rp 2.058.817.400,00	PBH Rokok, DBHCHT, DBH SDA, DAK non fisik
	Jumlah	Rp 22.619.437.448,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Penghitungan persentase pencapaian kinerja tersebut adalah :

Tabel 16. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100	Tidak Tercapai Target	

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai Tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Pengukuran Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 17. Target Tujuan Dinas Pertanian dan Perikanan

Tujuan	Indikator Tujuan	Target (juta rupiah)	Capaian (juta rupiah)	Persentase Capaian (%)
		2023	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkat-nya PDRB Sektor Pertanian	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	5.588.173,45	6.330.563.5	113,29

Sumber data : BPS Kabupaten Madiun

PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar Rp 531.541.800.000,- dan mencapai target 113,29% dimana PDRB tertinggi disumbang dari DPRB Tanaman Pangan.

Dalam rangka mencapai sasaran untuk meningkatkan Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan, sesuai arah pada misi 3 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Mandiri Berbasis Agribisnis, Agroindustri dan Pariwisata Yang Berkelanjutan”

dengan sasaran meningkatnya perekonomian masyarakat. Salah satu strategi pembangunan adalah terwujudnya percepatan peningkatan ekonomi melalui meningkatkan produksi tanaman pangan, meningkatkan produksi tanaman perkebunan, termasuk peningkatan produktivitas, pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi. Program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, pengembangan pertanian terpadu, pengembangan usaha perkebunan rakyat serta pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana pertanian. Untuk melihat keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut, tersedianya data yang lengkap dan aktual di sektor pertanian, akan lebih memudahkan pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam renstra adalah Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan.

Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2023 sesuai dengan masing-masing sasaran dan indikator kinerja seperti tercantum di bawah ini :

Tabel 18. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	% Realisasi	Kondisi Awal	Target Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan	0,91	1,03	1.033	100,29	4,92	1,03

Sasaran pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun pada periode awal yaitu tahun 2018-2020 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Petani” dengan indicator “Nilai Tukar Petani” yang kemudian dirubah menjadi **“Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan”** dengan indikator “Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan” untuk tahun 2021-2023 . Persentasi Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan didapatkan dengan formulasi hitungan selisih total produksi pertanian dan perikanan Tahun n dikurangi total produksi pertanian dan perikanan Tahun n-1 dibandingkan produksi pertanian dan perikanan Tahun n-1 dikalikan 100%.

$$X = \frac{[P_n - (P_{n-1})]}{(P_{n-1})} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan

P_n : produksi pertanian dan perikanan tahun n

P_{n-1} : produksi pertanian dan perikanan tahun sebelumnya

Realisasi Indikator sasaran Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2023 yaitu 1,033% dari target 1,03% dengan persentase capaian 100,29%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan mengalami peningkatan sebesar 13,51%. Hal ini dipengaruhi oleh terjadinya peningkatan produksi pada beberapa komoditas pertanian akibat adanya berbagai pengaruh di lapangan utamanya padi. Adapun upaya untuk mencapai target indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2023, didukung oleh kinerja capaian bidang melalui program dan kegiatan dari masing-masing bidang.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana baik setingkat Bidang maupun Seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan kepada masing-masing bidang pada Dinas Pertanian dan Perikanan dengan capaian sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra														
		2019			2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Sebelum Perubahan															
	Nilai Tukar Petani	105,15	107,12	101,87	107,1	101,52	94,79									
	Setelah Perubahan															
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan							0,48	1,95	406,11	0,82	0,82	0,91	1,03	1.033	100,29
A	URUSAN PERTANIAN															
1	Produksi Tanaman Pangan (ton)							692.345,30	714.925,31	103,26		711.682,64			700.582,41	
	Produksi Padi	544.346,52	564.295,07	103,66	545.435,21	617.483,67	113,21	577.317,30	615.238,27	106,57	578.804,10	594.458,75	102,70	580.041,50	596.479,21	102,83
	Produksi Jagung	56.844,08	89.322,51	157,14	56.957,77	66.795,95	117,27	63.108,50	47.976,72	76,02	63.277,20	64.560,00	102,03	63.342,30	53.001,58	83,67
	Produksi Kedelai	2.587,16	1.483	57,32	2.592,34	1.638,61	63,21	1.644,50	1.282,32	77,98	1.663,20	1.316,19	79,14	1.703,75	865,98	50,83
	Produksi Porang				9.056,63	10.325,00	114,00	50.275,00	50.428,00	100,30	51.051,00	51.347,70	100,58	51.735,00	50.235,65	97,10
2	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)							52.545,93	44.135,33	83,99		53.722,48			73.134,73	
	Produksi mangga	54.508	46.587	85,47	55.598	37.682	67,78	43.710,34	34.310,89	78,50	46.444,50	45.178,48	97,27	50.980,00	60.705,47	119,08
	Produksi durian	3.834	3.898	101,66	3.911	5.003	127,93	5.580,00	5.786,16	103,69	5.600,00	5.886,50	105,12	5.650,00	9.809,54	173,62
	Produksi jambu air	276	303	109,62	282	217	76,96	287,59	338,88	117,83	293,34	342,90	116,90	299,00	385,25	128,85
	Produksi cabe	635	387	60,90	648	169	26,07	196,00	184,20	93,98	205,80	293,50	142,61	220,50	358,17	162,44
	Produksi bawang merah	871	504	57,86	889	2.688	302,50	2.772,00	3.515,20	126,81	2.800,00	2.364,00	84,43	3.020,00	1.876,30	62,13
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan							16.884,33	13.893,71	82,29		14.250,99			14.323,00	
	Produksi Tebu (Ton)	19.609,50	14.213,44	72,48	20.001,69	15.011,07	75,05	15.500,72	12.537,11	80,88	16.500,00	12.883,14	78,08	17.500,00	12.883,14	73,62
	Produksi Kakao (Biji Kering) (Ton)	865,88	860,1	99,33	883,20	881,24	99,78	900,80	891,98	99,02	918,88	892,05	97,08	937,25	892,56	95,23
	Produksi Cengkeh (Bunga Kering) (Ton)	367,94	356,08	96,78	375,30	178,02	47,43	382,81	343,82	89,81	390,47	343,80	88,05	398,28	343,10	86,15
	Produksi tembakau (Ton)	225,19	247,25	109,80	229,69	75,05	32,67	100,00	120,80	120,80	105,00	132,00	125,71	110,00	204,20	185,64

No	Indikator Kinerja	Target Renstra														
		2019			2020			2021			2022			2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
B	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN															
1	Jumlah produksi perikanan (ton)	3.909,57	4.048,53	103,55	4.165,22	4.069,60	97,70	4.087,40	4.120,77	100,82	4.123,70	4.158,50	100,84	4.160,42	4.214,75	

1. Komoditas Tanaman Pangan

- **Produksi Padi**

Padi merupakan penyumbang peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan terbesar dimana produksi padi pada Tahun 2023 sejumlah 596.479,21 ton atau tercapai 102,83% dari target 580.041,50 ton yang dihasilkan dari luas panen 86.664 ha dengan produktivitas 6,88 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produksi padi pada tahun 2022 sejumlah 594.458,75 ton dapat dilihat bahwa produksi pada tahun ini naik sebanyak 2.020,47 ton. Capaian tersebut tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas padi antara lain penyediaan sarana produksi benih unggul bersertifikat, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu dan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana infrastruktur pertanian.

Tahun 2020-2022 komoditas padi mengalami penurunan produksi rata-rata sebesar 11.512 ton setiap tahunnya, penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dimana produksi padi mengalami penurunan sebanyak 20.779 ton yang dipanen dari total 87.925 ha, hal ini disebabkan karena adanya gagal panen di area seluas 268 ha akibat kondisi asem-aseman yaitu buruknya kondisi drainase sawah dan penggunaan pupuk Urea berlebihan sehingga menyebabkan padi tidak bisa berproduksi dengan maksimal.

- **Produksi Jagung**

Produksi jagung pada tahun 2023 sejumlah 53.001,58 ton dengan capaian 83,67% dari target 63.342,30 ton yang dihasilkan dari luas panen 7.926 ha dengan produktivitas 6,69 ton/ha. Jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2022 sejumlah 64.560,00 ton, produksi pada tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 11.558,43 ton begitu juga dengan luas panen turun sejumlah 2.035 ha. Penurunan produksi jagung dipicu oleh turunnya minat petani untuk menanam jagung. Hal ini terjadi karena petani yang biasanya menanam jagung di lahan-lahan perhutani tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi.

Tahun 2019-2023 komoditas jagung cenderung mengalami penurunan produksi sebesar 9.080 ton setiap tahunnya, penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana produksi kedelai mengalami penurunan sebanyak 22.526 ton yang dipanen dari total 9.686 ha, hal ini disebabkan karena ada alih komoditas yang biasanya petani di tepian hutan menanam jagung beralih ke komoditas porang

- **Produksi Kedelai**

Capaian produksi kedelai pada tahun 2023 sebanyak 865,58 ton atau 50,83% dari target 1.703,75 ton dari luas panen 417 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 1.316,19 ton produksi kedelai masih mengalami penurunan sebanyak 450,22 ton dari luas panen 642 ha. Tidak tercapainya target produksi kedelai pada tahun 2023 disebabkan oleh banyaknya petani yang lebih tertarik untuk menanam kacang hijau, selain perawatannya yang lebih mudah harga pasarnya pun lebih menjanjikan/tinggi pula dibandingkan dengan kedelai.

Tahun 2020-2023 kedelai cenderung mengalami penurunan produksi sebesar 210 ton setiap tahunnya, penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dimana produksi kedelai mengalami penurunan sebanyak 356 ton yang dipanen dari total 585 ha. Berkurangnya produksi kedelai ini disebabkan karena petani beralih ke komoditas lain yang harga pasarnya lebih menjanjikan yaitu kacang hijau.

- **Produksi Porang**

Realisasi produksi porang pada tahun 2023 sebanyak 50.236,00 ton atau 97,10% dari target 51.735 ton yang dihasilkan dari luas panen 5.195 ha dengan produktivitas 9,67 ton/ha. Jika dibandingkan tahun 2022 (51.347,7 ton) dengan luas panen 5.310, produksi porang pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 1.112,05 ton. Jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya produksi porang turun secara signifikan, hal ini disebabkan banyak petani yang tidak lagi menanam porang serta melakukan tunda panen akibat dari tidak stabilnya harga porang di lapangan sehingga mempengaruhi produksi porang secara keseluruhan.

Tahun 2019-2022 produksi porang cenderung mengalami peningkatan produksi sebesar 14.071 ton setiap tahunnya, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dimana produksi porang mengalami kenaikan sebanyak 40.102 ton yang dipanen dari total 5.080 ha. Meningkatnya produksi porang tidak lepas karena semakin populernya tanaman porang mengingat permintaan pasar yang tinggi sehingga membuat banyak orang mengembangkan tanaman porang.

2. Komoditas Tanaman Hortikultura

- **Produksi Mangga**

Produksi mangga pada tahun 2023 sebanyak 60.705,47 ton atau 119,08% dari target 50.980,00 ton yang dihasilkan dari 410.872 pohon. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 (45.178,48 ton) produksi mangga pada tahun 2023 naik sebanyak 15.527 ton. Jika dilihat dari jumlah pohon siap panenpun, pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebanyak 18.914 pohon. Naiknya produksi mangga dipicu oleh

perkembangan tanaman mangga sudah mulai produktif dari beberapa tanaman tahun lalu, selain itu iklim yang cenderung bersahabat juga menjadikan bunga mangga bisa berkembang dengan baik sampai menjadi buah dan siap panen.

Tahun 2019-2021 produksi mangga cenderung mengalami penurunan produksi sebesar 6.138 ton setiap tahunnya. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana produksi mangga mengalami penurunan sebanyak 8.904 ton. Terjadinya penurunan produksi disebabkan oleh tingginya curah hujan di awal musim mangga yang menyebabkan banyaknya mangga yang rontok akibat hujan deras. Sedangkan pada tahun 2022-2023 produksi mangga mengalami kenaikan sebesar 13.197 ton setiap tahunnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023 dimana produksi mangga mengalami kenaikan sebanyak 15.527 ton yang dipanen dari total 410.872 pohon. Naiknya produksi mangga ini karena tanaman mangga sudah mulai produktif dari beberapa tanaman tahun lalu, selain itu iklim yang cenderung agak panas menjadikan mangga bisa berkembang dengan baik..

- **Produksi Durian**

Realisasi produksi Durian tahun 2023 sebesar 9.809,54 ton atau 172,62% dari target 5.650 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 (5.886,50 ton) produksi durian tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 3.923,40 ton. Kenaikan produksi durian ini disebabkan pada tahun 2023 durian mampu berproduksi secara maksimal, dimana di wilayah-wilayah perkembangan durian yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare dan Gemarang menghasilkan durian dengan kualitas yang baik sehingga mempengaruhi kenaikan produksi di tahun ini.

Selama periode 2019-2023 produksi durian cenderung mengalami kenaikan sebesar 2.723 ton setiap tahunnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023 dimana produksi durian mengalami kenaikan sebanyak 5.911 ton yang dipanen dari total 88.345 pohon. Kenaikan produksi durian disebabkan oleh penambahan luas panen setiap tahunnya ini karena peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang selalu memberikan bantuan bibit dalam rangka upaya meningkatkan produksi durian yang ada di Kabupaten Madiun.

- **Produksi Jambu Air**

Realisasi produksi jambu air pada tahun 2023 sebanyak 385,25 ton atau 128,85% dari target 299,00 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 (342,90 ton) produksi jambu mengalami kenaikan sebesar 42,35 ton. Peningkatan produksi jambu tidak signifikan mengingat terbatasnya budidaya jambu di Kabupaten Madiun yaitu hanya di wilayah Kecamatan Kebonsari dan Kecamatan Geger. Tanaman jambu memang tidak begitu

diminati oleh petani mengingat komoditas ini sangat rawan terserang gangguan hama dan pangsa pasarnya sangat terbatas sehingga petani lebih memilih menanam jambu hanya untuk kebutuhan konsumsi sendiri.

Selama periode 2021-2023 produksi jambu air cenderung mengalami kenaikan sebesar 56 ton setiap tahunnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2021 dimana produksi jambu air mengalami kenaikan sebanyak 121 ton yang dipanen dari total 9.844 pohon. Peningkatnya produksi Jambu air ini disebabkan karena bertambahnya jumlah tanaman yang menghasilkan di sentra Jambu air yaitu Kecamatan Kebinsari dan Geger.

- **Produksi Cabai**

Realisasi produksi cabai pada tahun 2023 sebanyak 358,17 ton atau 162,44% dari target 220,50 ton yang dihasilkan dari luas panen 54 ha dengan produktivitas 6,63 ton/ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 (293,50 ton) produksi cabai mengalami peningkatan 64,66 ton. Naiknya produksi cabai antara lain disebabkan karena bertambahnya luas panen dari 45 ha di tahun 2022 menjadi 54 ha di tahun 2023. Bertambahnya luas panen ini tidak lepas dari adanya bantuan bibit cabai yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk lahan seluas 10 ha di Kecamatan Kare. Selain itu naiknya harga cabai menarik minat petani untuk menambah luas tanam cabai sehingga mempengaruhi kenaikan produksi.

Selama periode 2021-2023 produksi cabai cenderung mengalami kenaikan sebesar 63 ton setiap tahunnya. Kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022 dimana produksi cabai mengalami kenaikan sebanyak 109,3 ton yang dipanen dari total 45 ha. Peningkatnya produksi cabai ini tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan bibit dan sarana produksi dalam rangka upaya peningkatan produksi cabai yang ada di Kabupaten Madiun. Selain program pemberian bantuan bibit dan sarana produksi juga ada program Pemanfaatan Lahan Pekarangan (P2L) kegiatan ini dilaksanakan dalam mendukung program pemerintah untuk penanganan rawan pangan, prioritasnya adalah untuk mencukupi kebutuhan gizi dalam mencegah stunting dan dengan adanya kegiatan P2L ini juga dapat meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam serta bergizi seimbang.

- **Produksi Bawang Merah**

Realisasi produksi bawang merah tahun 2023 sebesar 1876,30 ton atau 62,13% dari target 3.020 ton yang dihasilkan dari luas panen 205 ha dengan produktivitas 9,15 toh/ha. Dibandingkan tahun 2022 (2.364,00 ton) produksi bawang merah turun 487,7

ton. Turunnya produksi bawang merah diakibatkan oleh turunnya luas panen bawang merah dari 233 ha di tahun 2022 menjadi 205 ha di tahun 2023 atau turun seluas 28 ha. Turunnya luas panen bawang merah ini disebabkan oleh cuaca yang tidak mendukung untuk tanam bawang merah, faktor mahal nya harga benih lokal juga mempengaruhi petani untuk tidak menanam bawang merah.

Produksi bawang merah tahun 2019-2021 terjadi kenaikan rata-rata sejumlah 2.340 ton/tahun, kenaikan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana produksi bawang merah mengalami kenaikan sebanyak 2.000,4 ton yang dipanen dari total 232 ha. Naiknya produksi bawang merah ini disebabkan oleh meningkatnya minat petani dalam menanam bawang merah karena naiknya harga bawang merah selama tahun tersebut.

3. Komoditas Tanaman Perkebunan

- Produksi tebu (gula kristal)

Realisasi produksi tebu (gula kristal) pada tahun 2023 sebesar 12.883,14 ton atau tercapai 73,62% dari target 17.500 ton. Angka yang sama dicapai pada tahun 2022 begitu juga dengan luas panennya. Tidak tercapainya produksi tebu sebagai dampak adanya cuaca ekstrim elnino yang menyebabkan tanaman kekurangan air sehingga kualitasnya menurun. Selama periode 2019-2023 produksi tebu sangat fluktuatif. Pada tahun 2020 produksi tebu mengalami kenaikan sebesar 797,63 ton lalu turun secara signifikan pada tahun 2021 sebesar 2.473,96 ton. Kemudian naik secara perlahan pada tahun 2022 sebesar 346,03 ton dan mengalami stagnan produksi pada tahun 2023. Turunnya produksi pada tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh turunnya luas lahan tanaman tebu akibat alih komoditas ke padi, selain karena adanya El nino yang menyebabkan rendemen tebu berkurang.

- Produksi Kakao

Realisasi produksi biji kering Kakao pada tahun 2023 sebesar 892,56 ton atau tercapai 95,23% dari target 937,25 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 produksi kakao mengalami peningkatan sebesar 0,51 ton yang dihasilkan dari luas lahan 2.067,25 ha. Selama kurun waktu 2019-2023 produksi kakao relatif naik perlahan pada kisaran 20 ton per tahun dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Tidak tercapainya target produksi kakao pada tahun 2023 tidak lepas dari turunnya lahan kakao yang menghasilkan seluas 8,08 ha yang disebabkan oleh terjadi iklim ekstrim elnino yang menyebabkan banyak tanaman kakao yang mati.

- **Produksi Cengkeh**

Realisasi produksi cengkeh tahun 2023 sebesar 343,10 ton atau tercapai 86,15% dari target 398,28 ton. Produksi ini dihasilkan dari tanaman cengkeh yang menghasilkan seluas 1.053 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 produksi cengkeh pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,7 ton. Tidak tercapainya target produksi cengkeh serta turunnya produksi cengkeh pada tahun 2023 disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tanaman berupa Bakteri Pembuluh Kayu Cengkeh (BPKC) dan dampak dari cuaca ekstrim elnino yang menyebabkan pembuahan cengkeh menurun. Sebagaimana yang terjadi pada tebu, produksi cengkeh juga mengalami fluktuasi. Selama kurun waktu 2019 produksi cengkeh mengalami penurunan secara signifikan sebesar 178,06 ton pada tahun 2020 kemudian naik pada tahun 2021 dengan total produksi 343,81 ton dan naik turun perlahan sampai tahun 2023. Fluktuasi produksi cengkeh disebabkan oleh adanya anomali iklim yang menyebabkan cengkeh tidak berbunga dengan maksimal

- **Produksi Tembakau**

Realisasi produksi tembakau tahun 2023 sebesar 204,20 ton atau tercapai 185,64% dari target 110 ton. Produksi ini dihasilkan dari panen tembakau seluas 163,70 ha. Dibandingkan dengan tahun 2022 produksi tembakau pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 72,2 ton. Peningkatan produksi tembakau tahun 2023 tidak lepas dari adanya alokasi DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) dalam meningkatkan sarana dan prasarana produksi tembakau sehingga produksinya meningkat. Meskipun produksi tembakau sempat terpuruk pada tahun 2020 dengan produksi 75,05ton, namun keseriusan Dinas Pertanian dan Perikanan dalam mendukung pertanian tembakau membuat komoditas ini semakin banyak peminat, ini juga terlihat dari antusiasme petani dalam menanam tembakau yang secara luas meningkat dari tahun ke tahun. Kedepannya budidaya tembakau akan terus didorong agar peningkatannya tidak hanya dari segi produksinya saja tapi juga secara kualitas. Dengan meningkatnya kualitas tembakau diharapkan bisa menjangkau pangsa pasar yang lebih tinggi untuk meningkatkan nilai jual yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

4. **Produksi Perikanan**

Realisasi produksi perikanan pada tahun 2023 sebesar 4.214,75 ton atau 101,31% dari target 4.160,42 ton. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 56,25 ton. Selama Periode 2019-2023 produksi perikanan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan produksi perikanan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah :

- Adanya peningkatan luas kolam budidaya, peningkatan jumlah kelompok budidaya perikanan dan peningkatan jumlah pembudidaya ikan (Rumah Tangga Perikanan (RTP))

- Adanya dukungan dan pendampingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk bimtek terkait perikanan dan hibah sarana dan prasarana perikanan
- Adanya sinergi dan kolaborasi antara petugas teknis perikanan dan penyuluh perikanan dalam mendampingi pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan sehingga terjadi peningkatan SDM petani ikan dalam mengelola usaha perikanan.

B. ANALISIS PENGGUNAAN ANGGARAN

Pada tahun 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun yang dikelola oleh Dinas Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah tahun 2023

No	Belanja	Besar Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1.	Belanja Langsung gaji	13.958.522.818	12.623.411.628	1.335.111.190	90,44
2.	Belanja Langsung Non Gaji	8.660.914.630	8.292.228.245	368.686.385	95,74
Jumlah		22.619.437.448	20.915.639.873	1.703.797.575	92,57

3.3 Efisiensi

Analisis Efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Hasil analisis efisiensi Dinas Pertanian dan Perikanan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 21. Tabel Efisiensi Anggaran

No.	SASARAN			INDIKATOR		
	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian dan Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan		
	Anggaran	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	22.619.437.448	20.915.639.873	92,47%	1,03	1,033	100,29%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa anggaran pada tahun 2023 terserap sebanyak 92,47% dengan capaian kinerja sebesar 100,29%. Dari serapan anggaran dan capaian kinerja tersebut bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 efisien mengingat dengan anggaran yang disediakan, indikator sasaran bisa tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 22. Tabel Efisiensi Anggaran

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PAK	TOTAL REALISASI	SISA PAGU	%
1	2	3	4	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		330.000.000	318.671.835	11.328.165	96,57
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		75.000.000	72.322.000	2.678.000	96,43
	<i>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		75.000.000	72.322.000	2.678.000	96,43
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	PBH Rokok	75.000.000	72.322.000	2.678.000	96,43
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		130.000.000	125.776.500	4.223.500	96,75
	<i>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</i>		130.000.000	125.776.500	4.223.500	96,75
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBH Rokok + DBH	130.000.000	-		0,00
	Pengadaan Isi Tabung gas, plastik packing ikan, pakan benih ikan, pakan ikan	PBH Rokok	50.000.000	45.776.500	4.223.500	91,55
	Aspirasi Dewan (Hibah Uang)	DBH	80.000.000	80.000.000	-	100,00
III	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		125.000.000	120.573.335	4.426.665	96,46
	<i>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		125.000.000	120.573.335	4.426.665	96,46
	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PBH Rokok	125.000.000	120.573.335	4.426.665	96,46
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		22.289.437.448	20.596.968.038	1.692.469.410	92,41
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		15.027.022.818	13.664.647.963	1.362.374.855	90,93
	A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.500.000	6.079.200	1.420.800	81,06
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DBH SDA	7.500.000	6.079.200	1.420.800	81,06
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.958.522.818	12.623.411.628	1.335.111.190	90,44
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	13.399.638.175	12.469.144.339	930.493.836	93,06

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PAK	TOTAL REALISASI	SISA PAGU	%
1	2	3	4	5	6	7
		DAU MANDATORY	558.884.643	154.267.289	404.617.354	27,60
	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah		414.228.240	404.423.012	9.805.228	97,63
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	5.000.000	4.998.000	2.000	99,96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DBH SDA	75.021.000	71.408.000	3.613.000	95,18
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pendapatan lain-lain yang sah	17.228.240	17.218.000	10.240	99,94
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DBH SDA	135.535.600	135.508.600	27.000	99,98
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DBH SDA	8.000.000	7.934.800	65.200	99,19
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DBH SDA	2.379.000	2.350.000	29.000	98,78
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	170.000.000	163.955.612	6.044.388	96,44
	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	DBH SDA	1.064.400	1.050.000	14.400	98,65
	D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		470.771.760	455.426.198	15.345.562	96,74
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DBH SDA	4.500.000	4.482.500	17.500	99,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DBH SDA	122.000.000	120.632.949	1.367.051	98,88
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pendapatan lain-lain yang sah	344.271.760	330.310.749	13.961.011	95,94
	E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		176.000.000	175.307.925	692.075	99,61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DBH SDA	125.300.000	124.959.807	340.193	99,73
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)	Pendapatan lain-lain yang sah	32.000.000	31.879.660	120.340	99,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DBH SDA	8.700.000	8.548.154	151.846	98,25

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PAK	TOTAL REALISASI	SISA PAGU	%
1	2	3	4	5	6	7
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DBH SDA	10.000.000	9.920.304	79.696	99,20
V	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1.959.128.723	1.876.516.210	82.612.513	95,78
	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>		1.959.128.723	1.876.516.210	82.612.513	95,78
	A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DBH SDA + DBHCHT + DAK NF	1.859.128.723	1.781.858.210	77.270.513	95,84
	* Pengembangan Kebun Bibit	DBH SDA	518.311.424	505.873.400	12.438.024	97,60
	* Kegiatan TMDD	DBH SDA	50.000.000	47.420.600	2.579.400	94,84
	* Gerakan Tanam Cabai	DBH SDA	143.121.076	141.445.000	1.676.076	98,83
	* Pengembangan AKABI	DBH SDA	58.567.500	50.912.250	7.655.250	86,93
	* Bantuan Sarana Produksi Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	DBHCHT	959.128.723	906.733.460	52.395.263	94,54
	DBHCHT	DBHCHT	959.128.723	906.733.460	52.395.263	94,54
	* P2L	DAK NF	130.000.000	129.473.500	526.500	99,60
	B. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	PBH Rokok	100.000.000	94.658.000	5.342.000	94,66
	Pasca panen Tembakau	DBHCHT	-	-	-	
	Pasca panen Kakao	PBH Rokok	100.000.000	94.658.000	5.342.000	
VI	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		3.194.468.507	3.024.746.289	169.722.218	94,69
	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>		1.886.842.600	1.756.342.189	130.500.411	93,08
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-	-	-	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	DBHCHT	1.886.842.600	1.756.342.189	130.500.411	93,08
	<i>Pembangunan Prasarana Pertanian</i>		1.307.625.907	1.268.404.100	39.221.807	97,00

NO.	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PAK	TOTAL REALISASI	SISA PAGU	%
1	2	3	4	5	6	7
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani (silpa DBHCHT)	DBHCHT	209.730.937	209.107.300	623.637	99,70
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	DAK Fisik	7.089.970	-	7.089.970	0,00
	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	PBH Rokok	350.000.000	343.541.300	6.458.700	98,15
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	DBH	740.805.000	715.755.500	25.049.500	96,62
	Hibah Uang (sumur sible 1, jalan usaha tani 2, rjit 1, hand traktor 2)		740.805.000	715.755.500	25.049.500	96,62
	Hibah Uang (Hand Traktor, mesin potong rumput, sumur sible 3 unit, mesin giling padi listrik) PAK			-	-	0,00
VII	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		50.000.000	49.596.700	403.300	99,19
	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>		<i>50.000.000</i>	49.596.700	403.300	99,19
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	PBH Rokok	50.000.000	49.596.700	403.300	99,19
VIII	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		2.058.817.400	1.981.460.876	77.356.524	96,24
	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		<i>2.058.817.400</i>	<i>1.981.460.876</i>	<i>77.356.524</i>	<i>96,24</i>
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	PBH Rokok	250.000.000	238.786.987	11.213.013	95,51
	Study Tiru	DBHCHT	381.317.400	359.812.489	21.504.911	94,36
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	DBHCHT + DBH SDA	1.255.000.000	1.210.991.400	44.008.600	96,49
	SL Tembakau	DBHCHT	1.225.000.000	1.181.402.400	43.597.600	96,44
	Pameran	DBH SDA	30.000.000	29.589.000	411.000	98,63
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	DAK NON FISIK	172.500.000	171.870.000	630.000	99,63
JUMLAH		22.619.437.448	20.915.639.873	1.703.797.575	92,47	

Realisasi anggaran tersebut diatas utamanya dilaksanakan untuk mencapai kinerja yang telah ditentukan baik pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 23. Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALIASI	CAPAIAN (%)
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	75.000.000		72.322.000	96,43
	* Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		0,1%	0,04%	40
1.1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000		72.322.000	96,43
	* Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		509.425 kg	509.600 kg	100,03
1.1.1	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	75.000.000		72.322.000	96,43
	* Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia		1 unit	1 unit	100
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	130.000.000		125.776.500	96,75
	* Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		1,00%	1,54%	154
2.1	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	130.000.000		125.776.500	96,75
	* Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		3.650.922 kg	3.705.150 kg	101,49
2.1.1	Penjaminan Ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	130.000.000		125.776.500	96,75
	* Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota		1 unit	1 unit	100
3.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125.000.000		120.573.335	96,46
	* Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan		2%	3,97%	198,5

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALIASI	CAPAIAN (%)
3.1	Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	125.000.000		120.573.335	96,46
	* Jumlah UMKM pengolahan ikan		15 unit usaha	16 unit usaha	106,67
3.1.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000		120.573.335	96,46
	* Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0,45 ton	0,53 ton	117,78
4.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.027.022.818		13.664.647.963	90,93
	* Nilai SAKIP Perangkat Daerah		A	BB	
	* Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat PD (skor)		95	85,73	90,24
4.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000		6.079.200	81,06
	Persentase Dokumen Laporan Kinerja yang tepat waktu		100%	100%	100
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000		6.079.200	81,06
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		3 laporan	5 laporan	100
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.399.638.175		12.623.411.628	94,21
	Persentase dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.399.638.175		12.623.411.628	94,21

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALIASI	CAPAIAN (%)
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		160 orang	1 orang	100
4.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.228.240		404.423.012	97,63
	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100
4.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000		4.998.000	99,96
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		4 paket	4 paket	100
4.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.021.000		71.408.000	95,18
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		2 paket	2 paket	100
4.3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.228.240		17.218.000	99,94
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		4 paket	4 paket	100
4.3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.535.600		135.508.600	99,98
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		4 paket	4 paket	100
4.3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000		7.934.800	99,19
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4 paket	4 paket	100
4.3.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.379.000		2.350.000	98,78
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		12 dokumen	12 dokumen	100
4.3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000		163.955.612	96,44
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 laporan	4 laporan	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALIASI	CAPAIAN (%)
	Penatausahaan Arsip Dinas pada SKPD	1.064.400		1.050.000	98,65
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		66 dokumen	66 dokumen	100
4.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	470.771.760		455.426.198	96,74
	Persentase Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100%	100%	100
4.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000		4.482.500	99,61
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 laporan	4 laporan	100
4.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.000.000		120.632..949	98,88
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yan Disediakan		12 laporan	12 laporan	100
4.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	344.271.760		330.310.749	95,94
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	12 laporan	100
4.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.000.000		175.307.925	99,61
	Persentase Dokumen Aset Daerah yang terpelihara		100%	100%	100
4.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.300.000		124.959.807	99,73
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		8 unit	8 unit	100
4.5.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor (AC, Komputer, mesin Ketik)	32.000.000		31.879.660	99,62
	Jumlah Peralatan dan Masin Lainnya yang Dipelihara		45 unit	45 unit	100

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALIASI	CAPAIAN (%)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	8.700.000		8.548.154	98,25
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	1 unit	100
4.5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		9.920.304	99,20
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		3 unit	3 unit	100
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.959.128.723		1.876.516.210	95,78
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian		8,14%	8,51%	104,55
5.1	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	1.959.128.723		1.876.516.210	95,78
	<i>Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian</i>		18 kel	86 kel	477,78
5.1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.859.128.723		1.781.858.210	95,84
	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan		3 laporan	4 laporan	133,34
5.1.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100.000.000		94.658.000	94,66
	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		2 laporan	1 laporan	50
6.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.194.468.507		3.024.746.289	94,69
	Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik		5%	21,24%	424,8
6.1	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	1.886.842.600		1.756.342.189	93,08

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALIASI	CAPAIAN (%)
	Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan :				
	* pupuk		41.509 kg	25.650 kg	61,79
	* bibit		1.702.216 batang	1.000.000 batang	58,75
6.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	1.886.842.600		1.756.342.189	93,08
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya		12 dokumen	9 dokumen	75
6.2	Pembangunan Prasarana Pertanian	1.307.625.907		1.268.404.100	97
	Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik		2.016 unit	2.860 unit	141,87
	Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan irigasi usaha tani	209.730.973		209.107.300	99,70
	Jumlah Jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dan dipelihara		16 unit	1unit	6,25
6.2.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	7.089.970		0	0
	Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara		15 unit	0	0
	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	350.000.000		343.541.300	98
	jumlah Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		3 unit	3 unit	100
6.2.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	740.805.000		715.755.500	96,62
	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		5 unit	11 unit	220
7.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	50.000.000		49.596.700	99,19

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA	SATUAN (Rp)	TARGET	REALIASI	CAPAIAN (%)
	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian		99,06%	99,90%	100,85
7.1	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	50.000.000		49.596.700	99,19
	Persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian		17,11%	17,74	103,68
7.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000		49.596.700	99,19
	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan		10 ha	31 ha	310
8.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.058.817.400		1.981.460.876	96,24
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani		8%	8,84%	110,50
8.1	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>	2.058.817.400		1.981.460.876	96,24
	<i>Jumlah peningkatan kelas kelompok tani</i>		205 kelompok	227 kelompok	110,73
8.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	250.000.000		238.786.987	95,51
	Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		15 unit	15 unit	100
8.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.255.000.000		1.210.991.400	96,49
	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		6 unit	6 unit	100
8.1.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	172.500.000		171.870.000	99,63
	Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian		15 unit	15 unit	100
	JUMLAH	22.619.437.448		20.915.639.873	92,47

1.4 Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

A. URUSAN PERIKANAN

I. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki anggaran Rp 75.000.000,- dengan serapan sebesar Rp 72.322.000,-. Indikator program Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dengan target 0,01% dan tercapai 0,04% atau 40% dari target. Kecilnya capaian target program ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

Banyak faktor yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap antara lain :

1. Faktor Alam

Hasil penangkapan ikan di perairan darat sangat tergantung dengan kondisi alam (angin, perubahan cuaca dan musim). Oleh Karena itu produksi perikanan tangkap mengenal musim paceklik. Hal inilah yang menyebabkan mayoritas nelayan perairan darat Kabupaten Madiun merupakan nelayan sambilan atau mempunyai sambilan mata pencaharian lain selain nelayan, salah satunya yaitu bertani.

2. Faktor Nelayan

Dengan mayoritas nelayan Kabupaten Madiun yang berstatus nelayan sambilan mempengaruhi jumlah hari penangkapan (trip). Rata-rata nelayan melakukan penangkapan sebanyak 20 hari dari 30 hari kalender tiap bulannya.

3. Faktor Potensi Lahan

Perairan darat terdiri dari Waduk, Sungai dan Genangan (Kali Mati dan embung). Dengan lahan perikanan tangkap yang tidak mengalami perluasan, menyebabkan produksi perikanan tangkap tidak bisa mengalami kenaikan yang melonjak.

4. Faktor Kelestarian Ikan dan Lingkungan

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir, perairan darat Kabupaten Madiun banyak mengalami over fishing dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan (jenis krakat dan jaring dengan mesh dibawah 3,5), sehingga banyak ikan kecil yang tertangkap. Walaupun telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan Kegiatan Restocking (Penebaran Benih Ikan), hal tersebut tetap menyebabkan terganggunya kelestarian dan keberlangsungan sumberdaya perikanan.

1.1 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota memiliki anggaran Rp 75.000.000 dengan realisasi Rp 72.322.000,-. Target kegiatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 509.425 kg tercapai 509.600 kg atau 100,03% dari target.

Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

1.1.1 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap memiliki anggaran sebesar Rp 75.000.000 dengan realisasi Rp 72.322.000,-. Target Sub kegiatan Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia sebanyak 1 unit terealisasi 1 unit atau 100% dari target. Tercapainya target sub kegiatan ini adalah melalui kegiatan restocking benih ikan sebanyak 1 paket yang diserahkan ke nelayan. Maksud dan tujuan Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan stok populasi ikan di perairan darat dalam rangka pengelolaan sumberdaya perikanan melalui pengendalian dan pemanfaatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya hayati perairan.
2. Untuk melestarikan sumberdaya ikan di perairan darat terutama ikan lokal
3. Untuk meningkatkan produksi ikan di perairan umum guna pemenuhan gizi bagi masyarakat.
4. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/nelayan di sekitar perairan darat melalui peningkatan pendapatan yang merata dan kesempatan kerja tambahan dari sektor perikanan.

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota TA. 2023 adalah sebagai berikut :

1. Metode pelaksanaan kegiatan adalah melalui swakelola dan kontraktual.
2. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan pada Nelayan Perairan Darat Kabupaten Madiun:
 - a. Tanggal 20 Juni 2023
Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan dilaksanakan di RM. Omah Idjo Desa Ngepeh Kecamatan Saradan dengan peserta 50 orang Nelayan perairan darat Kabupaten Madiun. Adapun materi dan narasumber adalah :

- Materi 1 adalah Biota Laut Dilindungi (termasuk di dalamnya Ikan Belida yang ada di Kabupaten Madiun) dengan narasumber Nunik Sulistyowati, S.Si. dari Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan laut Denpasar.
- Materi 2 adalah Budidaya Ikan (dalam rangka diversifikasi usaha nelayan) dengan narasumber Joko Dewantoro (pembudidaya ikan Kabupaten Madiun)

b. Tanggal 29 Agustus 2023

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan dilaksanakan di RM. Omah Idjo Desa Ngepeh Kecamatan Saradan dengan peserta 50 orang. Adapun materi dan narasumber adalah :

- Materi 1 adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan narasumber Ardiani Mariasari, S.Pi., M.Si. dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
- Materi 2 adalah Strategi Pengelolaan Perairan Darat yang Berkelanjutan dengan narasumber Ir. Nur Andriyono, MT. (Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang berkantor di Kota Madiun)

3. Pelaksanaan penyerahan benih ikan untuk restocking dilaksanakan pada tanggal 29 November 2023. Benih Ikan ini diberikan pada 3 (tiga) kelompok Nelayan Perairan Darat yang sebelumnya telah mengajukan permohonan bantuan (proposal) serta telah di survey lokasi. Adapun penerima benih ikan adalah:

No.	Nama Penerima Kegiatan	Alamat	Jenis Bantuan	Volume
1.	Kelompok Mina Widas Lestari	Desa Pajaran Kec. Saradan	Benih Ikan Tawes Benih Ikan Tombro	25.800 ekor 18.500 ekor
2.	Kelompok Nila Mitra	Desa Duren Kec. Pilangkenceng	Benih Ikan Tawes Benih Ikan Tombro	25.000 ekor 18.000 ekor
3.	Kelompok Mina Mulya Abadi	Desa Plumpungrejo Kec. Wonoasri	Benih Ikan Tawes Benih Ikan Tombro	25.000 ekor 18.000 ekor

Permasalahan

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, tetapi ada sedikit permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya Fenomena El Nino yang menyebabkan terjadinya musim kemarau menjadi sangat kering serta permulaan musim hujan yang terlambat, sedangkan ada beberapa perairan darat sumber airnya sangat bergantung dari air hujan.
2. Nelayan perairan darat pada umumnya adalah nelayan sambilan, dan sebagian kecilnya hanya melakukan penangkapan ikan pada musim-musim tertentu, karena kondisi air yang surut ketika musim kemarau.
3. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap, contohnya adalah penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti setrum dan penggunaan jaring dengan lubang jaring yang kecil.

Upaya Penyelesaian Masalah

Penyelesaian Masalah :

1. Perlunya evaluasi terhadap waktu pelaksanaan kegiatan penyerahan benih ikan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
2. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai diversifikasi usaha nelayan, sehingga nelayan yang tidak bisa menangkap ikan ketika air surut di musim kemarau, tetap bisa melaksanakan aktivitas untuk mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan keluarganya.
3. Perlunya pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kabupaten Madiun, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik serta perlunya sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki anggaran Rp 130.000.000,- dan terealisasi Rp 125.776.500,- dengan indikator Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya. Dari Target 1% terealisasi 1,54% atau 154% dari target. Target tersebut tercapai tak lepas dari kegiatan yang dilakukan yaitu :

II.1 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan memiliki anggaran Rp 130.000.000,- dan terealisasi Rp 125.776.500,- dengan target indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebanyak 3.650.922 kg terealisasi 3.705.150 kg atau 101,49%. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan yaitu :

II.1.1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 130.000.000,- dan terealisasi Rp 125.776.500,- dengan target indikator Jumlah sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/kota dan terealisasi di angka yang sama, ini berarti target terealisasi sebesar 100%. Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota adalah:

- a. Meningkatkan produksi benih baik jumlah kualitas maupun keragaman jenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Meningkatkan kegiatan UPTD Budidaya Ikan Air Tawar dan Kelompok Perikanan berwawasan lingkungan dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan serta pengendalian hama penyakit;
- c. Meningkatkan jumlah Produksi Perikanan Budidaya;
- d. Meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pengolah dan pemasar ikan secara berkelanjutan.

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota mengacu pada Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan metode swakelola.

Mekanisme Pelaksanaan swakelola oleh Dinas pada pengadaan :

1. Pakan Ikan -2 sebanyak 91 zak dan Pakan Benih Ikan sebanyak 20 zak :

Nama Penyedia barang : TOKO POJOK

Nilai Pengadaan : Rp. 42.546.500,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)

Pemanfaatan Pakan :

- UPTD Budidaya Ikan Air Tawar Sumbermoro Kecamatan Jiwan sebanyak : 36 zak pakan Ikan -2 dan 8 zak pakan benih
- UPTD Budidaya Ikan Air Tawar Doho Kecamatan Dolopo sebanyak : 54 zak pakan ikan -2 dan 12 zak pakan benih.

2. Pengadaan Isi Tabung Oksigen sebanyak 13 tabung

Nama Penyedia Barang : Kurnia Gas

Nilai Pengadaan : Rp. 1.430.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

3. Pengadaan Plastik Packing Ikan Sebanyak 12 Roll :

Nama Penyedia Barang : Toko Pakan Aris

Nilai Pengadaan : Rp. 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Sedangkan mekanisme pelaksanaan bantuan hibah uang adalah swakelola oleh kelompok yang dilakukan oleh :

1. Kelompok Budidaya Ikan "Mina Sejahtera"

Alamat : Desa Palur Kecamatan Kebonsari

Pemanfaatan : Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

Anggaran : Rp. 50.000.000,-

2. Kelompok Ngudi Utomo

Alamat : Desa Banjarasari Kulon Kecamatan Dagangan

Pemanfaatan : Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan

Anggaran : Rp. 30.000.000,-

Adapun masalah dan solusi terkait perikanan budidaya adalah sebagai berikut :

Permasalahan

- Kebutuhan benih ikan belum tercukupi
- Jumlah induk ikan terbatas
- Keterbatasan sumber daya manusia (tenaga kerja)
- Produksi Perikanan belum mencukupi kebutuhan Masyarakat Kabupaten Madiun

Upaya Penyelesaian Masalah

- Penambahan jumlah induk yang berkualitas
- Penambahan sumber daya manusia (SDM)
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
- Peningkatan kemampuan teknis budidaya ikan bagi masyarakat dan pembudidaya ikan

III. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan memiliki anggaran Rp 125.000.000,- dan terealisasi Rp 120.573.335,- (96,46%) dengan target indikator Persentase Peningkatan Hasil Produk Olahan Asal Ikan sebesar 2% terealisasi 3,97% atau tercapai 198,5%. Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

III.1 Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota memiliki anggaran Rp 125.000.000,- dan terealisasi Rp 120.573.335,- (96,46 %) dengan target indikator Jumlah UMKM pengolahan ikan sebanyak 15 unit usaha terealisasi sebanyak 16 unit usaha atau 106,67% dari target. Kegiatan ini didukung oleh satu sub kegiatan sebagai berikut :

III.1.3 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 125.000.000,- dan terealisasi Rp 120.573.335,- (96,46%) dengan target indikator Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,45 ton terealisasi 0,53 ton kg atau 117,78% dari target.

Tujuan dari sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu balita dalam hal pentingnya mengonsumsi ikan
2. Menyebarluaskan informasi tentang ikan, jenis olahan masakannya, serta kandungan gizi dan manfaatnya kepada masyarakat luas
3. Mendukung upaya peningkatan konsumsi ikan melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

Mekanisme pelaksanaan kegiatan yaitu Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 di Gedung Serbaguna Desa Sukolilo Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dengan 150 peserta penerima paket Gemarikan. Metoda pelaksanaan adalah kontraktual sederhana dengan metoda penunjukan langsung.
 - a. Belanja produk olahan ikan dan ikan segar untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 Kampanye Gemarikan dilaksanakan oleh:

Nama Penyedia barang : CV. SWADIRI
Nomor Kontrak : 000.3.2/465/EPL/402.109/2023
Tanggal Kontrak : 05 Juli 2023

Jenis barang :

- Produk Olahan ikan (Abon Ikan, stik tulang ikan, Krupuk ikan, baby wader crispy, bandeng presto)
- Ikan Segar (Nila dan Gurami)
- Goody bag
- Box Stereoform

Nilai Kontrak : Rp. 39.837.900,-

- b. Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 Kampanye Gemarikan dilaksanakan oleh :

Nama Penyedia barang : MINA BAROKAH
Nomor Surat Pesanan : 000.3/525/402.109/2023
Tanggal : 25 Juli 2023

Jenis bara : 1. Nasi Kotak
2. Snack Kotak

Nilai Belanja : Rp. 9.000.000,-

- c. Belanja bahan cetak untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh :

Nama Penyedia Barang : UD. REMAJA
Nomor Surat Pesanan : 000.3/526/402.109/2023
000.3/527/402.109/2023
000.3/528/402.109/2023

Tanggal : 25 Juli 2023

Nilai Belanja :Rp. 485.100

2. Kampanye Gemarikan Harkanas yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2023 di Pendopo Kantor Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, dengan 150 peserta penerima paket Gemarikan. Metoda pelaksanaan adalah kontraktual sederhana dengan metoda penunjukan langsung.

- a. Belanja produk olahan ikan dan ikan segar untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 Kampanye Gemarikan Harkanas dilaksanakan oleh:

Nama Penyedia barang : CV. BAGUS BANGKIT
Nomor Kontrak : 000.3.2/771/EPL/402.109/2023
Tanggal Kontrak : 24 November 2023

Jenis Barang :

- Produk Olahan ikan (Abon Ikan, stik tulang ikan, Krupuk ikan, baby wader crispy, bandeng presto)
- Ikan Segar (Nila dan Gurami)
- Goody bag
- Box Stereoform

Nilai Kontrak : Rp. 40.013.835,-

- b. Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 Kampanye Gemarikan Harkanas dilaksanakan oleh :

Nama Penyedia barang : CV. SELERA NUSANTARA
Nomor Surat Pesanan : 000.3.2/825/402.109/2023
Tanggal : 08 Desember 2023

Jenis barang : 1. Nasi Kotak
2. Snack Kotak

Nilai Belanja : Rp. 10.125.000,-

- c. Belanja bahan cetak untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 Kampanye Gemarikan Harkanas dilaksanakan oleh :

Nama Penyedia Barang : UD. REMAJA
Nomor Surat Pesanan : 000.3/828/402.109/2023
Tanggal : 08 Desember 2023

Nilai Belanja : Rp. 966.500

- d. Belanja kain batik untuk Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 Kampanye Gemarikan Harkanas dilaksanakan oleh :

Nama Penyedia Barang : BATIK PADI MENGUNING

Nomor Surat Pesanan : 000.3/760/402.109/2023

Tanggal : 20 Nopember 2023

Nilai Belanja : Rp. 19.745.000

- e. Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 400.000,-

Adapun permasalahan dan solusi pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Permasalahan

- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ikan menjadikan ikan kurang diminati sebagai menu keluarga
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat mengkonsumsi ikan
- Mutu dan keamanan produk yang tersedia masih rendah
- Terbatasnya diversifikasi produk olahan

Upaya penyelesaian masalah

- Meningkatkan konsumsi ikan dengan kampanye “Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan” (Gemarikan)
- Peningkatan edukasi kepada masyarakat bahwa ikan merupakan sumber protein tinggi, mengandung omega3 dan murah.
- Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk meminimalisir peredaran penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam produk perikanan.

B. URUSAN PERTANIAN

IV. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian memiliki anggaran sebesar Rp 1.959.128.723,- dan terealisasi Rp 1.876.516.210,- atau 95,78%. Target indikator Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian 8,14% terealisasi 8,51%. Capaian target ini merupakan perbandingan dari jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian yaitu 86 kelompok terhadap jumlah kelompok tani tanaman pangan (789 keltan) dan

perkebunan (221 keltan) dengan jumlah total 1.010 kelompok. Program ini didukung oleh satu kegiatan, yaitu :

IV.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian memiliki anggaran sebesar Rp 1.959.128.723,- dan terealisasi Rp 1.876.516.210,- atau 95,78%, dengan target indikator Jumlah kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian yaitu 18 kelompok dengan realisasi sejumlah 86 kelompok atau terealisasi 477,78% dari target. Tingginya capaian kinerja pada kegiatan ini disebabkan oleh penerima manfaat dari kegiatan ini meliputi kelompok tani tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan sehingga jangkauan kegiatan lebih luas dibandingkan yang direncanakan di awal. Kegiatan ini didukung oleh dua sub kegiatan yaitu :

IV.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi memiliki anggaran sebesar Rp 1.859.128.723,- dengan realisasi Rp 1.781.858.210,- (95,84%). Sub Kegiatan ini memiliki memiliki 3 Sumber Dana yang berbeda yaitu DBH-CHT, DAK Non Fisik, dan DTU-DBH dengan rincian sebagai berikut :

- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 959.128.723,-
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) sebesar Rp. 130.000.000,-
- Dana Transfer Umum Dana Bagi hasil Rp. 770.000.000,-

Secara lebih terperinci, berikut realisasi keuangan dari Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Tahun Anggaran 2023 :

NO	KEGIATAN	SUMBER DANA	PAGU AWAL	REALISASI	%
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		1.859.128.723	1.781.858.210	95,84%
1	Bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Perikanan	DBH CHT	959.128.723	906.733.460	94,54%
2	P2L	DAK NF	130.000.000	129.473.500	99,60%
3	Kegiatan TMMD	DTU DBH	50.000.000	47.420.600	94,84%
4	Pengembangan AKABI	DTU DBH	58.567.500	50.912.250	86,93%
5	Pengembangan Kebun Bibit dan Green House	DTU DBH	518.311.424	505.873.400	97,60%
6	Gerakan Tanam Cabai	DTU DBH	143.121.076	141.445.000	98,83%

A. Bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana Produksi Perkebunan dan Sarana Produksi Perikanan (DBH CHT)

Pemanfaatan dana DBH CHT dilaksanakan melalui penyediaan benih jagung, kacang hijau, benih bawang merah, bibit cabai dan bibit tanaman buah (alpukat, dan durian), sarana produksi pertanian berupa pupuk NPK (NonSubsidi), pestisida, pupuk bokashi, sarana perkebunan (mesin perajang tembakau, gerobak sorong dan timbangan) serta sarana budidaya perikanan (benih ikan lele, pakan ikan dan kolam terpal), hal ini bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani maupun pelaku agribisnis terhadap usaha serta budidaya tanaman pangan (jagung, kacang hijau) dan tanaman hortikultura (bawang merah, cabai alpukat dan durian)
- b. Memotivasi dan menggerakkan petani dan pelaku agribisnis untuk mensukseskan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
- c. Mengembangkan dan membentuk kawasan/sentra-sentra produksi yang sesuai dengan iklim setempat.
- d. Membantu mencukupi kebutuhan tanaman hortikultura terutama harga cabai yang sedang mengalami inflasi.
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengusaha tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dan berjangka menengah/panjang.
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan baik lahan kering maupun lahan pekarangan.
- g. Meningkatkan Kesehatan masyarakat ,meningkatkan kecerdasan dan mencegah stunting bagi balita dengan banyak mengkonsumsi protein hewani terutama dari ikan lele yang dibudidayakan di lahan yang dimiliki oleh petani tembakau.
- h. Menghasilkan produk yang berkualitas baik melalui penanganan hasil panen tembakau yang tepat.
- i. Menekan kehilangan atau penurunan hasil panen tembakau.
- j. Meningkatkan efisiensi proses pascapanen tembakau.

Kegiatan dari Dana DBH CHT ini dialokasikan antara lain untuk:

1. Pengadaan benih, bibit, pupuk npk (non subsidi), pestisida, dan pupuk bokhasi (Belanja barang dan diserahkan kepada masyarakat)

No	Kec	Desa	Kelompok Tani	Kacang Hijau (kg)	Jagung (kg)	NPK (kg)	Pestisida (lt)	Alpukat (btg)	Durian (btg)	Bokashi (kg)	Cabe(btg)	Bawang Merah (kg)
1	Saradan	Klangon	BangunKarso	-	225	750	30	-	200	-	-	350
2		Klangon	Karya Utama	-	225	750	30	-	200	-	420	-
3		Klangon	Margo Mulyo	125	-	250	10	-	200	-	420	-
4		Klangon	Swa Usaha	-	225	750	30	-	200		420	-
5		Sumberbbndo	Sido Luhur	-	195	650	26	210	-	-	420	-
6		Sumberbendo	Sumber Agung	125	-	250	10	210	-	-	420	-
7	Kare	Morang	Jati Lestari	-	-	-	-	-	100	2000	420	-
8		Bodag	Gotong Royong	-	-	-	-	-	100	2000	-	175
9		Cermo	Karyo Tani II	-	-	-	-	-	100	2000	-	175
10		Kare	Sambong Makmur	-	-	-	-	-	100	2000	-	175
11		Kepel	Tani Makmur	-	-	-	-	-	100	2000	-	175
12		Randualas	Karya Makmur	-	-	-	-	100	-	2000	420	-
13	Dagangan	Ngranget	Ngudi Makmur	-	-	-	-	-	100	2000	430	-
14	Gemarang	Sebayi	Karya Tani	-	150	500	20	-	-	-	430	-
	Jumlah			250	1.020	3.900	156	520	1.400	14.000	3.800	1.050

2. Pengadaan kolamterpal, benih ikan lele dan pakan ikan pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi diberikan kepada:

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Kolam terpal (unit)	Benih Ikan (ekor)	Pakan Ikan -1 (zak)	Pakan Ikan – 2 (zak)	Pakan Ikan-3 (zak)
1	Saradan	Klangon	BangunKarso	5	5.000	5	5	5
2		Klangon	Karya Utama	5	5.000	5	5	5
3		Klangon	Margo Mulyo	5	5.000	5	5	5
4		Klangon	Swa Usaha	5	5.000	5	5	5
5		Sumberbendo	Sido Luhur	5	5.000	5	5	5
6		Sumberbendo	Sumber Agung	5	5.000	5	5	5
7	Kare	Morang	Jati Lestari	5	5.000	5	5	5
8		Bodag	Gotong Royong	5	5.000	5	5	5
9		Cermo	Karyo Tani II	5	5.000	5	5	5
10		Kare	Sambong Makmur	5	5.000	5	5	5
11		Kepel	Tani Makmur	5	5.000	5	5	5
12		Randualas	Karya Makmur	5	5.000	5	5	5
13	Dagangan	Ngranget	Ngudi Makmur	5	5.000	5	5	5
14	Gemarang	Sebayi	Karya Tani	5	5.000	5	5	5
	Jumlah			70	70.000	70	70	70

3. Pengadaan alat panen dan pascapanen tembakau pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi diberikan kepada:

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	KETUA	MESIN PERAJANG	SORONG	TIMBANGAN DIGITAL
1	PILANGKENCENG	PULEREJO	JOYO MULYO	DJITENG		2	1
2	PILANGKENCENG	NGALE	MARGO RUKUN	RATNO		2	1
3	PILANGKENCENG	KREBET	TINGKIR MULYO	SADIMUN	1	2	1
4	KARE	BODAG	MURAH SANDANG	HARI K			1
5	KARE	CERMO	MUGI LESTARI	DIDIK		3	1
6	KARE	MORANG	TEKAD MAKMUR	SUNARTO		2	
7	KARE	RANDUALAS	KARYO MIGUNA	AGUNG W	1	2	
8	KARE	KARE	SAMBONG MAKMUR	SARIMIN		1	
9	KARE	KEPEL	TANI MAKMUR	SUDIRI		1	
10	DAGANGAN	NGRANGET	NGUDI MAKMUR	SUNARDI		1	
11	SARADAN	PAJARAN	SIDO MAKMUR	MADASIM		1	
12	SARADAN	KLANGON	BANGUN KARSO	WASIS		1	
13	SARADAN	KLANGON	SWA USAHA	NJONO		1	
14	SARADAN	SUMBER BENDO	SIDO LUHUR	SARNO		1	
J U M L A H					2	20	5

4. Pengadaan Pestisida pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai
Dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi diberikan kepada:

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	PESTISIDA (Botol)
1	KARE	CERMO	MUGI LESTARI	145
2	KARE	CERMO	KARYO TANI II	42
3	KARE	MORANG	TEKAD MAKMUR	82
4	KARE	MORANG	JATI LESTARI	12
5	KARE	KEPEL	TANI MAKMUR	52
6	KARE	KARE	SAMBONG MAKMUR	32
7	KARE	BOLO	MAJU TERUS	22
8	KARE	BODAG	MURAH SANDANG	83
9	KARE	BODAG	GOTONG ROYONG	32
10	KARE	RANDUALAS	KARYO MIGUNA	52
11	KARE	RANDUALAS	KARYA MAKMUR	22
12	DAGANGAN	NGRANGET	NGUDI MAKMUR	12
14	BALEREJO	BANARAN	RANTAI AGUNG	50
15	MEJAYAN	KALIABU	SULING MAS	12
16	PILANGKENCENG	NGALE	MARGO RUKUN	56
17	PILANGKENCENG	NGALE	SUMBER REJEKI	72
18	PILANGKENCENG	NGALE	SUMBER TANI	128
19	PILANGKENCENG	PULEREJO	SOTHO MULYO	58
20	PILANGKENCENG	PULEREJO	JOYO MULYO	32
21	PILANGKENCENG	KREBET	RUKUN MAKMUR	32
22	PILANGKENCENG	KREBET	TINGKIR MULYO	24
23	PILANGKENCENG	KEDUNGMARON	RUKUN MAKMUR	72
24	PILANGKENCENG	KEDUNGREJO	SIDO MULYO	56
25	PILANGKENCENG	PURWOREJO	SISWO SEJATI	40
26	SARADAN	KLANGON	BANGUN KARSO	42
27	SARADAN	KLANGON	MARGO MULYO	42
28	SARADAN	KLANGON	SWA USAHA	22
29	SARADAN	KLANGON	KARYA UTAMA	22
30	SARADAN	SUMBERBENDO	SIDO LUHUR	22
31	SARADAN	SUMBERBENDO	SUMBER AGUNG	42
32	SARADAN	PAJARAN	SEKAR SLAMET	42
33	SARADAN	PAJARAN	SIDO MAKMUR	22
34	GEMARANG	DURENAN	MEKARSARI	12
35	GEMARANG	SEBAYI	KARYA TANI	12
J U M L A H				1.500

5. Selain pengadaan sarana produksi pertanian, juga dilaksanakan kegiatan pertemuan sebanyak 3 kali yaitu pertemuan sosialisasi, dan evaluasi akhir kegiatan yang dilaksanakan di BPP Kecamatan Kare dan BPP Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun.
- Pertemuan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 diBPP Saradan dengan peserta berjumlah 28 orang yang terdiri dari Kelompok Penerima Bantuan, Penyuluh Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas tentang regulasi terkait bantuan dari dana DBHCHT serta arahan tentang hak dan kewajiban bagi calon penerima bantuan.
 - Pertemuan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 di BPP Kare dengan peserta berjumlah 42 orang yang terdiri dari Kelompok Penerima Bantuan, Penyuluh Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas tentang regulasi terkait bantuan dari dana DBHCHT bahwa penerima bantuan ini hanya yang menanam tembakau.
 - Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 22 November 2023 di BPP Kare dengan peserta berjumlah 45 orang yang terdiri dari Kelompok Penerima Bantuan, Penyuluh Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan dan Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Pada pertemuan tersebut dilakukan evaluasi penyaluran bantuan kepada kelompok penerima serta kendala dan masalah yang dihadapi selama proses penyaluran bantuan. Hasil evaluasi menunjukkan penyaluran bantuan sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

B. Pekarangan Pangan Lestari (DAK Non Fisik)

Maksud kegiatan ini memanfaatkan Dana Tranfer Khusus Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk peningkatan populasi tanaman hortikultura berupa tanaman sayur dan tanaman obat. Tujuan pelaksanaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) adalah:

- A. Memberdayakan kelompok masyarakat/kelompok tani/kelompok wanita tani untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman sayuran dan obat sesuai potensi sumber daya lokal
- B. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dan sekitarnya
- C. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan pangan serta pendapatan keluarga di wilayah pedesaan maupun perkotaan

- D. Mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).

Mekanisme pelaksanaan adalah Swakelola ,dimana penyaluran dana langsung ke rekening Kelompok Wanita Tani/KWT, bantuan P2L sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per Kelompok.

Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- per kelompok dipergunakan untuk pembelanjaan empat komponen, yaitu;

- a. Sarana Perbenihan : Rumah benih, media tanam, saprodi, sarana penyemaian,peralatan kegiatan perbenihan (tray semai, soilblock, polybag kecil dll)
- b. Demplot : peralatan dan pengolahan demplot ,peralatan pengairan, saprodi,plang nama.
- c. Pertanaman : media tanam,saprodi, peralatan kegiatan pertanaman dll
- d. Sarana pascapanen : container/ keranjang, selotip sayur,plastic,gunting panen serta alat pasca panen lainnya.

Selanjutnya terdapat anggaran Pendampingan Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang dipergunakan untuk kegiatan Koordinasi, pendampingan, pengawalan, pelatihan dan pelaporan untuk mendukung tercapainya target pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) KWT “SEDYO DADI MAKMUR” dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 dan 24 Juli 2023, Pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Suwanto Desa Dimong Kec.Madiun Kabupaten Madiun dengan Narasumber Bapak Yuswanto, SP.

Pelaksanaan Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) KWT “MEKAR SARI” dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 dan 25 Juli 2023, Pukul 08.00 WIB bertempat di Rumah Bapak Kepala Desa Batok Kec.Gemarang Kabupaten Madiun dengan Narasumber Bapak Yuswanto, SP.

C. TNI Manunggal Masuk Desa

Maksud kegiatan ini memanfaatkan Dana Tranfer Umum Dana Bagi Hasil (DTU-DBH) untuk peningkatan populasi tanaman tahunan berupa tanaman hortikultura berupa buah-buahan dan juga pupuk bhokasi. Tujuan pelaksanaan TMMD adalah :

- a. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dan pelaku agribisnis terhadap usaha dan budidaya tanaman buah - buahan dengan penerapan usahatani ramah lingkungan yang berbasis organik.

- b. Memotivasi dan menggerakkan petani dan pelaku agribisnis untuk mensukseskan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura khususnya buah-buahan.
- c. Mengembangkan dan membentuk kawasan/sentra-sentra produksi yang sesuai dengan iklim setempat.
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui pengusaha tanaman yang bernilai ekonomis tinggi dan berjangka menengah/panjang.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan baik lahan kering maupun lahan pekarangan.
- f. Upaya Mempercepat terobosan pembangunan di daerah pedesaan serta sebagai langkah peningkatan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

Mekanisme pelaksanaan TMMD dengan anggaran Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) Pengadaan Bibit TNI Manunggal Membangun Desa dilaksanakan berupa bantuan Bibit Tanaman Buah dan Pupuk Bokashi dengan rincian bantuan untuk Desa Kepel : Bibit Durian 120 batang, Bibit Alpukat 120 batang, Manggis 120 batang dan Bokashi 7200 Kg, Bantuan untuk Desa Kare : Bibit Durian 75 batang, Bibit Alpukat 75 batang, Bibit Jeruk Keprok 150 Batang dan Bokashi 7500 Kg. Pelaksanaan dilaksanakan pada bulan Juli 2023, diserahkan secara simbolis oleh TNI bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

D. Pengembangan Aneka Kacang da Umbi (DTU DBH)

Tujuan bantuan pengembangan akabi ini adalah memberikan bantuan benih kedelai bersertifikat dan sarana produksi lainnya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai.

Pelaksanaan Pengembangan Akabi dengan dana Rp. 58.567.500,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang dilaksanakan di Kelompok Tani Mugi Lestari Desa Sebayi Kecamatan Gemarang seluas 25 ha dialokasikan antara lain untuk :

- a. Pengadaan benih kedelai bersertifikat, pupuk npk (non subsidi), pestisida,pupuk hayati (Hibah Barang)
- b. Selain pengadaan sarana produksi pertanian, juga dilaksanakan kegiatan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu pertemuan sosialisasi, dan evaluasi akhir kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian Dan Perikanan dan BPP Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun.
 - o Pertemuan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2023 diBPP Saradan dengan peserta berjumlah 30 orang yang terdiri dari Kelompok Penerima Bantuan, Penyuluh Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian, dan Petugas dari Dinas

Pertanian dan Perikanan. Pertemuan tersebut membahas tentang regulasi terkait bantuan dari dana DTU DBH I serta arahan tentang hak dan kewajiban bagi calon penerima bantuan.

- Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 di BPP Gemarang dengan peserta berjumlah 20 orang yang terdiri dari Kelompok Penerima Bantuan, Penyuluh Pertanian, Koordinator Penyuluh Pertanian, Petugas dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Pada pertemuan tersebut dilakukan evaluasi penyaluran bantuan kepada kelompok penerima serta kendala dan masalah yang dihadapi selama proses penyaluran bantuan. Hasil evaluasi menunjukkan penyaluran bantuan sudah dilaksanakan 100% sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.

E. Pengembangan Sarana Prasarana Kebun dan Green House (DTU-DBH)

Tujuan kegiatan ini sebagai upaya dalam pengenalan teknologi dan peningkatan infrastruktur pertanian melalui pengembangan sarana kebun dinas dan pembangunan Green House untuk memberikan keterampilan kepada masyarakat khususnya kelompok tani dalam Pemeliharaan Tanaman Buah, khususnya budidaya tanaman melon dalam Green House. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan petani mampu jeli bertindak dalam hal budidaya tanaman buah melalui penggunaan Bibit Unggul dan pemanfaatan green house, Sehingga secara langsung dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan produksi padi nasional sebagai upaya menuju swasembada.

Pelaksanaan Pengembangan Sarana Prasarana Kebun dan Green House dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 518.311.424,00 (Lima Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dipergunakan untuk pembangunan 2 unit Green house yang dibangun di 2 lokasi yang berbeda yaitu di kantor UPT. Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Madiun di Kel. Bangunsari, Kec. Dolopo sebanyak 1 unit dan di BPP Kare sebanyak 1 unit. Selain itu terdapat juga pengadaan 3000 biji Benih Melon, 18.000 Kg Pupuk Bokashi, 3 Liter Pestisida, 3 Liter Herbisida, 4 Jerigen Pupuk AB Mix, 4 Sachet Fungisida dan 4 Botol Insektisida guna menunjang kegiatan pengelolaan kebun bibit dan penanaman di Green House.

F. Gerakan Tanam Cabai (DTU DBH)

Maksud kegiatan ini memanfaatkan Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DTU-DBH) untuk peningkatan produksi tanaman hortikultura berupa tanaman cabai . Tujuan pelaksanaan Gerakan Tanam Cabai adalah:

- a. Meningkatkan produktifitas cabai guna menekan laju inflasi.

- b. Memotivasi dan menggerakkan Kelompok Wanita Tani untuk mensukseskan upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura khususnya komoditas cabai.
- c. Mengembangkan dan membentuk kawasan/sentra-sentra produksi yang sesuai dengan iklim setempat.
- d. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui budidaya tanaman yang bernilai ekonomis tinggi terutama menjelang hari raya keagamaan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan baik lahan kering maupun lahan pekarangan.

Dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Madiun Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan Gerakan Tanam Cabai di Pekarangan, Bantuan berupa Bibit Cabai sejumlah 23.000 batang untuk 46 KWT (Kelompok Wanita Tani) se-Kabupaten Madiun., sedangkan penyerahan secara simbolis oleh Bapak Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos dan Bapak Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kab.Madiun Bapak Sumanto, SP., MMA yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Jam 08.00 WIB bertempat di Balai Desa Gunungsari Kec. Madiun.

Adapun permasalahan dan solusi terkait kegiatan ini diantaranya adalah :

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian sub kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung sesuai komoditas, teknologi dan spesifik lokasi tahun anggaran 2023, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit tanaman buah menunggu datangnya musim hujan sehingga penyerapan anggaran jatuh pada triwulan akhir.
- b. Lokasi yang menjadi sasaran ada yang didataran tinggi khususnya daerah tegalan atau pekarangan yang pengairannya tadah hujan.
- c. Petani penerima bantuan sarana produksi budidaya ikan lele merupakan petani tembakau yang belum mempunyai pengalaman dalam budidaya ikan lele.
- d. Masih rendahnya pengetahuan budidaya tentang komoditas bantuan yang diperbantukan seperti cabai dan bawang merah.
- e. Kurangnya pendampingan terkait pelaksanaan P2L dari pusat sehingga kelompok penerima bantuan masih kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah menyesuaikan jadwal pertemuan kelompok tani untuk melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan melalui petugas lapang penyuluh Pertanian. Dilakukan kegiatan berupa pelatihan

budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan budidayakan perikanan untuk petani penerima bantuan yang belum mempunyai pengalaman.

Melaksanakan sesuai dengan petunjuk dan prosedur yang berlaku sehingga bantuan dapat tersalurkan dan termanfaatkan dengan lebih optimal. Pembelian bibit buah-buahan dapat dilaksanakan di awal tahun atau akhir musim penghujan. penyiapan lahan untuk tanaman buah dilakukan sebelum datangnya musim penghujan, sehingga pada saat bibit tanaman buah datang, lahan sudah siap digunakan.

IV.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian memiliki anggaran Rp 100.000.000,- dengan realisasi Rp 94.658.000,- (94,66%). Target indikator Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sebanyak 2 laporan terealisasi 1 laporan. Maksud dan tujuan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Penanganan Panen dan Pasca Panen Kakao (PBH Rokok) adalah :

- Menghasilkan produk yang berkualitas baik;
- Menekan kehilangan atau penurunan hasil;
- Meningkatkan efisiensi proses pascapanen kakao;
- Meningkatkan daya saing kakao;
- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kakao.

Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian / Penanganan Panen dan Pasca Panen Kakao mendapat anggaran senilai Rp.100.000.000,- (Seratus juta Rupiah). dialokasikan antara lain untuk :

1. Sosialisasi dan Bantuan Transport kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Kakao

Kegiatan sosialisasi penanganan panen dan pasca panen kakao dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022, dengan peserta sejumlah 40 orang petani Kakao dari Desa Bodag dan Desa Morang Kecamatan Kare,

2. Belanja Hibah Barang Alat Panen dan Pasca Panen Kakao.

Anggaran untuk Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian / Penanganan Panen dan Pasca Panen Kakao dengan volume kegiatan hibah barang untuk penanganan panen dan pasca panen kakao sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	ALAT UKUR KADAR AIR BIJI KAKAO	WIDIK	KOTAK FERMENTASI
1	Kare	Bodag	Sri Rejeki	1	95	25
2	Kare	Morang	Tekad Makmur	1	95	25
JUMLAH				2	190	50

Adapun permasalahan dan solusi terkait kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Permasalahan

- Adanya kendala pemasaran atau penjualan kakao, perbedaan harga jauh antara fermentasi dan non fermentasi
- Kurangnya ketersediaan Sarana dan Prasarana
- Minat untuk menjadi petani kakao mulai berkurang

Upaya Penyelesaian Masalah

- Berkoordinasi dengan perusahaan mitra (PT Cargill Indonesia) untuk kesepakatan menerima hasil panen kakao dalam bentuk biji kering
- Pembuatan proposal bantuan lewat Propinsi berupa Bantuan benih bersertifikat, pupuk atau pestisida nabati, bantuan alat – alat pasca panen
- Sosialisasi kepada petani kakao tentang tata cara budidaya dan pasca panen yang baik dan benar untuk menghasilkan biji kakao dengan harga tinggi

V. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki anggaran Rp 3.194.468.507,- dengan realisasi Rp 3.024.746.289,-. Target indikator Persentase peningkatan jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik sebesar 5% tercapai sebesar 21,24% atau tercapai 424,8% dari target. Program ini didukung oleh kegiatan :

V.1. Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki anggaran Rp 1.886.842.600,- dengan realisasi Rp 1.756342.189,- (93,08%). Target indikator Jumlah prasarana pertanian yg diperbantukan yaitu pupuk dengan target 41.509 kg dan bibit 1.702.216 batang dengan realisasi pupuk sebanyak 25.650 kg (61,79%) dan bibit sebanyak 1.000.000 batang (58,75%). Tidak tercapainya target pupuk dikarenakan belanja pupuk menyesuaikan kebutuhan petani, saat ini petani banyak yang beralih menggunakan pupuk organik sehingga kebutuhan pupuk non organik berkurang, sedangkan bibit tembakau terjadi

fluktuasi harga sehingga belanja bibit tembakau harus menyesuaikan harga yang ada di pasaran.

Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan :

V.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian memiliki anggaran Rp 1.886.842600,- dengan realisasi Rp 1.756.342.189,- (93,08%). indikator sub kegiatan Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dengan target 12 dokumen terealisasi 9 dokumen atau tercapai 75%. Tidak tercapainya target pada sub kegiatan ini dikarenakan ada beberapa item sub kegiatan yang bergeser ke program lain sehingga keluaran berupa dokumennya pun bergeser ke bidang pengampu program yang bersangkutan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi tembakau di Kabupaten Madiun dengan sasaran kegiatan ini adalah petani yang melakukan budidaya tembakau di wilayah Kabupaten Madiun dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Bibit tembakau sebanyak 1.000.000 batang, dibantukan kepada kelompok tani dengan rincian sebagai berikut:
 - Poktan Joyo Mulyo, Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng, 50.250 batang
 - Poktan Margo Rukun , Desa ngale Kecamatan Pilangkenceng, 87.950 batang
 - Poktan Siswo Sejati, Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, 62.820 batang
 - Poktan Rukun Makmur, Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng, 118.080 batang
 - Poktan Rukun Makmur Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng 50.260 batang
 - Poktan Tingkir Mulyo Desa Krebet Kecamatan Pilangkenceng 37.700 batang
 - Poktan Sotho Mulyo Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng 94.220 batang
 - Poktan Sumber Rejeki Desa Ngale Kec.Pilangkenceng 118.080 batang
 - Poktan Sumber Tani Desa Ngale Kec.Pilangkenceng 206.040 batang
 - Poktan Sidomulyo Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng 92.250 batang
 - Poktan Rantai Agung, Desa Banaran Kecamatan Balerejo, 81.650 batang
2. Bantuan Pupuk sebanyak NPK : 4.150 kg diberika kepada 24 Kelompok Tani, Pupuk Zk 4.900 kg diberika kepada 11 kelompok tani tembakau, NPK 8300 kg diberikan kepada 24 kelompok tani tembakau dan Pupuk Urea 8300 kg diberikan kepada 24 kelompok tani tembakau
3. Jalan Usaha Tani Perkebunan 2 unit di lokasi:

- Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Kedungmaron Kecamatan Pilangkenceng, Panjang 680 m.
 - Kelompok Tani Mugi Lestari Desa Cermo Kecamatan Kare, Panjang 690 m
3. Saluran Irigasi Perpipaan 1 unit di lokasi:
 - Kelompok Tani Murah Sandang, Desa Bodag Kecamatan Kare, Panjang 1130 m
 4. Bantuan 10 Unit tunnel untuk 9 kelompok tani tembakau
 5. Bantuan 310 unit terpal untuk 12 kelompok tani tembakau
 6. Bantuan 2 unit generator untuk 2 kelompok tani tembakau
 7. Belanja modal 1 unit mesin pencacah kertas.

Adapun permasalahan dan solusi terkait kegiatan ini adalah sebagai berikut :

MASALAH

Pada tahun 2023 pengembangan tembakau di lokasi mengalami kendala kurangnya kecukupan air untuk pertumbuhan tanaman. Hal ini disebabkan dampak El Nino dimana terjadi kemarau panjang yang berakibat kecilnya debit aliran air menuju lokasi pertanaman. Selain itu lokasi pertanaman yang jauh dari sumber air memerlukan usaha keras untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Petani berupaya dengan memasang selang untuk menjangkau aliran air terdekat.

Jumlah petani tembakau yang meningkat dibandingkan tahun kemarin mengakibatkan kirangnya anggaran untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sarana produksi tembakau .

Upaya penyelesaian masalah:

Untuk meningkatkan ketersediaan air untuk tanaman diperlukan pembangunan/pemasangan bangunan irigasi perpipaan di lokasi sulit air. Penyediaan air dapat dilakukan dengan memanfaatkan air permukaan (perpipaan) maupun air tanah dalam (membangun sumur pompa).

V.2. Pembangunan Prasarana Pertanian

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian memiliki anggaran Rp 1.307.625.907,- dengan serapan anggaran Rp 1.268.404.100,- (97%). Target indikator kegiatan yaitu Jumlah sarana prasarana pertanian dalam kondisi baik sejumlah 2.016 unit tercapai 2.860 unit (141,87%).

Kegiatan ini memiliki tiga sumber anggaran yaitu:

- Dana bagi hasil cukai hasil tembakau : Rp.209.730.937,-
- Dana bagi hasil pajak rokok : Rp.350.000.000,-
- DTU-DBH : Rp740.805.000,-

Yang dilaksanakakan melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut:

V.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani memiliki anggaran Rp 209.730.973,- dengan serapan anggaran Rp 209.107.300,- (99,70%). Indikator sub kegiatan Jumlah Jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dan dipelihara dengan target 16 unit terealisasi 1 unit (6,25%). Tidak tercapainya target indikator pada sub kegiatan ini dikarenakan tidak adanya dukungan anggaran yang mengakomodir kegiatan tersebut (DAK Fisik), sehingga anggaran yang tersedia dari DBHCHT hanya cukup untuk pembangunan 1 unit saja. Namun disamping dari kegiatan ini, terdapat tambahan realisasi jaringan irigasi usaha tani sebanyak 8 unit dari kegiatan APBN.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengurangi kebocoran air irigasi selama distribusi.
2. Meningkatkan ketersediaan air irigasi khususnya di lahan marginal.
3. Meningkatkan produksi pertanian dengan memenuhi ketersediaan air selama pertumbuhan tanaman.
4. Meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengurangi biaya produksi untuk pemenuhan air irigasi.

Pelaksanaan kegiatan ini berupa:

- Hibah 1 unit irigasi perpipaan kepada kelompok tani Bangun Karso Desa Klargon Kec.Saradan
- Pertemuan Koordinasi dan Sarana Pendukung lainnya.
- 1 paket jasa Perencanaan
- 1 paket Jasa Pengawasan

Yang diberikan kepada kelompok tani yang mengelola usahatani tanaman pangan utama dan tembakau khususnya di lahan marginal yang tidak tersedia air irigasi

V.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani memiliki anggaran Rp 7.089.970,- terealisasi Rp 0,- (0%). Target Sub Kegiatan Jumlah jalan usahatani yang terbangun dan terpelihara 15 unit tidak tercapai karena anggaran yang tersedia bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) yang pada tahun ini tidak mendapat alokasi dana tersebut sehingga anggaran yang ada tidak bisa terserap karena hanya merupakan anggaran pendamping kegiatan.

V.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya

Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya memiliki anggaran Rp 350.000.000,- dengan serapan anggaran Rp 343.541.300,- (98%). Indikator sub kegiatan jumlah Balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dengan target 3 unit teralisasi seluruhnya (100%)

Kegiatan ini berupa belanja:

- Pembangunan Pagar BPP Kare senilai Rp.192.610.000,-
- Stokopname Pestisida senilai Rp.127.825.000,-
- Belanja Pertemuan UPJA ,UPPO dan Koordinasi Pupuk Bersubsidi serta potokopi Senilai Rp.23.106.200,-

Manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas pupuk organik yang diproduksi kelompok UPPO
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan alat mesin pertanian oleh kelompok UPJA
- Meningkatnya keamanan lingkungan BPP Kuwiran

V.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Sub Kegiatan *Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya* memiliki anggaran Rp 740.805.000,- dengan serapan anggaran Rp 715.755.500,- (96,62%). Indikator sub kegiatan Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dengan target 5 unit teralisasi 11 unit (220%).

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyediakan Sarana Prasarana Infrastruktur Pertanian
2. Menyediakan sarana pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.

Yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan hibah uang dengan rincian sebagai berikut :

- Kelompok Tani Sukomulyo Ds.Sukosari Kec. Dagangan Rp. 60.000.000,- digunakan untuk Rabat Jalan Usaha Tani
- Kelompok Tani Sawahan desa Dagangan Kec. Dagangan Rp. 70.000.000,- untuk Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- Kelompok Tani Ngudi Rejeki II senilai Rp. 70.000.000,00 untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani

- Kelompok Tani Sri Jaya Desa Wonoasri Kec.Wonoasri senilai Rp.100.000.000,- untuk pembangunan sumur pompa submersible
- Kelompok Tani Tani Karya Desa Lembah Kecamatan Dolopo senilai Rp.100.000.000,- untuk pembelian 3 unit handtraktor dan sarana pendukungnya
- Kelompok Tani Tani Asih Desa Kresek Kec.Wungu senilai Rp.20.000.000,- untuk pembelian hand tractor 1 unit dan 2 unit mesin pemotong rumput.
- Kelompok Tani Margo Utomo Desa Banyukambang Kecamatan Wonoasri senilai Rp.75.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Sumur Sibel
- Kelompok Tani Mardi Laras Desa Sawahan Kecamatan Sawahan senilai Rp.37.000.000,- untuk Pembangunan Sumur Sibel
- Kelompok Tani Tani Subur Desa Lembah Kecamatan Dolopo senilai Rp.30.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Sumur Sibel
- Kelompok Tani Watu Murni Desa Sidodadi Kec.Mejayan senilai Rp.150.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Sumur Sibel.

Adanya anggaran yang tidak terserap dalam kegiatan ini karena ada satu kelompok tani yang belum lolos verifikasi.

Adapun permasalahan dan solusi terkait kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Masalah

- Kebutuhan sarana infrastruktur di lapangan lebih besar daripada ketersediaan anggaran
- Pelaksanaan kegiatan Hibah uang secara swakelola memerlukan partisipasi dan kemandirian kelompok tani pelaksana.

Upaya Penyelesaian Masalah

- Melakukan koordinasi dengan pusat dan provinsi untuk pengajuan proposal pembangunan sarana infrastruktur pertanian dari sumber dana selain APBD
- Perlu pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan swakelola sehingga administrasi dikelompok tani bisa tertib.
- Seleksi calon lokasi harus memperhatikan kesiapan dan kemandirian kelompok tani pelaksana.

VI. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian memiliki anggaran Rp 50.000.000,- terealisasi Rp 49.596.700,- (99,19%). Target indikator Persentase lahan

pertanian yang bebas dari bencana pertanian 99,06% tercapai 99,90% atau 100,85%. Program ini didukung oleh kegiatan :

VI.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota memiliki anggaran Rp 50.000.000,- terealisasi Rp 49.596.700,- (99,19%). Target indikator persentase peningkatan pengetahuan poktan terhadap pengendalian bencana pertanian 17,11% dengan realisasi 17,74% atau tercapai 103,68%. Capaian ini didapatkan dari jumlah petani yang mendapatkan manfaat dari kegiatan yaitu 140 petani dengan luas rata2 kepemilikan lahan 0,22ha dibandingkan dengan jumlah total petani pangan dan horti sejumlah 789 orang yang dilaksanakan melalui 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

VI.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan memiliki anggaran Rp 50.000.000,- terealisasi Rp 49.596.700,- (99,19%). Target indikator Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan dengan target 10ha dan terealisasi pada lahan seluas 31 ha (310%) dengan mekanisme kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Agen Hayati dilaksanakan di 3 lokasi dengan masing masing 3 kali pertemuan di tiap lokasi (jadwal dan tempat terlampir), dengan mengundang dua narasumber yaitu satu orang Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dari Satuan Tugas UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta satu orang praktisi pembuat agen hayati dari Klinik PHT Mekar Sari Kecamatan Dagangan.

Pelaksanaan Pelatihan Pembuatan Agensi Hayati dilaksanakan selama tiga kali pertemuan di masing-masing lokasi. Pertemuan pertama dilakukan penyampaian informasi dan cara pengendalian opt secara terpadu serta pelaksanaan praktik pembuatan agen hayati dengan bahan dasar larutan ekstrak kentang gula (ekg) sebagai media dan isolat bakteri/fungi sebagai biang untuk dikembangkan dan diperbanyak menjadi agen hayati pengganti insektisida kimia.

Pertemuan kedua dilaksanakan dengan jeda 2 minggu dari pertemuan pertama tujuannya agar agen hayati yang dibuat pada pertemuan pertama telah siap untuk diaplikasikan. Pada pertemuan ini petani melakukan praktek cara aplikasi agens hayati di lahan tanaman

padi atau tanaman pangan lainnya yang ada di lokasi serta setelahnya dilakukan pembahasan kondisi lahan dan upaya penanganan OPT. Pertemuan minggu ketiga dilakukan pengamatan dari hasil aplikasi di lahan serta dilakukan pembentukan struktur kerja kelompok pembuat Agen Pengendali Hayati (APH) agar kegiatan tetap dapat berlanjut secara mandiri.

Peserta terdiri dari petani dan kelompok tani yang berminat dalam pembuatan agensi hayati. Peserta berjumlah 30 orang di setiap kecamatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada bulan Juni – Juli 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Pertemuan Minggu I

No	Tanggal	Lokasi	Materi	Narasumber/Pemateri	Instansi
1	Senin, 22 Mei 2023	Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan	"Manfaat Agensi Hayati Sebagai Solusi Pengelolaan OPT dan Kesuburan Tanah"	POPT Ahli Madya	UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			"Pembuatan Agensi Hayati"	Ali Zubaidi	PPAH Mekar
2	Selasa, 23 Mei 2023	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu	"Manfaat Agensi Hayati Sebagai Solusi Pengelolaan OPT dan Kesuburan Tanah"	POPT Ahli Madya	UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			"Pembuatan Agensi Hayati"	Ali Zubaidi	PPAH Mekar
3	Rabu, 24 Mei 2023	Desa Kare, Kecamatan Kare	"Manfaat Agensi Hayati Sebagai Solusi Pengelolaan OPT dan Kesuburan Tanah"	POPT Ahli Madya	UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
			"Pembuatan Agensi Hayati"	Ali Zubaidi	PPAH Mekar

Pertemuan Minggu II

No	Tanggal	Lokasi	Materi	Narasumber/Pemateri	Instansi
1	Senin, 5 Juni 2023	Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan	"Pembuatan Agen Pengendali Hayati dan Aplikasi Lapang serta Diskusi"	Ali Zubaidi	PHT Mekarsari
2	Selasa, 6 Juni 2023	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu	"Pembuatan Agen Pengendali Hayati dan Aplikasi Lapang serta Diskusi"	Ali Zubaidi	PHT Mekarsari
3	Senin, 7 Juni 2023	Desa Kare, Kecamatan Kare	"Pembuatan Agen Pengendali Hayati dan Aplikasi Lapang serta Diskusi"	Ali Zubaidi	PHT Mekarsari

Pertemuan Minggu III

No	Tanggal	Lokasi	Materi	Narasumber/Pemateri	Instansi
1	Senin, 12 Juni 23	Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan	"Pembuatan Struktur Kerja Kelompok Pembuat Agen Pengendali Hayati dan Evaluasi"	Ali Zubaidi	PHT Mekarsari
2	Selasa, 13 Juni 23	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu	"Pembuatan Struktur Kerja Kelompok Pembuat Agen Pengendali Hayati dan Evaluasi"	Ali Zubaidi	PHT Mekarsari
3	Rabu, 14 Juni 23	Desa Kare, Kecamatan Kare	"Pembuatan Struktur Kerja Kelompok Pembuat Agen Pengendali Hayati dan Evaluasi"	Ali Zubaidi	PHT Mekarsari

Adapun manfaat dari dilaksanakan kegiatan ini adalah:

- Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani terhadap upaya Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan secara terpadu melalui penggunaan agen hayati (musuh alami).
- Terbentuk kemandirian petani dalam membuat agen hayati/musuh alami sebagai alternatif penggunaan pestisida kimia serta mencukupi kebutuhan pupuk.
- Mengurangi biaya produksi melalui pemanfaatan agen hayati sebagai pembenah pupuk organik dan pengendalian hama, penyakit tanaman yang lebih ekonomis, murah dan ramah lingkungan
- Mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berbahaya.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan/Kelompok Tani melalui pemanfaatan pupuk organik dengan bantuan agensi hayati.

Permasalahan yang terjadi serta solusi terkait kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Permasalahan

- Kemampuan masing-masing petani yang mengikuti pelatihan berbeda-beda terhadap materi yang disampaikan narasumber.
- Pengembangan agen hayati masih dilakukan secara perorangan.
- Kurangnya minat petani terhadap penggunaan agensi hayati yang dianggap kurang bermanfaat karena efeknya tidak langsung terlihat, petani lebih menyukai hasil secara instan / cepat.

Upaya Penyelesaian Masalah

- Menghadirkan salah satu narasumber dari kalangan petani sendiri sehingga penyampaian materi lebih mudah dipahami.
- Membentuk jaringan petani pengguna agen hayati.
- Pengembangan agen hayati harus melibatkan kelembagaan petani tidak bisa individual agar hasilnya lebih efektif.
- Merencanakan kegiatan pembuatan agen hayati/musuh alami dengan sasaran petani dalam satu kelompok/lembaga sehingga lebih mudah di monitoring dan evaluasi.
- Merencanakan kegiatan pemanfaat dekomposer dalam pembuatan pupuk organik maupun proses pengolahan lahan yang dilakukan dalam satu hamparan tertentu atau demplot sehingga dapat menjadi contoh bagi petani yang lain.

VII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program Penyuluhan Pertanian memiliki anggaran Rp 2.058.817.400,- terealisasi Rp 1.981.460.876,- (96,24%). Target indikator Persentase peningkatan kelas kelompok tani 8% terealisasi 8,84% atau 110,50% dari target. Program ini didukung oleh kegiatan :

VII. 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Rp 2.058.817.400,- terealisasi Rp 1.981.460.876,- (96,24%). Target indikator Jumlah peningkatan kelas kelompok tani 205 kelompok tercapai 227 kelompok atau 110,73% dari target dengan rincian sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH	
		NAIK	TETAP	TURUN	jml	SK
1	Gemarang	14	30	-	44	44
2	Saradan	15	54	-	69	69
3	Pilangkenceng	10	51	-	61	61
4	Mejayan	10	33	-	43	43
5	Wonoasri	13	22	-	35	35
6	Balerejo	36	27	-	63	63
7	Sawahan	11	22	-	33	33
8	Madiun	10	30	-	40	40
9	Jiwan	7	40	-	47	47

NO	KECAMATAN	JUMLAH			JUMLAH	
		NAIK	TETAP	TURUN	jml	SK
10	Kare	17	28	-	45	45
11	Wungu	12	45	-	57	57
12	Dagangan	18	45	-	63	63
13	Geger	21	38	-	59	59
14	Kebonsari	18	53	-	71	71
15	Dolopo	15	44	-	59	59
	JUMLAH	227	562			
	jumlah TOTAL	789			789	789

Secara terperinci, data kenaikan kelas kelompok tani disajikan pada lampiran 3

VII.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa memiliki anggaran Rp 250.000.000,- terealisasi Rp 238.786.987,- (95,51%) . Target Kegiatan Jumlah kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 15 unit terealisasi 15 unit (100%).

Penggunaan Dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dan petani, kelompok tani atau Kelompok Wanita Tani dalam upaya meningkatkan produksi dan taraf hidup keluarga para petani. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa meliputi rapat koordinasi atau evaluasi koordinator penyuluh kecamatan terhadap kegiatan ataupun program-program daripada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, sarasehan petani milenial, program tingkat kecamatan, Pelatihan Kelompok Kerja (Pokja), bimbingan teknis penyuluh pertanian, tim penilai angka kredit, Penas.

Adapun maksud daripada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa adalah untuk penguatan kelembagaan petani dan meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya dalam mendampingi dan membina petani dan kelompok tani serta Kelompok Wanita Tani.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi pembiayaan:

a. Koordinasi dan Evaluasi Koordinator Penyuluh Kecamatan

Koordinasi dan Evaluasi Koordinator Penyuluh Kecamatan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dengan peserta adalah koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Lapangan yang terletak di tiap Kecamatan se Kabupaten Madiun. Koordinasi dan Evaluasi Koordinator Penyuluh Kecamatan dilaksanakan untuk sinkronisasi dan pembahasan persiapan kegiatan serta juga evaluasi terhadap program-program kegiatan Penyuluh pertanian dan juga kegiatan di bidang-bidang daripada dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Jadwal Pelaksanaan


No	Hari / Tanggal	Materi	Dokumentasi
1	Jumat, 17 Pebruari 2023 Tempat : Ruang Rapat Utama Dinas Pertanian dan Perikanan kab. Madiun	Penyampaian Kegiatan Gerobak Tani Penyampaian Program Bidang Kelembagaan dan SDM Evaluasi Penyuluhan Masing 2 BPP	

No	Hari / Tanggal	Materi	Dokumentasi
2	Jumat, 26 April 2023 Tempat : Ruang Rapat Dinas Pertanian dan Perikanan kab. Madiun	Evaluasi Kegiatan Penyuluhan di masing 2 BPP Penyampaian Program Bidang Kelembagaan dan SDM, Perkebunan	

b. Sarasehan Petani Milenial

Sarasehan petani milenial dilaksanakan sebanyak 5 pertemuan dimana setiap pertemuan mengikutsertakan perwakilan petani milenial se Kab. Madiun dengan jumlah peserta yang mengikuti sarasehan petani milenial sejumlah 460 orang petani milenial yang tersebar se-Kabupaten Madiun. Sarasehan petani milenial diperuntukan untuk menggali potensi-potensi pemuda dan pemudi milenial di Kabupaten Madiun yang bergerak di bidang pertanian untuk bertukar ilmu dan pengalaman-pengalaman untuk bersama-sama memajukan pertanian di Kabupaten Madiun.

Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut

	Tanggal	Tempat	Dokumentasi
1	2	3	4
1	29 April 2023	Pendopo Muda Graha Kab. Madiun	

	Tanggal	Tempat	Dokumentasi
1	2	3	4
2	20 Mei 2023	Ds Gunungsari Kab. Madiun	
3	23 Juli 2023	Pendopo Ronggo Jumeno Kab. Madiun	
4	8 Agustus 2023	BPP kare	

	Tanggal	Tempat	Dokumentasi
1	2	3	4
5	19 September 2023	Ds Wayut Kec.Jiwan	

c. Programma Tingkat Kecamatan

Perencanaan tertulis yang disusun secara sistematis setiap tahun untuk memberikan arahan dan pedoman sbg alat pengendali pencapaian tujuan yg memuat rencana program dan kegiatan penyuluhan

Programma tingkat kecamatan dilaksanakan di 15 Balai Penyuluhan Pertanian yang tersebar di 15 Kecamatan se kabupaten Madiun. dilaksanakan selama 1 kali di tiap Balai Penyuluhan Pertanian dengan peserta 50 orang dari petani, gapoktan, kelompok wanita tani serta kelompok tani di wilayah kerja Balai Penyuluhan Lapangan di tiap kecamatan di Kabupaten Madiun. Kegiatan Programma Tingkat Kecamatan dilaksanakan untuk menyelaraskan dan menampung aspirasi dari peserta sehingga ke depan arah pembangunan pertanian di tiap kecamatan-kecamatan dapat terpetakan

NO	Tanggal / Tempat	Hasil	Dokumentasi
1	2	3	4
1	10 Mei 2023 BPP Jiwan	Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan mulai beralih ke pupuk organik Pemberdayaan IPOJI (Ikatan Petani Organik Jiwan)	
2	12 Juni 2023 BPP Dagangan	Pertemuan rutin kelompok tani Penyerapan pupuk bersubsidi diharapkan kelompok ikut proaktif di dalamnya	
3	19 Juni 2023 BPP Balerejo	Antisipasi perubahan iklim yang menyebabkan lahan dalam kondisi kritis Dalam persiapan penyusunan RDKK kelompok tani hrs mempersiapkan fc kk,ktp,surat pajak Penilain kelas kelompok shg pertemua rutin klp tani hrs ditingkatkan Dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar kios bisa mengirim langsung ke klp tani	

NO	Tanggal / Tempat	Hasil	Dokumentasi
1	2	3	4
4	20 Juni 2023 BPP Wonoasri	Dalam penyusunan programma diperlukan kerjasama yang baik antara petugas dengan petani	  
5	21 Juni 2023 BPP Kare	Pengembangan tanaman Tembakau Pengembangan tan.hortikultura Peningkatan sdm petani milenial	  
6	26 Juni 2023 BPP Saradan	Pendampingan petugas ke petani dalam rangka mengatasi serangan opt Peningkatan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit Pengembangan sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian (jitung,JUT)	 

NO	Tanggal / Tempat	Hasil	Dokumentasi
1	2	3	4
7	6 Juli 2023 BPP Gemarang	Pengembangan komoditas tan. Perkebunan di petani milenial Penggunaan pupuk organik Penggunaan alsintan tepat guna	
8	6 Juli 2023 BPP Mejayan	Pengembangan PUAP Peningkatan Pendapatan petani di Kawasan hutan Usaha pengembangan penangkapan ikan dan pengembangan usaha ikan air	

NO	Tanggal / Tempat	Hasil	Dokumentasi
1	2	3	4
9	26 Juli 2023 BPP Geger	Pemanfaatan pupuk Organik sehingga bisa mengurami penggunaan pupuk kimia Pemanfaatan Pupuk Hayati dll	  
10	10 Agustus 2023 BPP Pilangkenceng	Meningkatkan produksi hortikultura Pengembangan usaha Agribisnis pedesaan Peningkatan produksi beras Usaha pengembangan penangkapan ikan dan pengembangan usaha ikan air	  

NO	Tanggal / Tempat	Hasil	Dokumentasi
1	2	3	4
11	10 Agustus 2023 BPP Wungu	Kegiatan Pembinaan teknis terhadap peternak sapi , kambing dan ayam Pengembangan sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian (jitung,JUT)	
12	24 Agustus 2023 BPP Dolopo	Waspada kekeringan sebagai dampak fenomena el-nino, petani lebih bijak menentukan pola dan komoditas yang tepat	

NO	Tanggal / Tempat	Hasil	Dokumentasi
1	2	3	4
13	25 Agustus 2023 BPP Sawahan	Mengagendakan Monev PUAP setiap tahun 2x Mengagendakan RAT PUAP setiap bln Januari (11 desa) Pembuatan dan Pengajuan RDKK disesuaikan dengan data baku sawah dari diperta Penggunaan pupuk Organik	  
14	30 Agustus 2023 BPP Madiun	Diperlukan data yang valid tentang luasan budidaya perikanan untuk estimasi anggaran kegiatan yang bersifat aspirasi Pendampingan dalam pembuatan E RDKK	  
15	30 Agustus 2023 BPP Kebonsari	Pengurangan penggunaan pupuk kimia dan mulai menggunakan pupuk organik dengan memanfaatkan uppo yang ada, dengan harapan uppo yg ada bisa memenuhi kebutuhan pupuk organik di kecamatan kebonsari	

d. Pertemuan Pokja 3/kelompok/KWT/Gapoktan;

Pertemuan Pokja 3/kelompok/KWT/Gapoktan dilaksanakan selama 3 kali di setiap kecamatan dengan jumlah peserta sejumlah 50 orang setiap pertemuannya. Jumlah total peserta sebanyak 2.250 orang peserta yang terdiri dari Kelompok Kerja 3 di Kecamatan/kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan. Pertemuan ini dilaksanakan untuk menjangkau dan memberikan pelatihan kepada kelompok kerja 3 dan Kelompok Wanita Tani di tiap kecamatan untuk menggali potensi-potensi yang ada dan mengembangkannya sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan nilai gizi untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitarnya serta sebagai salah satu pemenuhan gizi keluarga dan pencegahan pada program Pemerintah yaitu pencegahan Stunting.

Pelatihan Pokja tahap 1

	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta
1	2	3	4
1	9 Pebruari 2023	BPP Pilangkenceng	50
2	9 Pebruari 2023	BPP Kebonsari	50
3	14 Pebruari 2023	BPP Kare	50
4	15 Pebruari 2023	BPP Wonoasri	50
5	6 April 2023	BPP saradan	50
6	26 April 2023	BPP Wungu	50
7	3 Mei 2023	BPP Sawahan	50
8	4 Mei 2023	BPP Dagangan	50
9	10 Mei 2023	Bpp Dolopo	50
10	15 Mei 2023	BPP Jiwan	50
11	17 Mei 2023	BPP Geger	50
12	23 Mei 2023	BPP Balerejo	50
13	24 Mei 2023	BPP Gemarang	50
14	25 Mei 2023	BPP Mejayan	50
15	13 Juni 2023	BPP Madiun	50

Pelatihan Pokja Tahap 2

	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta
1	27 April 2023	BPP Kare	50
2	4 Mei 2023	BPP Kebonsari	50
3	11 Mei 2023	BPP Pilangkenceng	50
4	11 Mei 2023	BPP Sawahan	50
5	17 Mei 2023	BPP wonoasri	50
6	25 Mei 2023	BPP Saradan	50
7	25 Mei 2023	BPP Wungu	50
8	6 Juni 2023	BPP Jiwan	50
9	7 Juni 2023	BPP Dolopo	50
10	7 Juni 2023	BPP Geger	50
11	8 Juni 2023	BPP Kebonsari	50
12	13 Juni 2023	BPP Balerejo	50
13	14 Juni 2023	BPP Mejayan	50
14	21 Juni 2023	BPP Dagangan	50
15	12 Juli 2023	BPP Madiun	50

Pelatihan Pokja Tahap 3

	Tanggal	Tempat	Jumlah Peserta
1	2	3	4
1	11 Mei 2023	BPP Kare	50
2	8 Juni 2023	BPP Kebonsari	50
3	14 Juni 2023	BPP sawahan	0
4	15 Juni 2023	BPP Wonoasri	50
5	15 Juni 2023	BPP Pilangkenceng	50
6	16 Juni 2023	BPP Saradan	50
7	20 Juni 2023	BPP Gemarang	50
8	5 Juli 2023	BPP Mejayan	50
9	5 Juli 2023	BPP Gemarang	50
10	7 Juli 2023	BPP Dagangan	50
11	11 Juli 2023	BPP Balerejo	50
12	11 Juli 2023	BPP Jiwan	50
13	13 Juli 2023	BPP Dolopo	50
14	20 Juli 2023	BPP Geger	50
15	22 Agustus 2023	BPP Madiun	50

e. Honorarium tim penilai Angka Kredit

Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan digunakan untuk honorarium Tim Penilai angka kredit yang melakukan penilaian angka kredit dari Penyuluh Pertanian lapangan yang dilakukan dalam 1 periode dalam 1 tahun dalam pengajuan DUPAK yang disusun oleh Penyuluh Pertanian lapangan dan diajukan untuk dinilai oleh oleh Tim Penilai angka kredit. penilaian.

f. Penas

Kegiatan Pekan Nasional (Penas) Kontak Tani Nelayan Andalan(KTNA) ke XVI di Padang Sumatera Barat (Sumbar) digelar pada tanggal 1 sampai 15 Juni 2023

Penas merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi bagi para kontak tani, nelayan dan petani untuk saling memperlihatkan pencapaian selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

g. Workshop bagi Petugas dan Petani

No	Hari/tanggal Tempat	Materi	Dokumentasi
1	16 Nopember 2023 Hotel Setia Budi	<p>1. Pengelolaan Keuangan dan Pinjaman bagi Petani</p> <p>Narasumber : Bank Madiun</p> <p>2. Pengembangan Agribisnis dan Pemasaran Pertanian</p> <p>Narasumber : Dinas Perindustrian , Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro</p>	

No	Hari/tanggal Tempat	Materi	Dokumentasi
2	17 Nopember 2023 Hotel Setia Budi	1. Kemitraan Bisnis “ Close Loop “ 2. Pelatihan Aplikasi “ SIAGRI “ Narasumber Tim ICT Komponen 3 dan 4 Konsultan Bimtek Penguatan Kapasitas Pengembangan Agribisnis dan Pemanfaatan Teknologi Digital	

h. Sosialisasi Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau

Kegiatan sosialisasi penanganan panen dan pasca panen tembakau dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juli 2023. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023, di RM. Icha Orient Caruban dengan peserta sejumlah 50 orang petani tembakau dari Kec. Pilangkenceng dan Kec. Balerejo. Hari kedua dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 di RM. Lembah Wilis Kecamatan Wungu, dengan peserta sejumlah 50 orang petani tembakau dari Kec. Kare, Kec. Dagangan dan Kec. Dolopo. Dan hari ke tiga dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 di RM. Icha Orient Caruban dengan peserta sejumlah 50 orang petani tembakau dari Kec. Mejayan, Kec. Saradan dan Kec. Gemarang.

Kegiatan sosialisasi penanganan panen dan pasca panen tembakau ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Aparat Penegak Hukum (Kejaksanaan dan Kepolisian), Dinas Perdagangan dan Koperasi serta dari Gudang PT. Sadana yang berada di Kabupaten Nganjuk.

i. Study Tiru Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau

Study Tiru dilaksanakan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, Kelompok Tani Karya Makmur Desa Glagahwero

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, PT. Alliance One Indonesia dan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember pada tanggal 22-23 Agustus 2023. Yang melakukan Study Tiru adalah petani tembakau dan petugas lapang Dinas Pertanian dan Perikanan Kab. Madiun serta Tim Sekretariat DBHCHT Kab. Madiun sejumlah 120 orang. Tujuan dari kegiatan Study Tiru ini adalah untuk mendapatkan informasi/ wawasan baik petani tembakau maupun petugas pertanian di Kabupaten Madiun terkait teknik penanganan panen dan pasca panen tembakau hingga pemasaran hasil tembakau yang tepat di wilayah tersebut.

Adapun permasalahan dan solusi terkait kegiatan ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Permasalahan

1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2023 masih perlu adanya perencanaan bersama dengan bidang-bidang di Dinas Pertanian dan Perikanan termasuk dengan Dinas lain yang terkait dan insan-insan pertanian di Kabupaten Madiun yang belum bisa dilaksanakan atau yang belum memenuhi target sehingga akan di dapatkan suatu patokan atau programa penyuluhan yang bisa dijadikan acuan bagi petugas penyuluh lapangan dalam melaksanakan tugasnya mendampingi dan membina petani maupun kelompok tani dan juga Pembangunan Pertanian di Kabupaten Madiun.
2. Masih dibutuhkannya penyuluhan bagi petani terutama petani muda / Milenial untuk ikut memajukan pertanian kedepannya

Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah mengintensifkan silaturahmi, koordinasi dan juga komunikasi serta adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga akan tercipta sinergitas dan saling mendukung dan mengisi kekurangan sehingga pelaksanaan kegiatan pertanian bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Meningkatkan intensitas kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan penyuluh dan petani (Petani muda / Milenial) serta insan-insan pertanian di Kabupaten Madiun terkait program dan kegiatan yang menyangkut pembangunan pertanian.

VII.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa memiliki anggaran Rp 1.255.000.000,- terealisasi Rp 1.210.991.400,- (96,49%) . Target

Kegiatan Jumlah jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 6 unit terealisasi 6 unit (100%).

Penganggaran Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) Tahun Anggaran 2023 untuk melaksanakan Pelatihan Tembakau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pelatihan Tembakau Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK-DBHCHT) di wilayah sentra-sentra dan tembakau dan petani tembakau serta pengembangan wilayah tembakau di wilayah Kabupaten Madiun. Sedangkan anggaran Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Tembakau (DTU-DBH) digunakan untuk Kegiatan pameran di Sepasar Ing Madiun atau SPASMA yang bersumber dari anggaran Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Tembakau (DTU-DBH) menampilkan produk-produk dan budidaya yang dilakukan oleh petani Milenial madiun.

Pelatihan Tembakau dilakukan dengan tujuan petani dapat memahami Good Agricultural Practice (SL-GAP) Tembakau secara mandiri dan diharapkan meningkatkan wawasan serta pemahaman para petani tembakau tentang budidaya tembakau, Pengembangan pola kemitraan, Pascapanen, Penerapan Penanggulangan Hama Tanaman (HPT) dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Managemen Agribisnis, Penentuan Grade/Tingkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau, Pembuatan Pupuk Organik, Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani, Kredit Usaha Tani Tembakau, Persemaian dan pemilihan bibit tembakau, Agroekologi tembakau, kesadaran hukum di masyarakat serta yang lain-lain. Sedangkan Pelatihan Tembakau Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) Petani Tembakau diharapkan para petani dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani tembakau dalam penerapan/pengembangan usaha budidaya tembakau. Sedangkan tujuan dari pameran petani milenial madiun bersumber dari anggaran Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Tembakau (DTU-DBH) ini adalah mengurangi permasalahan ketersediaan tenaga kerja pertanian di Kabupaten Madiun, mengubah usaha pertanian menjadi menantang, sehingga akan banyak generasi milenial yang tertarik bergelut di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, Petani Milenial juga diarahkan untuk dapat memanfaatkan teknologi guna menghasilkan produk pertanian berkualitas dan mampu berdaya saing, menumbuh kembangkan kewirausahaan muda pertanian, serta menciptakan pertanian maju, mandiri, dan modern.

Adapun maksud daripada Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Pelatihan Tembakau Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memahami Budidaya Tembakau secara mandiri dan meningkatkan wawasan serta pemahaman para petani tembakau. Selain itu juga diharapkan para petani dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani tembakau dalam penerapan/pengembangan usahanya. Sedangkan pameran petani milenial bersumber dari anggaran Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Tembakau (DTU-DBH) dimaksudkan untuk mengenalkan Komunitas dan juga produk-produk para Petani Milenial Kabupaten Madiun

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi pembiayaan:

1. Pelatihan

Jumlah Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan untuk Pelatihan Tembakau Rp. 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimana pelatihan dilaksanakan dengan 2 Tahap. Tahap I pada tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 7 Agustus 2023. Dan Tahap Ke II pada tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023

Dimana dalam setiap kelompoknya terdapat 40 orang petani tembakau dan buruh tani petani tembakau dari kelompok tani tembakau yang teralokasi. Terbagi atas 12 lokasi pelatihan tembakau atau 12 kelompok tani tembakau yang tersebar di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Gemarang terdapat 1 kelompok tani tembakau, Kecamatan Kare terdapat 6 kelompok tani tembakau, Kecamatan Saradan terdapat 5 kelompok tani tembakau :

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	Jumlah
1	Bangun Karso	Ds. Klangon Kec. Saradan	Wasis	40 orang
2	Margo Mulyo	Ds. Klangon Kec. Saradan	Djarno	40 orang
3	Swa Usaha	Ds. Klangon Kec. Saradan	Njono	40 orang
4	Sumber Agung	Ds. Sumberbendo Kec. Saradan	Puryadi	40 orang

NO	KELOMPOK TANI	ALAMAT	KETUA	Jumlah
5	Sido Makmur	Ds. Pajaran Kec. Saradan	Madasim	40 orang
6	Mekar Sari	Ds. Durenan Kec. Gemarang	Sudjarno	40 orang
7	Mugi Lestari	Ds. Cermo Kec. Kare	Didik	40 orang
8	Karya Tani II	Ds. Cermo Kec. Kare	Yudi	40 orang
9	Karya Makmur	Ds. Randualas Kec.Kare	Padi	40 orang
10	Sambong Makmur	Ds. Kare Kec. Kare	Sarimin	40 orang
11	Tani Makmur	Ds. Kepel Kec.Kare	Sudiri	40 orang
12	Gotong Royong	Ds. Bodag Kec. Kare	Ahmad Dilam	40 orang

Pelatihan tembakau dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan atau 8 materi pelatihan yang diberikan kepada peserta, adapun materi - materi pelajaran sekolah lapang tembakau adalah sebagai berikut :

- a. Pelatihan Budidaya Tembakau;
- b. Pengembangan pola kemitraan;
- c. Pelatihan Pascapanen;
- d. Pelatihan Penerapan Penanggulangan Hama Tanaman (HPT) dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- e. Pelatihan Manajemen Agribisnis;
- f. Pelatihan Penentuan Grade/Tingkatan Kualitas Bahan Baku Tembakau;
- g. Pembuatan Pupuk Organik;
- h. Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani;

Untuk narasumber Pelatihan antara lain Instruktur (praktisi), Universitas Sebelas Maret (UNS) Kampus Caruban Madiun, Universitas Merdeka Madiun, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Sekretariat DBHCHT Kabupaten Madiun, Dinas Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Bank Madiun, Persatuan Himpunan Penyuluh Pertanian (PERHIPTANI) Madiun , PT. Eleanor Project Global Indonesia, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Madiun, Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) PC NU Kabupaten Madiun , Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan PT Sadana Arif Nusa Nganjuk dan lain-lainnya.

B. Pameran Petani Milenial

Jumlah Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan untuk Kegiatan Pameran Petani Milenial Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DTU- DBH) adalah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dimana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan 27 Juli 2023 pada perayaan Hari Jadi Kabupaten Madiun bertempat di Alun-aLun Reksogati Caruban.

1. Realisasi Keuangan

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang terdiri dari Pelatihan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pelatihan Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) dan Pameran Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DTU- DBH) Tahun Anggaran 2023 meliputi pembiayaan:

a. Pelatihan

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2023 untuk Pelatihan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 1.150.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), penggunaan dana sebagian besar untuk makanan dan minuman peserta pelatihan, bantuan transport peserta pelatihan, honorarium narasumber pelatihan, seragam atau kaos peserta pelatihan serta tas ransel dan topi peserta pelatihan.

Telah terealisasi sebesar Rp. 1.111.215.350,- (Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 96,62 % dari anggaran untuk Pelatihan Tembakau. sedangkan sisa anggaran Rp. 38.784.650,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 3,38 % dimana diperoleh dari rekening perjalanan dinas luar daerah, pembulatan anggaran DPA dan sisa daripada pengadaan barang jasa atau kontrak.

b. Pelatihan Petugas dan Petani Tembakau Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT);

Anggaran untuk Pelatihan Petugas dan Petani Tembakau Perubahan Anggaran Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (PAK DBHCHT) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang digunakan untuk makanan dan minuman peserta pelatihan, bantuan transport peserta pelatihan, honorarium narasumber pelatihan, seragam atau kaos peserta pelatihan serta tas ransel peserta pelatihan. Sedangkan realisasi sebesar Rp.70.187.050 (Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima puluh Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 6.954.550 (Bantuan Transport Narasumber dan Perjalanan Dinas Luar Kota).

c. Kegiatan Pameran Petani Milenial Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DTU- DBH);
Anggaran untuk Kegiatan Pameran Petani Milenial Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DTU- DBH) sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk makanan dan minuman peserta pameran, Agen Hayati, Pupuk Organik padat (non Subsidi), Belanja bahan kimia, publikasi, belanja bahan natuna, Jasa tenaga keamanan. Sampai akhir desember 2023 telah terealisasi sebesar Rp. 29.589.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah) pada jasa tenaga keamanan dan sisa pembelanjaan barang

Dari beberapa sub unit dari Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2023 maka di dapat kan realisasi keuangan dari total anggaran Rp. 1.255.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp 1.210.991.400,- (Satu Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 96,49 % sedangkan sisa anggaran Rp. 44.008.600 (Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 3,51 % dimana diperoleh dari rekening perjalanan dinas dinas luar daerah, sisa daripada pengadaan barang jasa atau kontrak dan Bantuan Transport Narasumber.

Adapun permasalahan dan solusi terkait kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Permasalahan

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2022 yang nota bene merupakan salah satu sektor pertanian secara umum maka dalam pelaksanaannya juga memperoleh beberapa kendala atau menemui

kesulitan, antara lain pada saat dilaksanakan Pelatihan Tembakau masih dalam ancaman kondisi pandemi covid 19 dan Serangan El Nino sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan peserta yang lebih banyak dan waktu yang lebih lama. Selain itu juga pasca PT. Sadana Arif Nusa Karangjati ditutup belum ada lagi rekanan yang bisa menampung hasil panen daripada tanaman tembakau sehingga banyak mempengaruhi semangat para petani tembakau dan buruh tani tembakau untuk selalu menanam tembakau di wilayah datar meski untuk wilayah kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang sudah di atasi oleh PT. Sadana Arif Nusa Nganjuk.

Wadah dan legalitas para pemuda dan pemudi di Kabupaten Madiun yang tergabung dalam Petani Milenial Kabupaten Madiun masih berupa kumpulan atau komunitas dan belum secara sah atau resmi dan legal seperti kelompok – kelompok pertanian yang lainnya.

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tahun Anggaran 2023 masih perlu adanya perencanaan bersama dengan bidang-bidang yang lain di Dinas Pertanian dan Perikanan termasuk dengan Dinas lain yang terkait yang belum bisa dilaksanakan atau yang belum memenuhi target sehingga pelaksanaan pelatihan tembakau bisa dilaksanakan beriringan dengan masa tanam tembakau atau pasca tanam tembakau serta tercapainya wadah yang resmi bagi Petani Milenial Kabupaten Madiun.

Upaya Penyelesaian Masalah

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah mengintensifkan koordinasi dengan pemangku pada saat pelaksanaan pelatihan tembakau. Untuk pelatihan tembakau ke depannya lebih memfokuskan pada pemasaran dan memfasilitasi pihak-pihak yang bisa menampung hasil panen tembakau dari petani tembakau dan juga komunikasi serta adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga pelatihan tembakau ke depan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Meningkatkan intensitas kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan stokeholder, rekanan tembakau, perusahaan rokok dan juga dinas lainnya terkait pemasaran khususnya pasar daripada hasil tembakau.

Untuk Petani Milenial Kabupaten Madiun perlu adanya suatu langkah bersama dalam mendampingi dan mengarahkan para petani ke arah yang lebih bagus serta perlu kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan stokeholder, dan juga dinas lainnya terkait legalitas daripada Petnai Milenial Kabupaten Madiun.

VII.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian memiliki anggaran Rp 172.500.000,- terealisasi Rp 171.870.000,- (99,63%) . Target Kegiatan Jumlah sarana dan prasarana penyuluh pertanian sebanyak 15 unit terealisasi 15 unit (100%).

Penggunaan Dana pendataan Pertanian bertujuan untuk pemutakhiran data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh petugas admin BPP melalui aplikasi daring dan luring dalam upaya menyediakan data pertanian yang cepat dan akurat.

Adapun maksud daripada Kegiatan Pendataan Pertanian adalah untuk penguatan data base capaian produksi pertanian yang terukur dan real time, sehingga dapat memudahkan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian.

Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 meliputi pembiayaan:

- a. Pembelian paket data di BPP;

Paket data atau pulsa yang digunakan oleh admin laporan pertanian sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya selama 12 bulan. Paket data atau pulsa digunakan untuk menginput data - data yang dihimpun oleh Petugas penyuluh Lapangan di wilayah kerja BPP tersebut.

Lokasi Kegiatan berada Balai Penyuluhan Pertanian dan Perikanan (BPP) yang tersebar di 15 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan di Kabupaten Madiun yaitu :

No.	Nama BPP	Nama Petugas Admin	Paket data/bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket.
1	BPP Gemarang	Dhevi Aprilia Marsha, SP	250.000	3.000.000	PNS III
2	BPP Saradan	Yoyok Triono	250.000	3.000.000	PNS II
3	BPP Pilangkenceng	Sri Maryanto	250.000	3.000.000	P3K IX
4	BPP Mejayan	Heri Maulana Herlambang, SP	250.000	3.000.000	P3K IX
5	BPP Balerejo	Yeni Supriati, SP	250.000	3.000.000	P3K IX
6	BPP Wonoasri	Khoirul Anam, SP	250.000	3.000.000	P3K IX

No.	Nama BPP	Nama Petugas Admin	Paket data/bulan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket.
7	BPP Wungu	Desy Khalimatus Sa'diyah	250.000	3.000.000	PNS II
8	BPP Sawahan	Syamsul Arifin, SP	250.000	3.000.000	PNS III
9	BPP Jiwan	Wando Handaru,	250.000	3.000.000	PNS III
10	BPP Madiun	Ignatius R. Herman S	250.000	3.000.000	P3K IX
11	BPP Kare	Ari Suryaningsih	250.000	3.000.000	PNS III
12	BPP Geger	Ulfah Yunia E	250.000	3.000.000	P3K IX
13	BPP Dagangan	Santy Siswoyo Putri	250.000	3.000.000	PNS III
14	BPP Kebonsari	Bambang Rian Minarso, SP	250.000	3.000.000	PNS III
15	BPP Dolopo	Projo Prasetyo	250.000	3.000.000	PNS III

b. Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian

Kegiatan Pelatihan Tematik Pertanian meliputi kegiatan di 15 BPP dengan peserta sebanyak 30 dengan sekali pertemuan.

Lokasi Kegiatan


No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
1	23 Pebruari 2022	Sawah	Pembuatan Biosaka	
2	23 Pebruari 2023	Kare	Pembuatan Pupuk Organik	

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
3	23 Pebruari 2023	Dolopo	Pembuatan Biosaka	 
4	27 Pebruari 2023	Wonoasri	Pelatihan Perbanyak Agens hayati	  
5	28 Pebruari 2023	Jiwan	Pembuatan Biosaka	  

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
6	2 Maret 2023	Saradan	Pembuatan Ferinsa (urine sapi)	
7	7 Maret 2023	Gemarang	Pembuatan Biosaka	
8	7 Maret 2023	Wungu	Pembuatan Pupuk Bokhasi	

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
9	13 Maret 2023	Mejayan	Pembuatan Bubur California dan Biosaka	
10	14 Maret 2023	Geger	Pembuatan Biosaka	
11	15 Maret 2023	Dagangan		

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
12	16 Maret 2023	Balerejo	Pembuatan Bubur California	 <p>The first photo shows a group of people seated in a room, listening to a presentation. The second photo shows people standing around a table, preparing ingredients for the porridge. The third photo shows a person pouring liquid into a large pot.</p>
13	10 Mei 2023	Pilangkenceng	Pembuatan Mol dan Pestisida Nabati	 <p>The first photo shows a group of people seated in a room, listening to a presentation. The second photo shows people standing around a table, preparing ingredients for the molasses and pesticides. The third photo shows a person pouring liquid into a large pot.</p>
14	8 Juni 2023	Madiun	Pembuatan Bubur California	 <p>The first photo shows a group of people seated in a room, listening to a presentation. The second photo shows people standing around a table, preparing ingredients for the porridge.</p>

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
15	21 Pebruari 2023	Kebonsari	Pembuatan Biosaka	

c. Kegiatan Sosialisasi Geospasial Lahan Pertanian

Kegiatan Sosialisasi geospasial Lahan Pertanian meliputi kegiatan di 15 BPP dengan peserta sebanyak 30 dengan sekali pertemuan.

Lokasi Kegiatan


No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
1	9 Juli 2023	Dagangan	Sosialisasi Geospasial	
2	21 Agustus 2023	Geger	Sosialisasi Geospasial	

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
3	24 Agustus 2023	Sawahan	Sosialisasi Geospasial	
4	30 Agustus 2023	Saradan	Sosialisasi Geospasial	
5	30 Agustus 2023	Gemarang	Sosialisasi Geospasial	

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
6	31 Agustus 2023	Dolopo	Sosialisasi Geospasial	
7	31 Agustus 2023	Kebonsari	Sosialisasi Geospasial	
8	31 Agustus 2023	Jiwan	Sosialisasi Geospasial	

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
9	5 September 2023	Wonoasri	Sosialisasi Geospasial	
10	5 September 2023	Pilangkenceng	Sosialisasi Geospasial	
11	6 September 2023	Balerejo	Sosialisasi Geospasial	

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
12	6 September 2023	Kare	Sosialisasi Geospasial	
13	7 September 2023	Wungu	Sosialisasi Geospasial	
14	14 September 2023	Madiun	Sosialisasi Geospasial	

No	Tanggal Pelaksanaan	BPP	Materi	Foto Kegiatan
15	14 September 2023	Mejayan	Sosialisasi Geospasial	

Adapun permasalahan dan solusi terkait kegiatan ini diantaranya adalah :

Permasalahan

1. Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Tahun Anggaran 2023 masih perlu adanya perencanaan bersama dengan bidang-bidang yang lain di Dinas Pertanian dan Perikanan termasuk dengan Dinas lain yang terkait yang belum bisa dilaksanakan atau yang belum memenuhi target sehingga akan di dapatkan data base yang bisa dijadikan patokan di Kabupaten Madiun.
2. Sebagian besar peserta Pelatihan belum terbiasa dan masih meragukan dengan penggunaan bahan organik seperti pupuk organik, pestisida nabati, Mol ,POc dll
3. Petani masih kesulitan akan pengemasan dan ijin pemasaran dari produk yang sudah dibuatnya
4. Sebagian besar petani masih belum begitu paham dalam pengukuran geospasial lahan pertanian

Upaya Penyelesaian Masalah

- 1 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah mengintensifkan koordinasi dan juga komunikasi serta adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Madiun sehingga data-data aplikasi laporan utama bisa berjalan dengan

baik dan dinas terkait bisa bersama bebarengan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun sesuai dengan yang diharapkan.

- 2 Meningkatkan intensitas kerjasama, koordinasi dan komunikasi dengan dinas lainnya terkait sajian data-data yang ada di dalam aplikasi laporan utama kostratani.
- 3 Mendorong Petani untuk terus mencoba aplikasi pupuk , pestisida maupun ZPT yang terbuat dari bahan bahan organik yang ramah lingkungan

VIII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program pendukung seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan OPD. Program ini ditunjang oleh 4 (empat) kegiatan yang keseluruhannya merupakan kegiatan yang memuat urusan rumah tangga internal Dinas Pertanian dan Perikanan yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta termasuk didalamnya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp 14.585.054.685,- dengan realisasi sebesar Rp 14.054.734.960,- (96,36%)

3.2 PERMASALAHAN DAN PEMECAHANNYA

Permasalahan terkait pertanian dan perikanan secara keseluruhan terangkum sebagai berikut :

PERMASALAHAN

1. Berkurangnya ekosistem sawah yang merupakan salah satu dampak dari alih fungsi lahan pertanian yang mengancam ketersediaan pangan serta berkurangnya kesempatan petani untuk menggarap lahannya secara berkelanjutan.
2. Penurunan produksi padi yang disebabkan oleh serangan OPT (organisme pengganggu tumbuhan) yang terjadi di beberapa kecamatan. Tanaman padi di wilayah tersebut diserang virus kerdil yang disebabkan karena vektor wereng hijau dan wereng coklat.
3. Tingginya resiko gagal panen komoditas hortikultura akibat pengaruh iklim dan serangan hama penyakit serta sulitnya menjaga mutu pasca panen mengingat komoditas hortikultura tidak dapat disimpan lama dan sangat rentan rusak sehingga mengakibatkan harganya sangat fluktuatif
4. Kegiatan swakelola Dana Alokasi Khusus terkendala oleh ketersediaan dana yang bertahap mengakibatkan penyelesaian pekerjaan fisik terhambat.

5. Lemahnya kemitraan antara petani dan industri rokok sehingga petani mengalami kesulitan dalam pemasaran tembakau
6. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.
7. Minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah, manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang BPP serta minimnya fasilitas untuk peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas penyuluh lapangan.
9. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya, tingginya harga pakan dan terbatasnya ketersediaan benih unggul.
10. Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya (pembesaran dan pembenihan) adalah skala kecil/tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar.
11. Belum optimalnya sarana tangkap (perahu) maupun alat tangkap (jaring, pancing, pelampung dan coolbox)
12. Belum optimalnya sarana pengawasan (perahu patroli) maupun peralatan penunjang pengawasan (pelampung dan head lamp)
13. Berkurangnya populasi ikan di perairan Darat akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan
14. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan secara memadai serta belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan

PENYELESAIAN MASALAH

1. Perlindungan terhadap lahan pertanian melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu program perlindungan terhadap 21.587 Ha lahan sawah untuk tetap berfungsi sebagai lahan pertanian tanaman pangan.
2. Pengendalian OPT melalui Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yaitu :
 - konsep agroekosistem, yaitu perpaduan interaksi komponen-komponen ekosistem pertanian ke dalam taktik pengendalian hama dengan menciptakan keseimbangan antara herbivora dan musuh alaminya .
 - konsep ambang pengendalian, yaitu pengendalian populasi hama/penyakit yang memerlukan tindakan secara kimiawi dengan mempertimbangkan jenis organisme sasaran, dengan pengaruh minimum terhadap manusia, hewan, serangga berguna dan kualitas lingkungan hidup.

- konsep pelestarian lingkungan, yaitu pengendalian OPT melalui pendekatan ekologis, artinya dalam upaya pengendalian OPT harus sekecil mungkin gangguannya terhadap lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan pelatihan pembuatan agen hayati sehingga pengendalian OPT bisa dilakukan secara alami sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga.
3. Peningkatan pengetahuan petani melalui bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil, dengan penerapan teknologi pasca panen yang baik dan pengolahan hasil yang tepat guna. Melalui upaya ini diharapkan petani dapat meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura yang dihasilkan yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani.
 4. Kelompok tani pelaksana swakelola harus menyediakan modal secara mandiri untuk pelaksanaan kegiatan, berupa kas kelompok atau kerjasama dengan pihak desa
 5. Mendekatkan petani tembakau dengan pasar melalui Kerjasama dengan perusahaan mitra khususnya untuk tembakau Kasturi.
 6. Peningkatan penyuluhan kelembagaan petani.
 7. Menumbuhkembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan akses permodalan ,peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi jaringan pemasaran, serta meningkatkan pembinaan penyuluh terhadap kelembagaan petani untuk terus mendorong petani anggota di dalamnya menerapkan GHP GAP, memperhatikan kualitas produk, dan memberikan jaminan mutu hasil pertanian.
 8. Peningkatan sarana dan prasarana BPP serta mengakomodir peningkatan kompetensi dan kapasitas petugas melalui berbagai kegiatan.
 9. Optimalisasi perikanan budidaya melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana perikanan
 10. Peningkatan produktifitas perikanan budidaya melalui pelatihan pembesaran ikan dan pelatihan pembenihan ikan
 11. Optimalisasi sarana tangkap melalui bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap di perairan darat.
 12. Optimalisasi sarana pengawasan melalui bantuan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya ikan di perairan darat .
 13. Peningkatan populasi ikan perairan darat melalui bantuan restocking perairan umum darat (pud)
 14. Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Ikan serta pemberian bantuan fasilitasi sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan

1.5 Tugas Pembantuan

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

a. Identifikasi Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

No.	Pemberi Tugas Pembantuan/Penugasan	Urusan Pemerintahan	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan/ Penugasan
	Pemerintah Pusat	Pertanian	
1		Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan, Kegiatan Perluasan Dan Perlindungan Lahan Pertanian, Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Optimasi Lahan)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
2		Sub Kegiatan Koordinasi, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
3		Sub Kgiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
4		Sub Kegiatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (RDKK) , Kegiatan Fasilitas Pupuk Dan Pestisida Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
5		Sub Kegiatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Verifikasi Dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi) Kegiatan Fasilitas Pupuk Dan Pestisida Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian
6		Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian
7		Kegiatan Penyaluran bantuan Alat dan mesin pertanian	Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
8		Kegiatan Pengembangan Tanaman obat jahe	Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian
9		Kegiatan Pengelolaan Produksi Budidaya Kedelai	Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian
10.		Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Rawat Ratoon)	Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian
11.		Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam	Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian

b. Pelaksanaan

1. Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan, Kegiatan Perluasan Dan Perlindungan Lahan Pertanian, Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Optimasi Lahan)

Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan, Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, SUB kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Optimasi Lahan) adalah DPA Nomor SP DIPA-018.08.4.059185/2023.

Dana dan Sumber Anggaran

Jumlah anggaran Kegiatan Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Kering Tahun Anggaran 2023 ini sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta) yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Mekanisme Pelaksanaan

Sub Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pembebanan Ganti Uang (GU)

Realisasi Keuangan

Anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 12.950.000,00 dengan prosentase 99,61%. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 50.000,00 atau 0,39% dengan rincian sebagai berikut:

- a. Survei Investigasi Desain (SID) : 9.950.000,00
- b. Perjalanan Dinas : 3.000.000,00

Capaian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Sub kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Optimasi Lahan) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Input

Tersedianya anggaran sejumlah Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta) untuk Survei Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Kering senilai Rp. 3.000.000,00 Perjalanan Dinas senilai Rp. 3.000.000,00.

Output

Tersusunnya Perencanaan Survei Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Kering di wilayah Kabupaten Madiun seluas 90 Hektar.

Outcome

NO	KEGIATAN	KONDISI LAHAN	REKOMENDASI KEGIATAN
1.	Survei Investigasi Desain (SID) Kelompok Tani Jati Mulyo Desa Candimulyo Kecamatan Dolopo	Luas lahan yang terdampak 53 Ha, dengan IP 2, pola tanam Padi-Palawija-Bero (sebagian tanaman tahunan tebu). Terdapat saluran Irigasi dari DI Nguren akan tetapi ketika memasuki musim kemarau tidak ada airnya	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (dilampiri dengan hasil pendugaan pengukuran Geolistrik untuk menunjang penyelidikan air tanah)
2.	Survei Investigasi Desain (SID) Kelompok Tani Sekandang II Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan	Luas lahan yang terdampak 54 Ha, dengan IP 1, pola tanam Padi-Bero-Bero. Terdapat saluran Irigasi dari DI Dam Sewu akan tetapi ketika memasuki musim kemarau tidak ada airnya	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (dilampiri dengan hasil pendugaan pengukuran Geolistrik untuk menunjang penyelidikan air tanah)
3.	Survei Investigasi Desain (SID) Kelompok Tani Ngudi Rahayu III Desa Kepet Kecamatan Dagangan	Luas lahan yang terdampak 16 Ha, dengan IP 2, pola tanam Palawija-Palawija-Bero. Terdapat saluran Irigasi dari DI Dam Sareng akan tetapi Air berfungsi sebagai pembuangan dari lahan hutan, jadi hanya berfungsi ketika musim penghujan dan sudah terdapat Air Tanah Dalam, akan tetapi belum bisa dimaksimalkan untuk mencukupi kebutuhan.	Pipanisasi untuk memaksimalkan pemanfaatan Sumber Air
4.	Survei Investigasi Desain (SID) Kelompok Tani Margo Mulyo Desa Klangon	Luas lahan yang terdampak 50 Ha, dengan IP 2, pola tanam Padi-Jagung-Bero. Lahan berupa sawah tadah hujan	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (dilampiri dengan hasil pendugaan pengukuran Geolistrik

NO	KEGIATAN	KONDISI LAHAN	REKOMENDASI KEGIATAN
	Kecamatan Saradan		untuk menunjang penyelidikan air tanah)

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan Koordinasi, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian:

1. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Nomor : SP DIPA-018.08.4.059185/2023 Tanggal 30 November 2022.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Pl.130/5/2008 Tentang Pedoman Penumbuhan Dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian.

Sumber Dana

Anggaran Kegiatan untuk Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian ini senilai Rp. 15.000.000,- dari sumber dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Keuangan

Dari Jumlah Anggaran senilai Rp. 15.000.000,- terserap Rp.15.000.000,-. Kegiatan ini dilaksanakan melalui monitoring pemanfaatan alsintan, pembinaan kelembagaan UPJA, penginputan BAST, dan Pemeriksaan alsintan.

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan Sosialisasi adalah 15 Kecamatan wilayah Kabupaten Madiun, yaitu Kecamatan Kebonsari, Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Wungu, Kecamatan Kare, Kecamatan Mejayan, Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Gemarang, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Madiun Kecamatan Jiwan dan Kecamatan Sawahan.

Mekanisme Pelaksanaan

- a. Penetapan kriteria penerima bantuan perbengkelan Alat dan mesin Pertanian.
 1. UPJA atau Gapoktan memiliki potensi dalam perbengkelan alsintan.
 2. Lokasi di daerah sentra produksi tanaman pangan.
 3. Memfasilitasi UPJA maupun Gapoktan yang mengusulkan bantuan perbengkelan alat dan mesin pertanian.

- b. Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Alat Mesin Pertanian terdapat dukungan dana pendampingan bersumber dari dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa timur
- c. Pendampingan verifikasi Pengawasan Pemanfaatan Alsintan .
Melakukan Pendampingan verifikasi pengawasan pemanfaatan Alsintan supaya penyaluran alsintan yang berada di 15 Kecamatan di Kabupaten Madiun sesuai dengan kreteria penerima tidak terjadi tumpang tindih dan sesuai dengan kebutuhan, petani dan berada pada lokasi yang tepat dan benar benar dimanfaatkan dengan baik.
- d. Memantau perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- e. Melaksanakan Pembinaan kelembagaan UPJA
Melakukan Pembinaan kepada Lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
- f. Melaksanakan Koordinasi Penyaluran BAST untuk memastikan bahwa penyaluran alsintan sudah beserta berita acara serah terima nya sudah lengkap diterima oleh kelompok penerima manfaat sesuai dengan CPCL.
- g. Melaksanakan Monitoring pemanfaatan Alsintan ke 15 kecamatan
Monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan dan penyaluran bantuan alsintan dilaksanakan agar proses penyediaan dan penyaluran bantuan alsintan dapat berdayaguna dan berhasilguna.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada tahap perencanaan pengadaan, tahap pengadaan dan tahap penyaluran oleh petugas, petugas Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan alsintan sampai ke penerima manfaat. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan kebijakan di bidang alsintan.

3. Sub Kgiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Sub Kgiatan Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas adalah DPA Nomor SP DIPA-018.08.4.059185/2023.

Input

Anggaran sejumlah Rp 20.335.000,-

Keluaran

- Perjalanan dinas biasa dalam rangka konsultasi ke Provinsi sebanyak 4 OP.
- Perjalanan dinas biasa dalam rangka verifikasi wilayah, identifikasi CPCL dan dokumen asuransi sebanyak 15 OH
- Perjalanan dinas biasa dalam rangka Pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi asuransi pertanian sebanyak 48 OH
- Transport untuk petugas lapangan dalam rangka koordinasi, pengumpulan data dan evaluasi sebanyak 30 OP
- Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi sebanyak 1 kali

Pelaksanaan Kegiatan

1. Perjalanan Dinas dan bantuan transpot

- Perjalanan dinas dalam rangka evaluasi AOTP dilaksanakan pada 11-31 Juli 2023.
- Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi CPCL asuransi dilaksanakan pada 4-15 September 2023
- Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi asuransi pertanian 6 Juli -22 September 2023

2. Pertemuan dalam rangka:

- Koordinasi kegiatan Asuransi Usahatani Tanaman Padi dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Yang dihadiri oleh 30 peserta.

4. Sub Kegiatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (RDKK) , Kegiatan Fasilitasi Pupuk Dan Pestisida Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Dasar Kegiatan

Dasar pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (RDKK), Kegiatan Fasilitasi Pupuk Dan Pestisida Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas adalah DPA Nomor SP DIPA-018.08.4.059185/2023.

Input

Anggaran sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

Output

Honorarium tim pendataan sebesar 30 OB

Pelaksanaan Kegiatan

- Realisasi Fisik
Honorarium petugas e RDKK sebanyak 30 OB dilaksanakan pada bulan November 2023
- Realisasi Keuangan
Realisasi anggaran sebesar Rp 3.000.000,- (100%)

5. Sub Kegiatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Verifikasi Dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi) Kegiatan Fasilitas Pupuk Dan Pestisida Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Dasar Kegiatan

Dasar pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Verifikasi Dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi) Kegiatan Fasilitas Pupuk Dan Pestisida Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas adalah DPA Nomor SP DIPA-018.08.4.059185/2023.

Input

Anggaran sebesar Rp 32.752.500,- (Tiga Puluh Dua juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Output

Honorarium tim pendataan sebesar 330 OB

Pelaksanaan Kegiatan

- Realisasi Fisik
Honorarium petugas e Verifikasi dan Validasi sebanyak 330 OB dilaksanakan pada bulan November 2023
- Realisasi Keuangan
Realisasi anggaran sebesar Rp 32.752.500,- (100%)

6. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)

Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari/P2L adalah DPPA Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dana dan Sumber Anggaran

Dana yang tersedia Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sumber anggaran berasal dari Dana Transfer Swakelola Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan adalah Swakelola, dimana penyaluran dana langsung kerekening Kelompok Wanita Tani/KWT, bantuan P2L sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per Kelompok.

Anggaran Rp. 50.000.000,- per kelompok, dipergunakan untuk pembelanjaan 4 (empat) komponen, yaitu :

- Sarana Perbenihan : Rumah benih, media tanam, saprodi, sarana penyemaian, peralatan kegiatan perbenihan (tray semai, soilblock, polybag kecil dll)
- Demplot : peralatan dan pengolahan demplot, peralatan pengairan, saprodi, plangnama.
- Pertanaman : media tanam, saprodi, peralatan kegiatan pertanaman dll
- Sarana pascapanen : container/keranjang, selotipsayur, plastic, gunting panen serta alat pasca panen lainnya.

Sasaran dari kegiatan Pekarangan Pangan Lestari/P2L Tahun 2023 adalah :

No	Nama KWT	Lokasi		Metode Pelaksanaan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
		Desa	Kecamatan			
1	Pustangarum	Plumpungrejo	Wonoasri	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi Demokrat
2	Krido Wanito	Purwosari	Wonoasri	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi Demokrat
3	Gelatik	Luworo	Pilangkenceng	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi Demokrat
4	Makmur	Dagangan	Dagangan	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi Demokrat
5	Mekar Sari	Ngranget	Dagangan	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi Demokrat
6	Jeruk Gulung	Jeruk Gulung	Balerejo	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PDIP
7	Tunas Asri	Pacinan	Balerejo	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PDIP
8	Wahyu Rejeki	Betek	Madiun	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PDIP
9	Larasati	Klumutan	Saradan	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PDIP

No	Nama KWT	Lokasi		Metode Pelaksanaan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
		Desa	Kecamatan			
10	Mugi Lestari	Nglambangan	Wungu	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PKB
11	Sri Rejeki	Munggut	Wungu	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PKB
12	Tani Barokah	Tempursari	Wungu	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PKB
13	Sekar Arum	Wonoasri	Wonoasri	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PKB
14	Sumber Lestari	Glonggong	Dolopo	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PKB
15	Riski Lestari	Kradinan	Dolopo	Swakelola	50.000.000,-	Aspirasi PKB

Realisasi Keuangan

Dari anggaran yang tersedia Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), penyerapan anggaran mencapai Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau 100 %, sedangkan sisa anggaran Rp.0,- (Nol rupiah).

7. Kegiatan penyaluran bantuan Alat dan mesin pertanian

Dasar Pelaksanaan

Kegiatan penyaluran bantuan Alat dan mesin pertanian di Kabupaten Madiun tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
- Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 207/HK.310/C/11/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023

Dana dan Sumber Anggaran

Dana untuk kegiatan penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Madiun tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertanian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun bertugas menyalurkan bantuan kepada kelompok tani penerima bantuan guna mendukung terlaksananya kegiatan tersebut.

Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan penyaluran bantuan Alsintan di Kabupaten Madiun tahun 2023 dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- Pengusulan calon penerima bantuan oleh kelompok tani
- Seleksi calon penerima bantuan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan

- Rekomendasi Calon Penerima dan Calon Lokasi Bantuan
- Pemberian bantuan kepada kelompok tani

Realisasi Kegiatan

Realisasi untuk jumlah bantuan Alsintan pascapanen yang di salurkan di Kabupaten Madiun tahun 2023 adalah sebanyak 23 unit, 22 Unit bersumber dari dana APBN dan 1 Unit yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Jawa Timur. Adapun rincian jenis dan sumber dana sebagai berikut:

No	Sumber Dana	Jenis Alat	Jumlah Usulan CPCL (Unit)	Jumlah Realisasi (unit)	Instansi
1	APBN	Combine Harvester Besar	21	18	Dirjen Tanaman Pangan
	APBN	Power Thresher Multiguna Mobile	3	1	Dirjen Tanaman Pangan
	APBN	Power Thresher Multiguna	1	-	Dirjen Tanaman Pangan
	APBN	Motor Roda Tiga	2	2	Dirjen Hortikultura
	APBN	Roda Empat (Pick Up)	1	1	Dirjen Hortikultura
2	APBD	Combine Harvester Besar		1	Provinsi Jawa Timur

8. Kegiatan Pengembangan Tanaman obat jahe

Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan penerima Bantuan Pemerintah telah diatur didalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023.

Dana dan Sumber Anggaran

Sumber anggaran dari DIPA Satker Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2023.

Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan di Pusat, Kabupaten hanya menerima barang yang langsung di drooping ke kelompok tani penerima oleh penyedia barang, sedangkan bantuan berupa sarana/prasarana.

Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Tanaman Obat jahe dengan alokasi anggaran di Satker Pusat komponen bantuan fisik kawasan tanaman obat sebagai berikut :

NO	Nama Poktan	Desa	Kecamatan	Bibit Jahe Emprit(kg)	NPK (kg)	PHC (Lt)	POC (Lt)	Asam Humat
1.	Beji Makmur	Durenan	Gemarang	5.000	1.500	50	50	40
2.	Mojo Mulyo	Suluk	Dolopo	2.500	750	25	25	20
3.	Argo Tani	Suluk	Dolopo	2.500	750	25	25	20

Bantuan benih yang diterima oleh kelompok tani terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mutu benih oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) secara visual dan dicek keabsahan dokumennya ke instansi yang mengeluarkan label benih (BPSB asal benih)

9. Kegiatan Pengelolaan Produksi Budidaya Kedelai

Dasar Pelaksanaan

Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor : 209/HK.310/C/11/2022 Tentang Petunjuk Operasional Bantuan Pemerintah Pengembangan Kawasan Kedelai Tahun Anggaran 2023

Dana dan Sumber Anggaran

- Sumber Anggaran Kegiatan Pengembangan Kedelai, dari DIPA Pusat TA 2023.
- Kelompok Tani menerima bantuan dalam bentuk barang, yang terdiri dari total Benih kedelai 9.550 Kg , Pupuk NPK (Non Subsidi) 9.550 Kg, Pestisida 191 Lt, Pupuk hayati Cair 573 Lt untuk 33 kelompok tani dengan total luas areal tanam kedelai 191 Ha.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 191 Ha dilaksanakan di Kecamatan Saradan bulan maret, Kecamatan Jiwan , Sawahan bulan Juni, dan Kecamatan Pilangkenceng , Gemarang bulan Juli 2023.
- Tempat pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai di Kabupaten Madiun tersebar di beberapa Kecamatan antara lain :
Lokasi Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai seluas 191 Ha di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Saradan, Jiwan, Sawahan, Pilangkenceng dan Gemarang terdiri dari total 33 kelompok tani.

Realisasi Kegiatan

Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai seluas 191 Ha sudah realialisasi 100%, dan sudah panen pada bulan September, Oktober 2023 dengan hasil provitas rata- rata 1,7 - 1,8 ton/ ha

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Provitas (ton/ha)	Produksi (ha)
1.	Saradan	Bandungan	Citra Tani	10	1,8	18
2.		Bandungan	Mahardiko	5	1,8	9
3.		Bandungan	Mitra Karya	3	1,8	5,4
4.	Jiwan	Grobogan	Dadi Rukun I	26	1,8	46,8
5.		Grobogan	Dadi Rukun II	25	1,8	45
6.		Grobogan	Dadi Rukun III	25	1,8	45
7.		Grobogan	Dadi Rukun IV	24	1,8	43,2
8.	Sawahan	Golan	Sayuk Rukun	2	1,6	3,2
9.		Golan	Sumber Rejeki	2	1,7	3,4
10.		Bakur	Mitro Tani	3	1,7	5,1
11.		Bakur	Sri Sedono	1	1,6	1,6
12.		Bakur	Elit Tani	2	1,7	3,4
13.		Bakur	Setyo Rukun	4	1,8	7,2
14.		Rejosari	Dewi Sri	3	1,8	5,4
15.		Rejosari	Sri Mulyo	2,25	1,8	4,05
16.		Rejosari	Rukun Makmur	0,25	1,7	0,425
17.		Lebakayu	Tani Rahayu	0,75	1,7	1,275
18.		Lebakayu	Tani Maju	0,5	1,8	0,9
19.		Lebakayu	Tani Mulyo	0,25	1,7	0,425
20.		Krokeh	Sidodadi	0,5	1,7	0,85
21.		Sidomulyo	Tani Jaya	2	1,8	3,6
22.		Sido Mulyo	Margodadi	1	1,7	1,7
23.		Sido Mulyo	Sinau Mulyo	0,25	1,7	0,425
24.		Pucangrejo	Tani Mulyo	0,25	1,7	0,425
25.	Pilangkenceng	Pilangkenceng	Angudi Wardo	2	1,8	3,6
26.		Muneng	Madu Manis	5	1,8	9
27.		Ngale	Sumber Rejeki	5	1,7	8,5
28.		Gandul	Bangun Rejeki	3	1,8	5,4
29.		Ngengor	Tani Maju	3	1,7	5,1
30.		Kedung Banteng	Tani Utun	5	1,7	8,5
31.		Kedung Banteng	Kedung Pangan	5	1,8	9
32.		Purworejo	Siswo Sejati	10	1,8	18
33.	Gemarang	Nampu	Nampu Membangun	10	1,8	18
	JUMLAH			191		340,875

10. Pengembangan Tanaman Tebu (Rawat Ratoon)

Dasar Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2023 mengacu pada :

Kegiatan APBN Pelaksana Anggaran DIPA revisi II tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Tansimpah Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP.DIPA - 018.05.1.238830/2023 Tanggal 30 November 2022.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian melalui Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2023 melaksanakan Rawat Ratoon di beberapa Provinsi salah satunya Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan Rawat Ratoon dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur serta Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun. Kegiatan Pengembangan tanaman tebu di Kabupaten Madiun pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi Rawat Ratoon awal seluas 100 Ha. Kegiatan rawat ratoon terdiri atas serangkaian tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring.

Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Teknis

1. Pengukuran Lahan dengan GPS

Pengukuran lahan dengan GPS menjadi dasar pengajuan luasan yang akan diajukan kelompok tani, oleh karena itu tahapan ini dilakukan di awal sebelum tahap pengumpulan berkas, yaitu Januari sampai Maret 2023. Calon lahan kelompok tani tebu harus diukur dengan GPS (*Global Positioning System*) untuk mengetahui luas lahan beserta gambar bentuk lahan. Dari luas masing masing lahan akan diketahui luas lahan total petani sekaligus luas keseluruhan pengajuan kelompok tani tebu.

Pengukuran calon lahan menggunakan GPS. Mekanisme pengukuran adalah mengelilingi calon lahan, kemudian mengklik titik koordinat di sudut lahan sampai kembali ke titik koordinat sudut awal lahan. Angka yang tertera di GPS akan tersimpan dengan sendirinya saat mengklik setiap sudut lahan. Hasil klik pengukuran titik koordinat lahan lalu diinput ke komputer, dikonversi hingga akhirnya bisa dicetak gambar lahan per anggota kelompok tani.

2. Sosialisasi Rawat Ratoon

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Rawat Ratoon di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mengundang kelompok tani tebu sebagai calon penerima manfaat dalam pertemuan sosialisasi. Hadir dalam pertemuan sebanyak 5 kelompok tani binaan PG Redjo Agung Baru dan PG Pagotan dengan diwakili masing masing 2 orang, perwakilan dari Anggota Komisi IV DPR RI, perwakilan dari PG Redjo Agung Baru dan PG Pagottan serta Petugas Lapang dari masing-masing Kecamatan.

Acara pertemuan sosialisasi membahas rencana kegiatan rawat ratoon seluas 100 Ha di Kabupaten Madiun. Bantuan yang diterimakan berupa pupuk majemuk 380 Kg/Ha, Pembenh Tanah 8 liter/ha dan Silika 10 Kg/ha. Kelompok tani tebu yang berminat dapat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sesuai persyaratan. Adapun persyaratan sebagai calon penerima manfaat adalah sebagai berikut :

- Calon petani tergabung dalam satu kelompok tani sasaran yang mengusahakan tebu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Kelompok tani sasaran penerima manfaat tergabung dalam gapoktan/koperasi berbasis tebu.
- Calon petani sebagai penerima manfaat bersedia dan mampu melaksanakan budidaya tebu sesuai standar teknis dan sesuai dengan anjuran Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun atau PG Redjo Agung Baru dan PG Pagottan.
- Calon lahan milik petani (petani pemilik, penyewa dan/atau penggarap) yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan/bukti sewa/bukti garap yang diketahui oleh kepala desa setempat.
- Calon lahan tidak sedang menjadi agunan dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya serta tidak dalam sengketa.
- Luas lahan petani tebu sasaran penerima bantuan maksimal 4,0 ha per petani.
- Kelompok tani baru dapat menerima bantuan dengan syarat pada waktu diusulkan sudah membentuk kelompok tani berbasis tebu, dengan maksud untuk mengakomodir petani tebu mandiri yang belum pernah menerima bantuan pemerintah.
- Petani/kelompok tani sasaran penerima manfaat harus tergabung atau menjadi anggota kelompok tani/koperasi berbasis tebu. Bagi petani yang

belum membentuk kelompok tani/gapoktan/koperasi berbasis tebu, agar segera membentuk kelompok tani/gapoktan/koperasi berbasis tebu serta berbadan hukum.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengajuan kegiatan rawat ratoon dilengkapi dokumen pendukung seperti proposal/E-proposal, fotokopi KTP dan KK, soft file GPS dan print hasil GPS, surat keterangan kepemilikan lahan dari kantor desa sesuai lokasi calon lahan, surat pernyataan dan kesanggupan kelompok tani penerima bantuan, surat verifikasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, serta SK Penetapan CPCL dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

Seleksi kelompok tani calon penerima bantuan dilakukan oleh tim teknis kabupaten yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan atas nama Bupati, untuk diusulkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. Lalu, Dinas Perkebunan Provinsi melakukan verifikasi CPCL untuk ditetapkan sebagai kelompok tani sasaran pelaksana kegiatan pengembangan areal produktif tanaman tebu.

Dokumen yang dilengkapi kelompok tani tebu kemudian dikumpulkan ke Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur untuk dikoreksi. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu dasar pengadaan lelang penyedia pupuk. Baik kelompok tani tebu dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tinggal menunggu pemenang hasil lelang, selanjutnya bantuan pupuk majemuk 380 Kg/Ha, Pembenh Tanah 8 Liter/ha dan Silika 10 Kg/ha dapat segera didistribusikan.

4. Pengiriman Bantuan Pupuk Majemuk, Pembenh Tanah dan Silika

Bantuan Pupuk Majemuk, Pembenh Tanah dan Silika terealisasi di bulan Oktober 2023. Pupuk majemuk yang didistribusikan merk Bananas dari produsen CV. Makmur Jaya Abadi dengan komposisi NPK 15-15-15 serta kemasan pupuk 50 kg per sak. Untuk Pembenh Tanah yang didistribusikan merk Humasam dengan kemasan 1 liter, sedangkan Silika yang didistribusikan merk Kalsika dengan kemasan 100 gram.

Lokasi pengiriman bantuan Saprodi ke kelompok tani tebu terpusat di 1 (satu) titik bagi. Pupuk belum dapat dibagikan ke anggota walaupun sudah didistribusikan ke kelompok tani tebu. Karena harus dilakukan uji lab terlebih

dahulu. Setelah hasil uji lab/ sampel pupuk keluar, barulah bantuan saprodi ke kelompok tani tebu tersebut boleh dibagikan ke anggota kelompok tani tebu.

Berikut penerimaan saprodi untuk Kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu (Rawat Ratoon) di masing-masing kelompok tani :

No	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani	Alamat		Luas Areal (Ha)	Jenis Bantuan		
			Desa	Kecamatan		NPK	Pembenah Tanah	Silika
1	Angudi Warta	Haryono	Pilangkenceng	Pilangkenceng	23	8.740	184	230
2	Tebu Indah	Giman	Sawah	Sawah	20	7.600	160	200
3	Tebu Lancar Tani	Andri W	Krokeh	Sawah	24	9.120	192	240
4	Sidodadi	Yatin	Sidorejo	Wungu	24	9.120	192	240
5	Tani Rosan	Bedjo	Nglandung	Geger	9	3.420	72	90
JUMLAH					100	38.000	800	1.000

5. Pengambilan Sampel Pupuk

Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur melakukan sampling pupuk di perwakilan masing masing kabupaten termasuk Kabupaten Madiun. Pengambilan sampel dilaksanakan oleh Tim PPC yang disaksikan oleh kelompok tani dan Tim Teknis Daerah. Sampel pupuk diambil dari kelompok tani kemudian dibawa ke laboratorium.

6. Penyaluran Pupuk ke Anggota Kelompok

Penyerahan pupuk ke anggota kelompok tani kegiatan Rawat Ratoon di Kabupaten Madiun dilakukan setelah hasil uji laboratorium keluar.

7. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi menjadi wujud pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun bertugas memonitoring dan mengevaluasi kegiatan rawat ratoon yang sedang berlangsung. Mulai dari pengiriman pupuk ke kelompok tani, pembagian pupuk ke anggota kelompok tani, sampai dengan aplikasi pemupukan di lahan. Pupuk bantuan harus didistribusikan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Adapun pembinaan, pengawalan, dan pengendalian dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Timur, dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun, serta PG Redjo Agung Baru dan PG Pagottan.

11. Kegiatan Pengembangan Tanaman Nilam

Dasar Pelaksanaan

Dasar pelaksanaan dari Kegiatan Penanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini adalah : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-018.05.1.238830/2023

Dana dan Sumber Anggaran

Sumber anggaran Kegiatan Penanaman Nilam Di Kabupaten Madiun ini dari Sumber Anggaran APBN.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI melaksanakan Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Penanaman Tanaman Nilam Tahun 2023 pada bulan Maret-Desember 2023.

Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah Penanaman Tanaman Nilam dilaksanakan di Kelompok Tani Mugi Lestari Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur seluas 10 Ha. Kegiatan rawat ratoon terdiri atas serangkaian tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring.

Mekanisme Pelaksanaan

a. Verifikasi CPCL

Pengukuran lahan dengan GPS menjadi dasar pengajuan luasan yang akan diajukan kelompok tani, oleh karena itu tahapan ini dilakukan di awal, yaitu Januari sampai Maret 2023. Calon lahan kelompok tani yang diusulkan untuk penanaman nilam harus diukur dengan GPS (*Global Positioning System*) untuk mengetahui luas lahan beserta gambar bentuk lahan. Dari luas masing masing lahan akan diketahui luas lahan total petani sekaligus luas keseluruhan pengajuan kelompok tani. Dari luas lahan yang diusulkan kemudian diverifikasi oleh tim teknis kabupaten untuk menentukan layak atau tidak usulan tersebut bisa direalisasikan.

Dari hasil verifikasi didapatkan data sebagai berikut :

No	Nama Petani	NIK	Desa	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)	Titik Koordinat	Foto Lokasi Kebun	Foto Peta Poligon	Ket.	
	(Open Camera)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1. Didik	3519051501790002	Cermo	Kare	1,00	-7,72004,111,71366				
	2. Sarno	3519053006500021	Cermo	Kare	1,00	-7,72004,111,71366				
	3. Marsono	3519050707700002	Cermo	Kare	1,00	-7,71985,111,71343				
	4. Sujianto	3519051608910004	Cermo	Kare	1,00	-7,71983,111,71336				
	5. Lamto	3519052208870003	Cermo	Kare	1,00	-7,72,111,71368				
	6. Marsuji	3519051111870001	Cermo	Kare	0,50	-77.203.911.171.446				
	7. Rizky Aulia Ibrahim	3519052904010002	Cermo	Kare	0,50	-77.202.611.171.437				
	8. Suyatno	3519050408690002	Cermo	Kare	1,00	-77.202.711.171.437				
	9. Sukijan	3519052006560002	Cermo	Kare	1,00	-7.720.211.171.451				
	10. Waidi	3519050806670001	Cermo	Kare	1,00	-77.203.411.171.457				
	11. Sukini	3519055204810001	Cermo	Kare	1,00	-77.203.511.171.447				
J U M L A H					10,0					

b. Sosialisasi Kegiatan Penanaman Nilam

Pelaksanaan sosialisasi kegiatan penanaman Nilam ini dilakukan di Kelompok Tani Mugi Lestari Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun dengan dihadiri oleh calon petani penerima kegiatan dan juga tim teknis kabupaten serta petugas lapang yang ada di BPP Kare. Acara pertemuan sosialisasi membahas rencana kegiatan penanaman Nilam seluas 10 Ha. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI memberikan hibah barang kepada Kelompok Tani “Mugi Lestari” Desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun berupa Bibit Nilam sebanyak 100.000 batang dan pupuk Organik sebanyak 10.000 Kg.

c. Pengiriman Bantuan Bibit Nilam dan Pupuk Organik

Bantuan Bibit Nilam didistribusikan di Kelompok Tani Mugi Lestari Desa Cermo Kecamatan Kare pada bulan November 2023. Bibit Nilam yang didistribusikan adalah varietas unggul lokal sebanyak 100.000 batang. Untuk pupuk organik didistribusikan pada bulan Desember 2023. Pupuk Organik yang didistribusikan merk Java Green dari produsen Bumu Subur Sentosa. Lokasi pengiriman bantuan Saprodi ke kelompok tani terpusat di 1 (satu) titik bagi.

d. Pendistribusian Bantuan ke Anggota Kelompok Tani

Setelah bantuan bibit nilam dan pupuk organik diterima oleh kelompok dalam kondisi baik dan jumlah yang lengkap selanjutnya akan di distribusikan ke anggota kelompok yang terdaftar dalam CPCL.

Adapun penerimaan bantuan bibit dan pupuk organik di masing-masing anggota adalah sebagai berikut :

No	Nama Petani	NIK	Desa	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Bibit Nilam (batang)	Pupuk Organik (kg)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Didik	3519051501790002	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
2	Sarno	3519053006500021	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
3	Marsono	3519050707700002	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
4	Sujianto	3519051608910004	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
5	Lamto	3519052208870003	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
6	Marsuji	3519051111870001	Cermo	Kare	0,5	5.000	500
7	Rizky Aulia Ibrahim	3519052904010002	Cermo	Kare	0,5	5.000	500
8	Suyatno	3519050408690002	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
9	Sukijan	3519052006560002	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
10	Waidi	3519050806670001	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
11	Sukini	3519055204810001	Cermo	Kare	1,0	10.000	1.000
J U M L A H					10,0	100.000	10.000

e. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi menjadi wujud pertanggung jawaban dari pelaksanaan kegiatan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun bertugas memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penanaman nilam yang sedang berlangsung. Mulai dari pengiriman pupuk ke kelompok tani, pembagian pupuk ke anggota kelompok tani, sampai dengan aplikasi pemupukan di lahan. Pupuk bantuan harus didistribusikan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat sasaran.

c. Permasalahan

1. Pada kegiatan dari Ditjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian selama pelaksanaan kegiatan terjadi 9 kali revisi DIPA oleh Kementerian Pertanian yang memperlambat pelaksanaan kegiatan.
2. Keterbatasan jumlah bantuan pemerintah melalui APBN masih dirasakan oleh petani, khususnya yang berupa subsidi pupuk dan subsidi premi AUTP. Hal ini mengakibatkan kegiatan pendampingan bantuan tersebut menjadi kurang efektif.
3. Jumlah usulan bantuan tidak semua dapat terealisasi oleh Kementerian hal ini dikarenakan karena adanya refocusing anggaran dan juga skala prioritas di kementerian pertanian
4. Pada Kegiatan Rawat Ratoon Proses identifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena keterbatasan petugas baik jumlah personil maupun banyaknya tugas yang lainnya. Serta adanya keterbatasan tenaga kerja yang mengakibatkan aplikasi sarana produksi kurang maksimal.

d. Penyelesaian Masalah

1. Koordinasi intensif dengan dinas provinsi terkait perubahan DIPA agar pelaksanaan kegiatan tidak terkendala.
2. Melakukan pendampingan intensif di lapangan untuk dapatnya meningkatkan kemandirian petani dalam memenuhi kebutuhan sarana produksinya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan mengusulkan CPCL agar dapat terakomodir.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka melakukan penilaian terhadap akuntabilitas organisasi perangkat daerah, setiap tahunnya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berikut capaian pada setiap indikator yang termuat di dalamnya. Berdasarkan hasil Evaluasi Implementasi SAKIP seperti yang tertuang dalam Surat Inspektur Kabupaten Madiun no. 000.8.6.3/2188/402.060/2023, Dinas Pertanian dan Perikanan pada tahun 2022 memperoleh predikat “**sangat baik**” dengan nilai sebesar **77,45**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Pertanian dan Perikanan. Beberapa catatan terkait dengan evaluasi tersebut telah menjadi fokus dan perhatian Dinas Pertanian dan Perikanan untuk kemudian ditindaklanjuti. Adapun beberapa tindak lanjut yang telah dilakukan diantaranya adalah :

1. Melengkapi dokumen perencanaan kinerja sebagaimana hasil reviu yang telah dilaksanakan
2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi (google form, google spreadsheet)
3. Melengkapi dokumen pelaporan kinerja dengan narasi capaian pada setiap indikator kinerja OPD
4. Melengkapi dokumen evaluasi sebagaimana hasil reviu yang telah dilaksanakan

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan dalam LKjIP tahun 2023, sebagian besar capaian kinerja kegiatan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun tetap berkomitmen akan terus memacu pembangunan di bidang pertanian dan perikanan yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan perikanan, serta mencari solusi terhadap hambatan-hambatan dan tantangan yang ada untuk dapat mencapai sasaran dan tujuan dinas yang telah ditetapkan. Dalam upaya tersebut Dinas Pertanian dan Perikanan tentu tidak bisa berdiri sendiri, butuh dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Madiun khususnya petani/kelompok tani/Gapoktan dan pengusaha/stakeholders yang diharapkan akan saling bersinergi demi tercapainya sasaran dan tujuan tersebut.

LAMPIRAN
KELAS KELOMPOK TANI



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUMANTO, SP., MMA.

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Jabatan : Pj. Bupati Madiun

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik periode per tahun maupun lima tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI MADIUN


Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Madiun, November 2023

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN


SUMANTO, SP., MMA.
Pembina Tingkat 1
NIP. 196509191999031006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1.	Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan	Persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan	1,03	%

No	Program	Anggaran		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan	
1.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	PBH Rokok
2.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 130.000.000,00	Rp 130.000.000,00	PBH Rokok, DBH
3.	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Rp 125.000.000,00	Rp 125.000.000,00	DBH SDA, DAU, Lain-lain pendapatan yang sah
4.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.468.138.175,00	Rp 15.027.022.818,00	PBH SDA, DBHCHT, DAK NON FISIK
5.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.452.288.723,00	Rp 1.959.128.723,00	PBH ROKOK, DBH, DBHCHT, DAK FISIK
6.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 2.403.805.000,00	Rp 3.194.468.507,00	APBD, DBHCHT
7.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	PBH Rokok
8.	Penyuluhan Pertanian	Rp 1.602.500.000,00	Rp 2.058.817.400,00	PBH Rokok, DBHCHT, DBH SDA, DAK non fisik
Jumlah		Rp 21.306.731.898,00	Rp 22.619.437.448,00	

Madiun, November 2023

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI MADIUN

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MADIUN

SUMANTO, SP., MMA.
Pembina Tingkat 1
NIP. 196509191999031006



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
INSPEKTORAT

Jl. MT. Haryono Telp. (0351) 453412
e-mail : inspektorat@madiunkab.go.id

C A R U B A N

Nomor	: 000.8.6.3/2188/402.060/2023	Caruban, 31 Agustus 2023
Sifat	: Penting	Kepada
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
Perihal	: Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022	di
		MADIUN

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum yang menjadi acuan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Bupati Madiun Nomor 25 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;

- 6) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Madiun; dan
- 7) Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Madiun Nomor 800.1.111.1/ 1717 /402.060/2023 tanggal 24 Juli 2023.

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP Perangkat Daerah dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Sasaran evaluasi adalah Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Madiun dengan ruang lingkup:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kombinasi atas metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kemanfaatannya,

Dalam menilai pemenuhan suatu kriteria pada masing-masing OPD didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement* dari para evaluator.

Teknik evaluasi yang digunakan antara lain:

- 1) Pengumpulan data dan informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Perangkat Daerah;
- 2) Studi Dokumentasi, yang dilakukan dengan melihat pemenuhan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada website sakip.madiunkab.go.id dan dokumen lain yang menunjang.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanian dan Perikanan.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sudah menindaklanjuti hasil evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Madiun Nomor 1776 tanggal 1 Agustus 2022 diantaranya dengan:

- 1) Menggali inovasi di bidang Pertanian dan Perikanan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dengan melaksanakan pelatihan kepada petani milenial sebanyak 200 petani di tahun 2022;
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2021.

2. Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi kami sampaikan secara terperinci menunjukkan kategori **BB** atau **sangat baik** dengan nilai sebesar **77.45** Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada **Dinas Pertanian dan Perikanan** Kabupaten Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30 %	24,96 %	27.86 %
b. Pengukuran Kinerja	30 %	19,93 %	19.93 %
c. Pelaporan Kinerja	15 %	13.39 %	14.20 %
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	16,88 %	15.47 %
Jumlah	100 %	77,04 %	77.45 %

Penjelasan lebih lanjut atas hasil implementasi SAKIP di Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang dijabarkan dalam Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja dan dokumen pendukung lainnya. Namun demikian masih terdapat hal memerlukan perbaikan dalam perencanaan kinerja diantaranya:

- 1) Indikator tujuan dan indikator sasaran belum menyajikan formulasi hitung pada dokumen renstra perubahan bab 12;
- 2) Indikator tujuan maupun indikator sasaran pada tabel 12 Dokumen renstra perubahan belum menyajikan Analisis SWOT;
- 3) Dokumen Indikator Kinerja Utama belum memuat Definisi Operasional indikator kinerja;
- 4) Dokumen renstra perubahan belum memuat Keputusan kepala perangkat daerah tentang penetapan perubahan renstra;
- 5) Dokumen rencana kerja tahun 2022 dan 2023 belum memuat Keputusan kepala perangkat daerah tentang tim penyusun rencana kerja;
- 6) Dokumen Indikator Kinerja Utama belum melampirkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tahun 2021 tentang perubahan Indikator Kinerja Utama.

b. Pengukuran Kinerja

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi capaian kinerja dan rencana aksinya. Namun demikian masih terdapat hal memerlukan perbaikan dalam pengukuran kinerja diantaranya:

- 1) Belum ada sistem teknologi informasi terkait pengukuran dan pengumpulan data kinerja, sehingga evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi belum dapat dilaksanakan dengan berbasis elektronik, namun pengumpulan data pengukuran kinerja menggunakan sistem berupa SOP;
- 2) Pemberian reward dan punishment belum menggunakan data prestasi capaian kinerja;
- 3) Penetapan perjanjian kinerja jabatan fungsional belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. lakukan koordinasi dengan dinas terkait.

c. Pelaporan Kinerja

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2022 yang sudah dipublikasikan dalam website Perangkat Daerah. Namun demikian masih terdapat hal memerlukan perbaikan dalam pelaporan kinerja diantaranya:

Faktor atau penyebab tidak tercapainya persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dari tahun sebelumnya tahun 2021 capaian sebesar 1.95 menjadi tahun 2022 capaian sebesar 0.91 (terjadi penurunan capaian persentase produksi pertanian dan perikanan).

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi internal telah dilaksanakan namun, belum seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan menetapkan permasalahan dan solusi pada target capaian.

3. Penutup

a. Simpulan

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah pada keseluruhan komponen menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun telah berkinerja dan dipertanggungjawabkan.

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun dan untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami memberikan rekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja
 - a) Menyajikan formulasi hitung pada dokumen renstra perubahan bab 12 pada Indikator tujuan dan indikator sasaran;
 - b) Menyajikan Analisis SWOT pada indikator tujuan maupun indikator sasaran pada tabel 12 Dokumen renstra perubahan;
 - c) Menyajikan Definisi Operasional indikator kinerja pada Dokumen Indikator Kinerja Utama;
 - d) Melampirkan Keputusan kepala perangkat daerah tentang penetapan perubahan renstra pada dokumen renstra perubahan;
 - e) Melampirkan Keputusan kepala perangkat daerah tentang tim penyusun rencana kerja pada Dokumen rencana kerja tahun 2022 dan 2023;
 - f) Dokumen Indikator Kinerja Utama belum melampirkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tahun 2021 tentang perubahan Indikator Kinerja Utama.
- 2) Pengukuran Kinerja
 - a) Melakukan upaya inovasi terkait pengukuran dan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
 - b) menggunakan data prestasi capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment;
 - c) Melakukan koordinasi dengan dinas terkait agar penetapan perjanjian kinerja jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Pelaporan Kinerja

Menjelaskan faktor atau penyebab tidak tercapainya persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan dari tahun sebelumnya tahun 2021 capaian sebesar 1.95 menjadi tahun 2022 capaian sebesar 0.91 (terjadi penurunan capaian persentase produksi pertanian dan perikanan).

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menetapkan permasalahan dan solusi di seluruh target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen evaluasi internal.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan evaluasi Saudara. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara kami sampaikan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN MADIUN**



JOKO LELONO, AP, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730608 199311 1 001

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN MADIUN
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		PERTANIAN DAN PERIKANAN		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	0.93	27.86	
a. PEMENUHAN (6%)		6.00	100.00%	6.00	
1	Renstra telah disusun		Y	1.00	OK
2	Dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja) telah disusun		Y	1.00	OK
3	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Y	1.00	OK
4	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
5	PK telah menyajikan Indikator Tujuan/ Sasaran		A	1.00	OK
6	Terdapat dokumen Rencana Aksi		Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (9%)		9.00	100.00%	9.00	
7	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Y	1.00	OK
8	Renstra telah dipublikasikan tepat waktu		Y	1.00	OK
9	Renja telah dipublikasikan tepat waktu		Y	1.00	OK
10	Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu		Y	1.00	OK
11	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
12	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Tujuan telah memenuhi kriteria SMART.		A	1.00	OK
13	Sasaran telah telah jelas berorientasi hasil		A	1.00	OK
14	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Sasaran telah memenuhi kriteria SMART.		A	1.00	OK
15	Indikator Kinerja Tujuan telah menggambarkan kondisi Tujuan yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		A	1.00	OK
16	Indikator Kinerja Sasaran telah menggambarkan kondisi Sasaran yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		A	1.00	OK
17	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable) dan realistis.		A	1.00	OK
18	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja (Renstra, Renja, PK) telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading Kinerja).		A	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI (15%)		15.00	85.71%	12.86	
19	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1.00	OK
20	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1.00	OK
21	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai		B	0.75	OK
22	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja		A	1.00	OK
23	Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75	OK
24	Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		B	0.75	OK
25	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0.75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (30%)		30.00	66.43%	19.93	
I. PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA (6%)		6.00	100.00%	6.00	
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	OK
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		A	1.00	OK
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		A	1.00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		PERTANIAN DAN PERIKANAN		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
II. KUALITAS PENGUKURAN (9%)		9.00	71.43%	6.43	
4	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		A	1.00	OK
5	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		A	1.00	OK
6	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		A	1.00	OK
7	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK
8	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1.00	OK
9	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		T	-	OK
10	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		T	-	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (15%)		15.00	50.00%	7.50	
11	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		C	0.50	OK
12	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		C	0.50	OK
13	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		C	0.50	OK
14	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		C	0.50	OK
15	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		C	0.50	OK
16	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		C	0.50	OK
17	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		C	0.50	OK
18	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		C	0.50	OK
19	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		C	0.50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	94.64%	14.20	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00	
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Y	1.00	OK
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Y	1.00	OK
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Y	1.00	OK
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		Y	1.00	OK
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Y	1.00	OK
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Y	1.00	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (4.5%)		4.50	100.00%	4.50	
7	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		A	1.00	OK
8	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		A	1.00	OK
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		A	1.00	OK
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		A	1.00	OK
11	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		A	1.00	OK
12	Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1.00	OK
13	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.		A	1.00	OK
14	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		A	1.00	OK
15	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		A	1.00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		PERTANIAN DAN PERIKANAN		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y	NILAI	
1	2		3	4	5
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (7.5%)		7.50	89.29%	6.70	
16	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		Y	1.00	OK
17	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		A	1.00	OK
18	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		A	1.00	OK
19	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		A	1.00	OK
20	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		B	0.75	OK
21	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		B	0.75	OK
22	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		B	0.75	OK
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)		25.00	61.88%	15.47	
I. PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (5%)		5.00	100.00%	5.00	
1	Telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara berkala		Y	1.00	OK
II. KUALITAS EVALUASI (7.5%)		7.50	56.25%	4.22	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang		B	0.75	OK
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		C	0.50	OK
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan pada seluruh bidang di OPD		C	0.50	OK
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		C	0.50	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (12.5%)		12.50	50.00%	6.25	
6	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (internal dan LHE SAKIP OPD) telah ditindaklanjuti.		C	0.50	OK
7	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP (internal dan LHE SAKIP OPD) dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.		C	0.50	OK
8	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (internal dan LHE SAKIP OPD) telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		C	0.50	OK
9	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (internal dan LHE SAKIP OPD) telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.		C	0.50	OK
10	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (internal dan LHE SAKIP OPD).		C	0.50	OK
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	77.45%	77.45	

**REKAPITULASI DAN VALIDASI
PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOKTANI
TAHUN 2023**

BUPATEN : MADIUN
ROVINSI : JAWA TIMUR

NO	K E C	DESA/ KEL	NAMA KELOMPOK TANI	Nilai			Kelas		
				Tahun Lalu	Tahun Ini	Perubahan (+/-/0)	Tahun Lalu	Tahun Ini	Perubahan (tetap/turun/ naik)
1	Saradan	Sugihwaras	Margo Rahayu	214	247	+	Pemula	Lanjut	Naik
2	Saradan	Sugihwaras	Margo Sari	219	249	+	Pemula	Lanjut	Naik
3	Saradan	Sukorejo	Pandan Rejo	238	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
4	Saradan	Sukorejo	Kaligunting Lor	236	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
5	Saradan	Bajulan	Tani Rahayu	136	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
6	Saradan	Bajulan	Mekar Sari	206	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
7	Saradan	Bajulan	Tani Mulyo	164	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
8	Saradan	Bajulan	Cangkring	243	247	+	Pemula	Lanjut	Naik
9	Saradan	Bener	Tirto Laras	215	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
10	Saradan	Bener	Sari Mulyo	214	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
11	Saradan	Bener	Sri Mulyo	246	250	+	Pemula	Lanjut	Naik
12	Saradan	Sumbersari	Rukun Makmur	200	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
13	Saradan	Klumutan	Sumber Rahayu	200	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
14	Saradan	Sambirejo	Margo Mulyo	227	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
15	Saradan	Tulung	Sumber Tani	235	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
16	Wungu	Mojopurno	Sri Murni	459	466	+	Lanjut	Madya	Naik
17	Wungu	Brumbun	Purwo Bangun	237	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
18	Wungu	Wungu	Karya Luhur	239	247	+	Pemula	Lanjut	Naik
19	Wungu	Wungu	Iki Matih Sidomulyo	241	245	+	Pemula	Lanjut	Naik
20	Wungu	Pilangrejo	Rukun Makmur	233	257	+	Pemula	Lanjut	Naik
21	Wungu	Pilangrejo	Tunggal Jaya	243	261	+	Pemula	Lanjut	Naik
22	Wungu	Pilangrejo	Ngupoyo	240	258	+	Pemula	Lanjut	Naik
23	Wungu	Sidorejo	Lestari	231	248	+	Pemula	Lanjut	Naik
24	Wungu	Sidorejo	Wedari	235	250	+	Pemula	Lanjut	Naik

Pemula 0 - 250
Lanjutt 251 - 500
Madya 501 - 750
Utama 7511 - 10000

1. Pemula Ke Lanjut 176
2. Lanjut Ke Madya 51
227

25	Wungu	Munggut	Tani Makmur	236	247	+	Pemula	Lanjut	Naik
26	Wungu	Nglanduk	Sri Mulyo	240	261	+	Pemula	Lanjut	Naik
27	Wungu	Brumbun	Purwo Bangun	239	254	+	Pemula	Lanjut	Naik
28	Wonoasri	Purwosari	Madu Rekso	490	502	+	Lanjut	Madya	Naik
29	Wonoasri	Purwosari	Sumber Tani	485	504	+	Lanjut	Madya	Naik
30	Wonoasri	Jatirejo	Tani Mulyo			+	Lanjut	Madya	Naik
31	Wonoasri	Banyukambang	Margo Utomo	488	505	+	Lanjut	Madya	Naik
32	Wonoasri	Banyukambang	Mardi Rahayu	487	506	+	Lanjut	Madya	Naik
33	Wonoasri	Sidomulyo	Budi Sari	456	502	+	Lanjut	Madya	Naik
34	Wonoasri	Sidomulyo	Tani Mulyo	455	510	+	Lanjut	Madya	Naik
35	Wonoasri	Wonoasri	Sri Jaya	451	517	+	Lanjut	Madya	Naik
36	Wonoasri	Plumpungrejo	Rukun Tani	455	514	+	Lanjut	Madya	Naik
37	Wonoasri	Plumpungrejo	Margo Tani	458	509	+	Lanjut	Madya	Naik
38	Wonoasri	Klitik	Tulus Larasati	482	516	+	Lanjut	Madya	Naik
39	Wonoasri	Buduran	Tut Wuri	485	515	+	Lanjut	Madya	Naik
40	Wonoasri	Buduran	Margo Makmur	486	510	+	Lanjut	Madya	Naik
41	Kare	Morang	Sri Lestari	286	260	+	Pemula	Lanjut	Naik
42	Kare	Morang	Jati Lestari	130	254	+	Pemula	Lanjut	Naik
43	Kare	Cermo	Tani Rukun	249	396	+	Pemula	Lanjut	Naik
44	Kare	Cermo	Karyo Tani II	247	276	+	Pemula	Lanjut	Naik
45	Kare	Cermo	Maju Barokah	203	254	+	Pemula	Lanjut	Naik
46	Kare	Cermo	Mugi Lestari	115	323	+	Pemula	Lanjut	Naik
47	Kare	Randualas	Slaji Makmur	241	283	+	Pemula	Lanjut	Naik
48	Kare	Randualas	Karyo Miguno	278	286	+	Pemula	Lanjut	Naik
49	Kare	Kuwiran	Gemah Ripah	239	269	+	Pemula	Lanjut	Naik
50	Kare	Kuwiran	Beringin Jaya	148	325	+	Pemula	Lanjut	Naik
51	Kare	Kuwiran	Subur Makmur	117	331	+	Pemula	Lanjut	Naik
52	Kare	Kepel	Tentrem	283	560	+	Lanjut	Madya	Naik
53	Kare	Kepel	Tani Makmur	217	324	+	Pemula	Lanjut	Naik
54	Kare	Kepel	Makmur Pangan	230	327	+	Pemula	Lanjut	Naik
55	Kare	Bolo	Maju Terus	235	282	+	Pemula	Lanjut	Naik
56	Kare	Bodag	Tani Kerja	243	283	+	Pemula	Lanjut	Naik
57	Kare	Bodag	Murah Sandang	341	562	+	Lanjut	Madya	Naik
58	Geger	Putat	Budidaya III	384	456	+	Pemula	Lanjut	Naik

59	Geger	Kaibon	Sejahtera II	450	457	+	Lanjut	Madya	Naik
60	Geger	Kaibon	Sejahtera IV	430	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
61	Geger	Kertobanyon	Kertoyoso	446	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
62	Geger	Kertosari	Kerta Boga III	386	457	+	Pemula	Lanjut	Naik
63	Geger	Sangen	Krido Tani	348	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
64	Geger	Pagotan	Roso Mulyo I	306	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
65	Geger	Jogodayuh	Guyub Rukun	308	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
66	Geger	Uteran	Sukomoro II	305	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
67	Geger	Jatisari	Dewi Sri II	323	458	+	Pemula	Lanjut	Naik
68	Geger	Nglandung	Tani Mulyo	327	459	+	Pemula	Lanjut	Naik
69	Geger	Sambirejo	Rejo Mulyo III	325	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
70	Geger	Sumberejo	Sumber Rejeki IV	387	461	+	Pemula	Lanjut	Naik
71	Geger	Purworejo	Kartoraharjo I	372	457	+	Pemula	Lanjut	Naik
72	Geger	Klorogan	Krido Bogo	363	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
73	Geger	Banaran	Mardi Mulyo	377	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
74	Geger	Slambur	Tani Rukun	245	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
75	Geger	Sareng	Sumber Makmur I	226	246	+	Pemula	Lanjut	Naik
76	Geger	Sareng	Sumber Makmur II	245	251	+	Pemula	Lanjut	Naik
77	Geger	Sareng	Gawe Rukun	212	247	+	Pemula	Lanjut	Naik
78	Geger	Geger	Ngudi Luhur IV	450	458	+	Pemula	Lanjut	Naik
79	Dagangan	Ketandan	Margo Raharjo I	231	251	+	Pemula	Lanjut	Naik
80	Dagangan	Tileng	Tani Makmur II	233	247	+	Pemula	Lanjut	Naik
81	Dagangan	Mendak	Sido Mulyo II	218	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
82	Dagangan	Segulung	Tunggal Tekad	216	256	+	Pemula	Lanjut	Naik
83	Dagangan	Padas	Padas Makmur	295	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
84	Dagangan	Joho	Margo Utomo I	288	461	+	Pemula	Lanjut	Naik
85	Dagangan	Kepet	Ngudi Rahayu III	289	456	+	Pemula	Lanjut	Naik
86	Dagangan	Dagangan	Angudi Boga	215	262	+	Pemula	Lanjut	Naik
87	Dagangan	Jetis	Usaha Makmur	287	458	+	Pemula	Lanjut	Naik
88	Dagangan	Prambon	Tani Jaya	223	268	+	Pemula	Lanjut	Naik
89	Dagangan	Banjarejo	Gesang Mulyo	210	253	+	Pemula	Lanjut	Naik
90	Dagangan	Mruwak	Sugih Waras	213	254	+	Pemula	Lanjut	Naik
91	Dagangan	Mruwak	Sido Mukti	348	463	+	Pemula	Lanjut	Naik
92	Dagangan	Banjarsari Wetan	Sejo Mulyo	341	254	+	Pemula	Lanjut	Naik

93	Dagangan	Banjarsari Wetan	Sido Rukun	219	266	+	Pemula	Lanjut	Naik
94	Dagangan	Banjarsari Kulon	Bangkit	221	266	+	Pemula	Lanjut	Naik
95	Dagangan	Sewulan	Ngudi Rejeki III	223	255	+	Pemula	Lanjut	Naik
96	Dagangan	Sukosari	Suko Mulyo	216	258	+	Pemula	Lanjut	Naik
97	Pilangkenceng	Wonoayu	Sumber Rejeki	249	281	+	Pemula	Lanjut	Naik
98	Pilangkenceng	Kedungmaron	Tani Mulyo	482	515	+	Lanjut	Madya	Naik
99	Pilangkenceng	Kedungmaron	Guyub Rukun	218	290	+	Pemula	Lanjut	Naik
100	Pilangkenceng	Sumbergandu	Tirto Mulyo	456	520	+	Lanjut	Madya	Naik
101	Pilangkenceng	Pulerejo	Tani Maju	435	519	+	Lanjut	Madya	Naik
102	Pilangkenceng	Pulerejo	Roso Mulyo	281	523	+	Lanjut	Madya	Naik
103	Pilangkenceng	Pulerejo	Sumber Boga	279	525	+	Lanjut	Madya	Naik
104	Pilangkenceng	Pulerejo	Konco Tani	234	268	+	Pemula	Lanjut	Naik
105	Pilangkenceng	Krebet	Tani Mukti	231	275	+	Pemula	Lanjut	Naik
106	Pilangkenceng	Kedungbanteng	Kedung Rejeki	462	506	+	Lanjut	Madya	Naik
107	Gemarang	Durenan	Beji Makmur	486	502	+	Lanjut	Madya	Naik
108	Gemarang	Durenan	Galih Tani	491	512	+	Lanjut	Madya	Naik
109	Gemarang	Tawangrejo	Tawang Sari I	234	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
110	Gemarang	Tawangrejo	Arjosari	238	263	+	Pemula	Lanjut	Naik
111	Gemarang	Tawangrejo	Plosorejo Makmur	216	251	+	Pemula	Lanjut	Naik
112	Gemarang	Tawangrejo	Guruh Tani	247	258	+	Pemula	Lanjut	Naik
113	Gemarang	Batok	Enggal Makmur	243	315	+	Pemula	Lanjut	Naik
114	Gemarang	Winong	Gebang Sari II	269	325	+	Pemula	Lanjut	Naik
115	Gemarang	Winong	Gebang Sari III	296	331	+	Pemula	Lanjut	Naik
116	Gemarang	Winong	Tumpak Asri I	276	328	+	Pemula	Lanjut	Naik
117	Gemarang	Winong	Tumpak Asri III	271	318	+	Pemula	Lanjut	Naik
118	Gemarang	Winong	Winongsari I	279	376	+	Pemula	Lanjut	Naik
119	Gemarang	Winong	Winongsari II	296	390	+	Pemula	Lanjut	Naik
120	Gemarang	Gemarang	Margo Mulyo	298	398	+	Pemula	Lanjut	Naik
121	Mejayan	Pandean	Warto Sejati	233	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
122	Mejayan	Krajan	Makmur	236	254	+	Pemula	Lanjut	Naik
123	Mejayan	Blabakan	Tani Agung	436	502	+	Lanjut	Madya	Naik
124	Mejayan	Wonorejo	Ngudi Makmur	451	504	+	Lanjut	Madya	Naik
125	Mejayan	Darmorejo	Tani Makmur	480	501	+	Lanjut	Madya	Naik
126	Mejayan	Darmorejo	Sido Rukun	241	253	+	Pemula	Lanjut	Naik

127	Mejayan	Darmorejo	Mekar Sari	467	501	+	Lanjut	Madya	Naik
128	Mejayan	Sidodadi	Sido Makmur	469	532	+	Lanjut	Madya	Naik
129	Mejayan	Mejayan	Sri Rejeki	452	502	+	Lanjut	Madya	Naik
130	Mejayan	Ngampel	Sido Muncul	445	523	+	Lanjut	Madya	Naik
131	Jiwan	Sambirejo	Moro Makmur	236	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
132	Jiwan	Sukolilo	Dadi Rukun III	231	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
133	Jiwan	Kwangsen	Tani Jaya I	249	284	+	Pemula	Lanjut	Naik
134	Jiwan	Kwangsen	Tani Jaya II	247	265	+	Pemula	Lanjut	Naik
135	Jiwan	Klagenserut	Rukun Makmur III	221	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
136	Jiwan	Ngetrep	Setio Rukun	222	256	+	Pemula	Lanjut	Naik
137	Jiwan	Bedoho	Sumber Makmur	236	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
138	Madiun	Nglames	Tani Bahagia	294	287	+	Pemula	Lanjut	Naik
139	Madiun	Dempelan	Tani Makmur	291	275	+	Pemula	Lanjut	Naik
140	Madiun	Betek	Tani Maju	489	510	+	Lanjut	Madya	Naik
141	Madiun	Dimong	Sedyo Suko	233	278	+	Pemula	Lanjut	Naik
142	Madiun	Tulungrejo	Margo Makmur	485	523	+	Lanjut	Madya	Naik
143	Madiun	Tanjungrejo	Tani Makmur	469	522	+	Lanjut	Madya	Naik
144	Madiun	Tiron	Tiron Maju I	247	286	+	Pemula	Lanjut	Naik
145	Madiun	Tiron	Tiron Maju II	248	287	+	Pemula	Lanjut	Naik
146	Madiun	Bagi	Tani Mulyo	235	266	+	Pemula	Lanjut	Naik
147	Madiun	Bagi	Hasil Tani	289	270	+	Pemula	Lanjut	Naik
148	Dolopo	Lembah	Tani Jaya	468	515	+	Lanjut	Madya	Naik
149	Dolopo	Mlilir	Margo Maju	465	513	+	Lanjut	Madya	Naik
150	Dolopo	Kradinan	Bulak Rejo	457	520	+	Lanjut	Madya	Naik
151	Dolopo	Glonggong	Tani Mulyo	489	524	+	Lanjut	Madya	Naik
152	Dolopo	Bader	Redi Rukun	472	519	+	Lanjut	Madya	Naik
153	Dolopo	Bader	Mulyo Tani	475	516	+	Lanjut	Madya	Naik
154	Dolopo	Suluk	Argo Tani	471	521	+	Lanjut	Madya	Naik
155	Dolopo	Suluk	Mojo Mulyo	472	520	+	Lanjut	Madya	Naik
156	Dolopo	Blimbing	Karya Tani	478	519	+	Lanjut	Madya	Naik
157	Dolopo	Candimulyo	Jatimulyo	475	517	+	Lanjut	Madya	Naik
158	Dolopo	Candimulyo	Tani Makmur	476	513	+	Lanjut	Madya	Naik
159	Dolopo	Dolopo	Rukun Makmur	495	524	+	Lanjut	Madya	Naik
160	Dolopo	Dolopo	Maju Karya	492	525	+	Lanjut	Madya	Naik

161	Dolopo	Ketawang	Tani Makmur	468	518	+	Lanjut	Madya	Naik
162	Dolopo	Doho	Margo Makmur	491	523	+	Lanjut	Madya	Naik
163	Sawahan	Golan	Sumber Rejeki	245	267	+	Pemula	Lanjut	Naik
164	Sawahan	Pucangrejo	Ngudi Luhur IV	241	266	+	Pemula	Lanjut	Naik
165	Sawahan	Klumpit	Pangestu	240	257	+	Pemula	Lanjut	Naik
166	Sawahan	Klumpit	Tani Abadi	238	265	+	Pemula	Lanjut	Naik
167	Sawahan	Bakur	Mitro Tani	237	268	+	Pemula	Lanjut	Naik
168	Sawahan	Sidomulyo	Tani Jaya	234	261	+	Pemula	Lanjut	Naik
169	Sawahan	Kajang	Setia Kawan	249	263	+	Pemula	Lanjut	Naik
170	Sawahan	Kanung	Karya Makmur	246	256	+	Pemula	Lanjut	Naik
171	Sawahan	Cabean	Tani Agung	241	267	+	Pemula	Lanjut	Naik
172	Sawahan	Cabean	Tani Widodo	243	259	+	Pemula	Lanjut	Naik
173	Sawahan	Sawahan	Mardi Laras	289	265	+	Pemula	Lanjut	Naik
174	Balerejo	Kebonagung	Tani Maju I	245	257	+	Pemula	Lanjut	Naik
175	Balerejo	Kebonagung	Tani Maju II	235	268	+	Pemula	Lanjut	Naik
176	Balerejo	Blawong	Sumber Makmur	236	259	+	Pemula	Lanjut	Naik
177	Balerejo	Babadan Lor	Ngudoyo Mukti	238	274	+	Pemula	Lanjut	Naik
178	Balerejo	Babadan Lor	Ngudoyo Makmur	239	252	+	Pemula	Lanjut	Naik
179	Balerejo	Garon	Widodo	246	260	+	Pemula	Lanjut	Naik
180	Balerejo	Garon	Sumber Makmur	248	258	+	Pemula	Lanjut	Naik
181	Balerejo	Balerejo	Ngudi Ayam	245	259	+	Pemula	Lanjut	Naik
182	Balerejo	Glonggong	Beno Raharjo	241	267	+	Pemula	Lanjut	Naik
183	Balerejo	Glonggong	Beno Makmur	249	268	+	Pemula	Lanjut	Naik
184	Balerejo	Glonggong	Beno Mukti	243	273	+	Pemula	Lanjut	Naik
185	Balerejo	Kuwu	Sumber Tani	247	270	+	Pemula	Lanjut	Naik
186	Balerejo	Kuwu	Sumber Jadi	249	265	+	Pemula	Lanjut	Naik
187	Balerejo	Warurejo	Tani Maju	245	260	+	Pemula	Lanjut	Naik
188	Balerejo	Kedungjati	Kedung Tani	241	295	+	Pemula	Lanjut	Naik
189	Balerejo	Kedungjati	Kedung Mulyo	241	295	+	Pemula	Lanjut	Naik
190	Balerejo	Kedungjati	Kedung Makmur	242	295	+	Pemula	Lanjut	Naik
191	Balerejo	Jerukgulang	Margo santoso	2248	271	+	Pemula	Lanjut	Naik
192	Balerejo	Sogo	Tani Lestari	236	279	+	Pemula	Lanjut	Naik
193	Balerejo	Banaran	Rantai Agung	239	270	+	Pemula	Lanjut	Naik
194	Balerejo	Banaran	Rantai Lestari	234	252	+	Pemula	Lanjut	Naik

